

Ikhtisar

Global State of Democracy

Mengkaji Ketahanan Demokrasi



www.idea.int

Edisi Bahasa Inggris:

© 2017 International Institute for Democracy and Electoral Assistance

Terjemahan Bahasa Indonesia:

© 2018 Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi dan International Institute for Democracy and Electoral Assistance

Publikasi International IDEA bebas dari kepentingan nasional atau politik tertentu. Pandangan-pandangan yang terungkap dalam publikasi ini tidak selalu mewakili pandangan International IDEA, Pengurus atau Anggota Dewannya.

Referensi-referensi nama negara dan wilayah dalam publikasi ini tidak mewakili kedudukan resmi International IDEA terkait dengan status hukum atau kebijakan dari satuan-satuan tersebut.

Permohonan izin untuk mereproduksi atau menerjemahkan seluruh atau sebagian dari publikasi ini harus diajukan ke:

International IDEA

Strömsborg

SE-103 34 STOCKHOLM

SWEDIA

Tel: +46 8 698 37 00

Email: info@idea.int

Website: <http://www.idea.int>

International IDEA mendukung penyebarluasan hasil kerjanya dan akan segera menjawab permintaan izin untuk mereproduksi atau menerjemahkan publikasi-publikasinya.

Publikasi ini telah mendapat dukungan dari negara-negara Anggota International IDEA melalui pendanaan inti Institute. Terima kasih disampaikan kepada pemerintahan Norwegia dan Swedia, yang atas dukungannya telah memungkinkan publikasi ini.

Publikasi ini adalah terjemahan dari versi Bahasa Inggris International IDEA's "The Global State of Democracy: Exploring Democracy's Resilience, An Overview." Keakuratan naskah yang diterjemahkan belum diverifikasi oleh International IDEA. Dalam hal terjadi keraguan, yang berlaku adalah versi asli bahasa Inggris (ISBN: 978-91-7671-128-6). Penerjemahan ini dilakukan oleh Perludem.

Terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia: Catherine Natalia

Editing: Titi Anggraini, Antony Lee

Tata Letak: Eko Punto Pambudi

Ilustrasi sampul: Michael Tompsett, <http://www.michael-tompsett.pixels.com>

Desain dan layout berdasarkan template yang dikembangkan oleh: Phoenix Design Aid

Percetakan: Kirana Karya

ISBN: 978-91-7671-206-1 (print)

ISBN: 978-91-7671-207-8 (PDF)



Ikhtisar

Global State of Democracy

Mengkaji Ketahanan Demokrasi



Daftar Isi

Kata Pengantar	v	Keterbatasan kerangka kerja hukum pendanaan politik	29
Ucapan terima kasih	vii	Respon yang holistik, berorientasi keadilan, dan meningkatkan integritas	31
Pendahuluan	ix	Pilihan kebijakan dan rekomendasi untuk mengatasi tantangan uang dalam politik	31
Bab 1. Global State of Democracy, 1975–2015	2	Bab 6. Mewaspadaai Kesenjangan: Dapatkah Demokrasi Melawan Ketidaksetaraan?	33
Pemerintahan Perwakilan	4	Mendefinisikan ketidaksetaraan	33
Hak-hak Asasi Manusia	4	Ketidaksetaraan, penyediaan sosial dan penyampaian layanan	34
Pengawasan Pemerintahan	6	Ketidaksetaraan dan kohesi sosial	34
Administrasi yang Imparsial	6	Ketidaksetaraan, suara, dan perwakilan politik	35
Keterlibatan Partisipatif	6	Ketidaksetaraan, kekerasan dan konflik bersenjata	36
Bab 2. Ketahanan Demokrasi di Dunia yang Berubah	10	Demokrasi dan ketidaksetaraan: tidak ada hubungan yang otomatis	36
Apa yang membuat demokrasi bertahan?	10	Tantangan reformasi dan kebijakan redistributif	37
Bab 3. Ancaman dari Dalam: Ketahanan Demokrasi Menghadapi Kemunduran	14	Pilihan kebijakan dan rekomendasi untuk melawan ketidaksetaraan	39
Implikasi terhadap kualitas demokrasi	14	Bab 7. Migrasi, Polarisasi Sosial, Kewarganegaraan, dan Multikulturalisme	40
Melawan kemunduran demokrasi	18	Imigran dan hak pilih	41
Rekomendasi untuk menghadapi dan melawan kemunduran	19	Integrasi politik imigran	42
Bab 4. Perubahan Sifat Partai Politik dan Perwakilan	20	Tantangan partai anti-imigran	44
Tantangan hasil: krisis dan pengendalian kebijakan	20	Perwakilan politik emigran dalam lembaga politik kunci dan badan konsultatif	46
Tantangan kepercayaan dan inklusi	20	Pilihan kebijakan dan rekomendasi untuk mengatasi tantangan migrasi	48
Menurunnya kepercayaan kepada partai	20	Bab 8. Pembangunan Perdamaian Inklusif Dalam Negara yang Terdampak Konflik: Merancang Ketahanan Demokrasi	49
Marginalisasi perempuan dan pemuda	22	Inklusi dan negara yang tangguh	50
Tantangan partai baru dan populisme	23	Mendefinikan “kami rakyat”	52
Tantangan keterlibatan warga negara	23	Inklusi melalui perwakilan	52
Pembuatan keputusan yang deliberatif	24	Lembaga-lembaga elektoral	53
Instrumen demokrasi langsung	24	Pilihan kebijakan dan rekomendasi untuk mengatasi tantangan demokrasi dan pembangunan perdamaian	55
Tanggapan partai yang tangguh	25	Referensi Terpilih	56
Pilihan kebijakan dan rekomendasi untuk mengatasi tantangan sifat partisipasi politik	26	Tentang International IDEA	66
Bab 5. Uang, Pengaruh, Korupsi dan Pembajakan Kebijakan: Dapatkah Demokrasi Dilindungi?	27		
Melemahkan tingkat lapangan permainan yang setara	27		
Korupsi dan pembajakan kebijakan	28		
Kurangnya kepercayaan pada politik dan politisi	29		

Kata Pengantar

Pemberitaan media dan jajak pendapat publik akhir-akhir ini telah memberi peringatan berkenaan ancaman yang semakin nyata terhadap demokrasi. Mereka mengindikasikan, secara pesimis, bahwa demokrasi mengalami penurunan. Memang ada alasan untuk khawatir. Semua negara harus mengatasi tantangan-tantangan kompleks – baik yang berasal dari dalam maupun luar garis batas negara – yang berdaya jangkauan global: dari kelangkaan pangan hingga konflik, dari perubahan iklim hingga terorisme dan kejahatan terorganisasi, serta dari populisme hingga korupsi. Akan tetapi, menurut pendapat saya, ini adalah suatu gambaran persoalan yang tak lengkap.

Mudah sekali untuk melupakan capaian-capaian jangka panjang dunia dalam merawat demokrasi. Pada umumnya, institusi-institusi publik sekarang ini lebih representatif dan akuntabel terhadap kebutuhan dan keinginan warga; perempuan dan laki-laki di semua usia. Selama beberapa dekade terakhir, banyak negara menjadi demokratis dan, kendati mengalami hambatan dan sedikit kemunduran, sebagian besar dari mereka bisa mempertahankan status tersebut. Saat ini, sudah lebih banyak negara menyelenggarakan pemilu dibandingkan masa lalu. Tak kalah penting, sebagian besar pemerintah di dunia menghormati komitmen internasional mereka untuk menegakkan hak-hak asasi manusia, lebih banyak orang yang dapat memberikan suara dengan bebas, serta masyarakat sipil dan pemimpinnya bisa memobilisasi dan terlibat dalam dialog dengan pemimpin politik. Di atas segalanya, demokrasi menghasilkan sebuah efek domino, tumbuh dan menyebar ke penjuru planet ini.

Pemerintah seharusnya terus memperkuat fondasi ini guna mengurangi risiko kemunduran demokrasi, yang bisa mengantarkan ke arah otoritarianisme. Sayangnya, dalam banyak kasus, hasil pemilu tidak dihargai dan aturan-aturan atau institusi yang berwenang dimanipulasi untuk mempertahankan kekuasaan sang pemimpin. Kondisi ini menghambat warga negara untuk mengakses elemen-elemen mendasar, kebebasan dan kesetaraan, yang menjadi keunggulan demokrasi.

Publikasi baru International IDEA *The Global State of Democracy* atau Keadaan Demokrasi Global, menyajikan sebuah analisis global komprehensif terkait tantangan-tantangan yang dihadapi demokrasi serta sejumlah pilihan

kebijakan yang bisa diterapkan untuk menanganinya. Naskah ini mengkontraskan pembalikan demokrasi baru-baru ini dengan kecenderungan positif yang berlangsung dari waktu ke waktu, menyediakan perspektif berbasis fakta yang akurat dan menawarkan solusi atas beragam pertanyaan yang seringkali sangat dipolitisasi. Publikasi ini membahas masalah-masalah rumit, kritis, dan sensitif secara politik yang dihadapi dunia saat ini; seperti bagaimana memberikan kesempatan bagi para migran untuk terlibat secara politis dalam masyarakat di tempat asal maupun tempat tujuannya. Publikasi ini juga membahas bagaimana uang secara tidak pantas mempengaruhi sistem politik, risiko-risiko yang muncul akibat peningkatan kesenjangan terhadap demokrasi, potensi dampaknya kepada generasi mendatang, serta strategi-strategi untuk membuat atau memperkuat instrumen-instrumen politik inklusif pasca-konflik.

Selain itu, International IDEA memberikan wawasan berharga terkait pentingnya peranan perempuan dalam memperkuat lembaga-lembaga politik, bagaimana kaum muda bisa terlibat dalam politik, dan bagaimana inovasi teknologi dan media mengubah praktik berpolitik saat ini. Publikasi ini berisi ringkasan yang sangat kaya atas praktik-praktik terbaik dan studi kasus dari berbagai penjuru dunia; dengan fokus pada perubahan dinamika politik demokrasi yang secara tradisional didefinisikan sebagai “terkonsolidasi” dan “berkembang”.

Publikasi ini menarik perhatian baik pada kekuatan positif maupun negatif yang mempengaruhi sistem demokratis, dan menawarkan serangkaian rekomendasi dan pilihan kebijakan yang bermanfaat. Sekalipun tidak ada solusi

yang mudah, gagasan ini dapat membantu kita semua yang terlibat dalam membangun masyarakat demokratis untuk memperkuat kembali hubungan kita dengan sesama warga negara. Pendek kata, di saat penyatuan kekuatan untuk menjaga demokrasi menjadi jauh lebih penting dari sebelumnya, International IDEA memberikan kepada kita elemen kunci untuk menganalisis dan saran-saran untuk bertindak. Hal ini membuat publikasi ini menjadi sangat tepat waktu.

Michelle Bachelet
Presiden Republik Chile

Ucapan Terima Kasih

Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam edisi pertama *The Global State of Democracy*. Publikasi ini mendapat manfaat dari kontribusi yang diberikan oleh banyak orang di International IDEA, dan dari masukan para anggota organisasi mitra Institut.

Tim Publikasi

Lina Antara, Armend Bekaj, Leigh Bennet, Diana Bologova, Nathalie Ebead, Rosinah Ismail-Clarke, Mélida Jiménez, Rumbidzai Kandawasvika-Nhundu, Brechtje Kemp, Naomi Malaki, Joseph Noonan, Victoria Perotti, Helena Schwertheim, Adina Trunk, Catalina Uribe Burcher dan Samuel Williams.

Kontribusi Tertulis

Zaid Al-Ali, Lina Antara, Armend Bekaj, Sumit Bisarya, Helena Bjuremalm, Nathalie Ebead, Alberto Fernandez, Mélida Jiménez, Rumbidzai Kandawasvika-Nhundu, Brechtje Kemp, Gary Klaukka, Carrie Manning, Paul McDonough, Catalina Perdomo, Victoria Perotti, Sarah Polek, Alina Rocha Menocal, Seema Shah, Timothy Sisk, Svend-Erik Skaaning, Adina Trunk, Catalina Uribe Burcher, Jorge Valladares dan Sam van der Staak.

Peneliti

Fletcher Cox, Joseph Noonan, Isabel Roberth, Helena Schwertheim dan Samuel Williams.

Makalah latar belakang dan kontribusi studi kasus

Lina Antara, Armend Bekaj, Andrew Bradley, Fletcher Cox, Nathalie Ebead, Rose Iles Fealy, Mélida Jiménez, Nana Kalandadze, Rumbidzai Kandawasvika-Nhundu, Gary Klaukka, Gram Matenga, Leah Matthews, Sheri Mayerhoffer, Percy Medina, Joseph Noonan, Victoria Perotti, Isabel Roberth, Helena Schwertheim, Seema Shah, Leena Rikkilä Tamang, Timothy Sisk, Svend-Erik Skaaning, Martín Tanaka, Adina Trunk, Claudiu Tufis, Jorge Valladares, Sam van der Staak dan Samuel Williams.

Staf International IDEA (Stockholm)

Elizabeth Adu-Lowson, Anna-Carin Åhlén, Sead Alihodzic, Tina Antai, Adam Boys, Alexandre Debrun, Nuno Durao, Elin Falguera, Maria Fe Rundberg, Caroline Fox, Karin Gardes, Narda Hansen, Albina Herodes, Rosinah Ismail-Clarke, Samuel Jones, Lumumba Juma, Frank Kayitare, Yves Leterme, Keboitse Machangana, Björn Magnusson, Naomi Malaki, Thomas McKean, Frank McLoughlin, Jonas Mikkelsen, Pola Mina, Gideon Nhundu, Brigit O'Sullivan, Linnea Plam, Thiyumi Senarathna, Annika Silva-Leander, William Sjöstedt, Alexandra Walcher dan Nikolaos Yannakakis.

Staf International IDEA (program regional dan kantor penghubung)

Zaid Al-Ali, Adhy Aman, Andrew Bradley, Alistair Clark, Marie Doucey, Sophia Fernandes, Shana Kaiser, Nana Kalandadze, Kieran Lettrich, Nicolas Matatu, Gram Matenga, Sheri Mayerhoffer, Mark McDowell, Percy Medina, Marilyn Neven, George Okong'o, Adebayo Olukoshi, Nyla Grace Prieto, Leena Rikkilä Tamang, Annamari Salonen, Pablo Schatz, Pilar Tello, Massimo Tommasoli, Sam van der Staak, Daniel Zovatto dan Kimana Zulueta-Fuelscher.

Unit Manajemen Komunikasi dan Pengetahuan International IDEA

Raul Cordenillo, Lisa Hagman, Fredrik Larsson, Tomas Spragg Nilsson, Olivia Nordell, David Prater, Lynn Simmonds dan Tahseen Zayouna.

Pakar indeks *Global State of Democracy*

Michael Bernhard, Raymond dan Miriam Ehrlich Chair, Profesor di Jurusan Ilmu Politik Universitas Florida

Michael Coppedge, Profesor di Jurusan Ilmu Politik dan Rekan Fakultas di Institut Kellogg Studi Internasional Universitas Notre Dame, Ko-Prinsipal Investigator Proyek Varietas Demokrasi (V-Dem)

Carl-Henrik Knutsen, Profesor di Jurusan Ilmu Politik Universitas Oslo, Ko-Prinsipal Investigator Proyek Varietas Demokrasi Historis (V-Dem)

Staffan Lindberg, Profesor di Jurusan Ilmu Politik Universitas Gothenburg, Direktur Institut Varietas Demokrasi (V-Dem)

Gerardo Munck, Profesor di Sekolah Hubungan Internasional Universitas Southern California

Svend-Erik Skaaning, Profesor pada Jurusan Ilmu Politik di Universitas Aarhus, Ko-Prinsipal Investigator Proyek Varietas Demokrasi (V-Dem)

Claudiu Tufis, Profesor Rekan di Jurusan Ilmu Politik Universitas Bukarest

Dewan Peninjau Editorial

Peter Ronald DeSouza, Penulis dan Profesor di Pusat Studi Masyarakat Berkembang

John Githongo, CEO Inuka Kenya Trust

Delia Ferreira Rubio, Penulis dan Konsultan, pemenang Joe C. Baxter Award 2011 dari *International Foundation for Electoral Systems* (Yayasan Internasional untuk Sistem Pemilu)

Pippa Norris, McGuire Dosen Politik Komparatif di Sekolah Pemerintahan Kennedy, Universitas Harvard
Harvard University, Laureate Fellow Australia dan Profesor Pemerintahan dan Hubungan Internasional Universitas Sidney, Direktur Proyek Integritas Pemilu

Peninjau pakar eksternal

Rainer Bauböck, Marcus Brand, Juris Gromovs, Andreas Hirblinger, Barbara Jouan Stonestreet, Dana Landau, Todd Landman, Sarah Lister, Soledad Loaeza Tovar, Augustine Magolowondo, Cynthia McClintock, Magnus Ohman, Sakuntala Kadirgamar Rajasingham, Cheryl Saunders, Christophe Speckbacher, Shahabuddin Yaqoob Quraishi, Richard Youngs dan Reuven Zielger.

Penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia

Khoirunnisa Nur Agustyati, Titi Anggraini, Antony Lee, Irma Lidarti, Catherine Natalia, Eko Punto Pambudi, Heroik M. Pratama dan Bayu Setiadi.

Pendahuluan

Ikhtisar ini menelisik *Global State of Democracy: Keadaan Demokrasi Global* dan tantangan-tantangan yang dihadapi negara demokrasi sebagai implikasi dari lanskap politik terkini. Buku ini merupakan versi ringkasan dari *The Global State of Democracy 2017: Exploring Democracy's Resilience* (International IDEA 2017a), yang mengkaji sejumlah tantangan utama terkini demokrasi dan kondisi-kondisi yang memungkinkan ketahanan demokrasi.

Lanskap politik kontemporer menimbulkan tantangan global yang kompleks bagi demokrasi. Lanskap ini dibentuk oleh globalisasi, pergeseran kekuatan geopolitik, perubahan peran dan struktur organisasi dan lembaga (supra) nasional, dan berkembangnya teknologi komunikasi modern. Fenomena transnasional seperti migrasi dan perubahan iklim juga memengaruhi dinamika konflik dan pembangunan, kewarganegaraan dan kedaulatan negara. Meningkatnya ketidaksetaraan, serta polarisasi sosial dan eksklusif yang dihasilkannya, mendistorsi representasi dan suara politik serta mengurangi basis pemilih moderat yang vital.

Demokrasi kian menghadapi tantangan dari dalam, misalnya ketika para pemimpin politik tidak mau menghormati hasil pemilu atau menyerahkan kekuasaan secara damai. Hal ini bisa mengarah pada kemunduran demokrasi. Sikap apatis pemilih dan ketidakpercayaan kepada lembaga-lembaga politik tradisional – khususnya partai politik dan politisi – membuat warga negara mencari jalur alternatif untuk dialog dan keterlibatan politik, yang didukung oleh teknologi baru. Uang besar dalam politik dan kemampuannya membajak kebijakan negara dan memfasilitasi korupsi, merusak integritas sistem politik. Negara-negara dalam transisi demokrasi dan negara-negara yang terdampak oleh konflik sangat rentan dalam upaya menciptakan masyarakat demokratis yang stabil.

Dinamika-dinamika ini berkontribusi pada pandangan yang diperdebatkan secara luas bahwa demokrasi sedang menurun. Peristiwa-peristiwa di seluruh dunia menantang gagasan ketahanan demokrasi dan membuat sistem demokrasi terlihat rapuh dan terancam. Namun, nilai-nilai demokrasi di antara warga negara dan di dalam lembaga-lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional, terus disuarakan dan dipertahankan. Pada tahun 2017,

demonstrasi massa melawan korupsi terjadi di Brasil, Republik Korea, Rumania, Afrika Selatan, Amerika Serikat dan Venezuela. Di banyak negara, warga negara turun ke jalan untuk merebut kembali demokrasi.

Benang merah lainnya adalah populisme; seruan dari para elite politik demagogis yang mengklaim diri sebagai pembela “rakyat” mengadvokasi perspektif yang tidak liberal – terhadap hak-hak fundamental – yang menawarkan visi masyarakat yang romantis dan sering tak bisa terpenuhi. Gerakan populis terbilang kompleks, dan mungkin memiliki implikasi positif bagi demokrasi dengan memberikan suara kepada mereka yang dirugikan oleh elite dan kaum mapan, tetapi gerakan itu juga mempunyai sisi gelap ketika populis menguasai pemerintahan dan menerapkan kebijakan sosial yang tidak bisa dijalankan.

Selama beberapa dekade, asumsi yang berlaku ialah, dalam banyak hal, sekali demokrasi “terkonsolidasi”, ia akan bertahan (Alexander 2002). Akan tetapi, perkembangan selama masa transisi demokrasi tidak linear atau tak terelakkan (Carothers 2002), dan negara-negara yang umumnya dipandang sebagai negara dengan demokrasi terkonsolidasi juga bisa saja mengalami pengikisan atau kemunduran demokrasi (Lust dan Waldner 2015).

Demokrasi mengalami sejumlah tantangan di Eropa Barat; polarisasi merusak kohesi sosial yang diperlukan agar demokrasi berfungsi dengan baik (Grimm 2016). Di Inggris, pilihan “*Brexit*” (*British exit*) pada Juni 2016 untuk meninggalkan Uni Eropa (UE) meningkatkan perhatian mengenai kemampuan mayoritas yang sangat tipis untuk membuat keputusan yang sangat mempengaruhi kehidupan seluruh warga negara.

Menggemakan keprihatinan global tentang pembatasan masyarakat sipil, negara-negara Eropa Tengah dan Eropa Timur seperti Azerbaijan, Ceko, Hungaria, Polandia, Rusia dan Slowakia telah mengalami kemunduran masyarakat sipil, media yang bebas dan kebebasan oposisi. Hungaria dan Polandia sama-sama telah memilih pemerintahan yang sangat ideologis, meningkatkan keprihatinan tentang konsolidasi demokratis (Rovni, 2014). Pada Januari 2017, para pemrotes di Rumania turun ke jalan untuk menyatakan kemarahan atas keputusan pemerintah yang akan memperlemah akuntabilitas hukum bagi pejabat pemerintahan (Lyman dan Gillet 2017).

Di Afrika, demokratisasi berkembang pesat. Generasi pemimpin yang terkait dengan perjuangan meraih kemerdekaan tampaknya akan segera berganti. Di Angola, Afrika Selatan dan Zimbabwe kekuatan demokrasi multipartai akan diuji dalam rezim yang berkuasa untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan. Pada tahun 2016 dan 2017 krisis meledak di Republik Demokratik Kongo (RDK), Gabon, dan Zimbabwe sebagai akibat dari manipulasi eksekutif untuk mempertahankan kekuasaan di luar batas konstitusi. Permainan kekuasaan oleh presiden seringkali mengakibatkan protes keras dan siklus represi, seperti halnya terjadi di Burundi, di mana klaim “termin ketiga” yang keras oleh Presiden Pierre Nkurunziza membawa negaranya mendekati “negara gagal” (ICG 2016).

Di Asia dan Pasifik, negara-negara seperti Cina dan Vietnam menikmati kemajuan ekonomi yang berkesinambungan di bawah sistem satu-partai; pada tahun 2016, Vietnam beralih ke kepemimpinan baru melalui pemilu oleh delegasi Partai Komunis yang berkuasa. Filipina – yang beralih ke demokrasi setelah melalui revolusi “Kekuatan Rakyat” tahun 1983-1986 – telah mengalami kemunduran hak dan kebebasan yang dijustifikasi oleh perang rakyat terhadap narkoba. Partai oposisi di Afghanistan, Bangladesh, Kamboja, Malaysia, Maladewa, Pakistan, dan Thailand telah mempertanyakan keabsahan proses pemilu serta memboikot atau menolak hasilnya; pola ini menunjukkan kelemahan demokrasi di kawasan ini (UNDP-DPA 2015).

Pola-pola di Amerika Latin dan Karibia mengindikasikan bahwa demokrasi hampir menjadi norma di wilayah ini, yang saat ini sedang menikmati konsolidasi demokrasi yang paling mendalam. Wilayah ini telah menyaksikan perluasan hak identitas seksual dan hak bagi masyarakat adat. Akan tetapi, demokrasi masih ditantang oleh korupsi yang mengakar di Brasil, Peru dan Venezuela, serta oleh

ketidaksetaraan ekonomi yang berkesinambungan. El Salvador, Guatemala, Honduras, Meksiko dan Venezuela mengalami kekerasan bersenjata yang berasal dari kejahatan terorganisasi dan bentuk lain ketidakamanan manusia, seperti kekerasan berbasis gender, yang membatasi demokrasi (Santamaría 2014). Dalam lingkungan yang tidak aman seperti ini, organisasi kriminal dan jaringan ilegal menasar masyarakat sipil, media independen, hakim dan jaksa, serta pejabat pemerintah lokal.

Edisi pertama *The Global State of Democracy* [Kondisi Demokrasi Global] mengeksplorasi tantangan kunci terkini demokrasi dan kondisi-kondisi yang memungkinkan ketahanan demokrasi. **Ketahanan** dimaknai sebagai kemampuan sistem sosial untuk mengatasi, bertahan hidup, berinovasi dan pulih dari tantangan dan krisis yang rumit, yang menghadirkan ketegangan dan tekanan yang bisa menyebabkan kegagalan sistemik. Edisi ini mengkaji implikasi dari proses kemunduran demokrasi terhadap kualitas demokrasi serta tantangan-tantangan kunci seperti: perubahan sifat partai politik dan perwakilan; uang, pengaruh, korupsi dan pembajakan kebijakan negara; ketidaksetaraan dan eksklusi sosial; migrasi, polarisasi sosial, kewarganegaraan, dan multikulturalisme; serta demokrasi dan pembangunan perdamaian pada masa transisional pasca-konflik.

Berdasarkan indeks *Global State of Democracy* (GSoD) yang baru dikembangkan, sebuah publikasi lengkap menyajikan penilaian global dan regional atas status demokrasi dari tahun 1975 – pada awal gelombang ketiga demokratisasi – hingga 2015, dilengkapi dengan analisis kualitatif mengenai tantangan-tantangan demokrasi hingga tahun 2017. Data indeks GSoD dimulai pada tahun 1975 untuk memastikan keandalan dan kualitas tinggi dari sumber data sekunder (International IDEA 2017b).

Publikasi ini berusaha menjembatani jurang antara penelitian akademik, perkembangan kebijakan dan inisiatif-inisiatif pendampingan demokrasi, dan utamanya bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembuat kebijakan, organisasi masyarakat sipil dan aktivis demokrasi, pemberi pengaruh kebijakan dan organisasi riset, maupun penyedia dukungan demokrasi dan praktisi. Publikasi ini mencoba menyediakan pilihan dan rekomendasi kebijakan yang dapat dilaksanakan oleh lembaga dan pelaku politik kunci dalam upaya mendukung dan memajukan demokrasi. Garis besar yang rinci mengenai pembagian geografis wilayah dan negara International IDEA ditemukan dalam naskah latar

Kerangka Kerja Konseptual: Global State of Democracy



belakang “Definisi Wilayah Geografis dalam *The Global State of Democracy*” (International IDEA 2017c).

Sudahkah indeks *Global State of Democracy* menurun selama 10 tahun terakhir? Apa yang menjadi trend utama dunia dalam berbagai aspek demokrasi sejak awal gelombang ketiga demokratisasi? Apa yang seharusnya dilakukan oleh negara demokratis untuk mencegah kemunduran demokrasi? Bagaimana tantangan demokrasi diatasi untuk menghasilkan kondisi bagi demokrasi yang tangguh?

Definisi demokrasi International IDEA

International IDEA, sebuah organisasi internasional yang mendukung demokrasi berkelanjutan di seluruh dunia, mendefinisikan **demokrasi** sebagai “pengendalian rakyat terhadap para pembuat kebijakan dan kesetaraan politik bagi mereka yang menjalankan pengendalian itu”. Secara lebih khusus, demokrasi ideal “berupaya menjamin kesetaraan dan kebebasan asasi; memberdayakan rakyat kebanyakan; menyelesaikan perselisihan melalui dialog damai, menghormati perbedaan; serta menghasilkan pembaharuan politik dan sosial tanpa konflik” (Landman 2008: 17). Oleh karena itu, demokrasi dipahami dalam

pengertian yang lebih luas dari sekedar pemilu yang bebas. Demokrasi adalah sebuah konsep dengan berbagai dimensi, termasuk hak-hak sipil dan politik, hak-hak sosial dan ekonomi, tata kelola pemerintahan yang demokratis serta supremasi hukum.

Pemahaman International IDEA mengenai demokrasi bertumpang tindi dengan segi-segi pemikiran demokratis, seperti demokrasi elektoral, demokrasi liberal, dan demokrasi partisipatif. Konsep demokrasi itu mencerminkan suatu nilai inti yang termaktub dalam Pasal 2 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia bahwa “kehendak rakyat” merupakan dasar legitimasi dan kewenangan negara berdaulat. Ia menggabungkan suatu keinginan yang umum dan universal untuk perdamaian, keamanan dan keadilan. Demokrasi mencerminkan basis etik yang mendasar dari kesetaraan dan martabat manusia, sehingga karenanya tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia.

Prinsip-prinsip demokratis pengendalian rakyat dan kesetaraan politik sesuai dengan berbagai institusi politik dalam bentuk sistem pemilu (proporsional–mayoritarian), sistem pemerintahan (presidensial–parlementer) dan

struktur negara (federal–kesatuan) pada tingkat nasional, daerah dan supranasional. Dengan demikian, prinsip-prinsip ini terbuka untuk penerapan yang sensitif-konteks dari standar pemerintahan demokratis yang universal. Singkatnya, suatu sistem demokratis bisa dikelompokkan dalam berbagai cara, dan negara-negara bisa membangun demokrasinya dengan cara-cara berbeda, dan karenanya dapat memenuhi prinsip-prinsip ini pada derajat yang berbeda. Pemahaman demokrasi yang luas dari International IDEA diukur dengan indeks GSoD yang baru (Kotak I.1) yang berdasar pada lima dimensi atau “atribut” demokrasi: Pemerintahan Perwakilan, Hak Asasi Manusia, Pengawasan Pemerintahan, Administrasi yang Imparsial, dan Keterlibatan Partisipatif.

1. *Pemerintahan Perwakilan* meliputi sejauh mana akses ke kekuasaan politik bersifat bebas dan setara sebagaimana ditunjukkan oleh pemilu yang kompetitif, inklusif dan berkala. Dimensi ini, berkenaan dengan konsep demokrasi elektoral, memiliki empat subdimensi: pemilu yang bersih, hak pilih inklusif, partai politik yang bebas, dan pemerintahan yang dipilih.
2. *Hak Asasi Manusia* menangkap sejauh mana derajat kebebasan sipil dihormati, dan apakah rakyat memiliki akses ke sumber daya mendasar yang memungkinkan mereka berpartisipasi aktif dalam proses politik. Dimensi ini, yang secara signifikan tumpang tindih dengan kovenan internasional tentang hak asasi

manusia, memiliki tiga subdimensi. Dua di antaranya berhubungan dengan konsep demokrasi liberal (akses pada keadilan dan kebebasan sipil) dan satu pada konsep demokrasi sosial (hak-hak sosial dan kesetaraan).

3. *Pengawasan Pemerintahan* mengukur pengawasan efektif terhadap kekuasaan eksekutif. Hal ini memiliki tiga subdimensi berhubungan dengan konsep demokrasi liberal: kemandirian yudisial, parlemen yang efektif dan integritas media.
4. *Administrasi yang Imparsial* berkenaan dengan bagaimana keputusan-keputusan politik dilaksanakan dengan adil dan dapat diperkirakan, dan karenanya mencerminkan aspek kunci supremasi hukum. Dimensi ini berhubungan dengan konsep demokrasi liberal, yang menentukan bahwa pelaksanaan kekuasaan harus mematuhi aturan dan dapat diperkirakan. Dimensi ini memiliki dua subdimensi: ketiadaan korupsi dan penegakan hukum yang dapat diperkirakan.
5. *Keterlibatan Partisipatif* terkait dengan sejauh mana perangkat keterlibatan politik tersedia dan sampai derajat mana warga negara menggunakannya. Hal ini berhubungan dengan konsep demokrasi partisipatif dan memiliki empat subdimensi: partisipasi masyarakat sipil, partisipasi elektoral, demokrasi langsung dan pemilu subnasional.

KOTAK I.1.

Indeks Global State of Demokrasi International IDEA

Indeks GSoD International IDEA yang baru mengukur aspek-aspek demokrasi yang berbeda selama periode 1975–2015 di 155 negara di seluruh dunia.

Definisi: Demokrasi didefinisikan sebagai pengawasan rakyat atas pembuatan dan pembuat keputusan publik, dan kesetaraan politik antar warga negara dalam pelaksanaan pengawasan tersebut.

Atribut demokrasi: Indeks mengukur 5 atribut utama demokrasi, yang terdiri atas sejumlah 16 subatribut. Mereka memasukkan 5 fitur yang ditekankan oleh berbagai tradisi pemikiran demokratis yang terhubung dengan konsep demokrasi elektoral, demokrasi liberal, demokrasi sosial dan demokrasi partisipatif:

Atribut 1: Pemerintahan Perwakilan

Subatribut: Pemilu yang Bersih, Hak Pilih Inklusif, Partai Politik yang Bebas, Pemerintahan yang dipilih

Atribut 2: Hak-hak Asasi Manusia

Subatribut: Akses pada Keadilan, Kebebasan Sipil, Hak-hak Sosial dan Kesetaraan

Atribut 3: Pengawasan Pemerintahan

Subatribut: Parlemen yang Efektif, Kemandirian Yudisial, Integritas Media

Atribut 4: Administrasi yang Imparsial

Subatribut: Ketiadaan Korupsi, Penegakan Hukum yang Dapat Diperkirakan

Atribut 5: Keterlibatan Partisipatif

Subatribut: Partisipasi Masyarakat Sipil, Partisipasi Elektoral, Demokrasi Langsung, Pemilu SubNasional

Sumber: Data bergantung pada berbagai sumber, termasuk survei pakar, pengkodean berbasis standar oleh kelompok peneliti dan analisis, data observasi dan pengukuran komposit atas lebih dari 100 indikator.

Satuan observasi: Kumpulan data GSoD mencakup data negara-tahun dari 155 negara yang memiliki setidaknya 1 juta penduduk. Dalam perhitungan rata-rata regional dan global, skor tidak ditimbang berdasarkan ukuran populasi.

Skala: Seluruh indeks berkisar antara 0 (pencapaian demokratis terendah) hingga 1 (pencapaian demokratis tertinggi); 0 pada umumnya merujuk pada kinerja terburuk dalam keseluruhan sampel negara-tahun (yang dicakup oleh indeks tertentu), sedangkan 1 merujuk pada kinerja terbaik negara-tahun dalam sampel.

Agregasi: Konstruksi indeks terutama bergantung pada pemodelan teori respon item dan analisis faktor Bayesian. Dalam beberapa kasus, agregasi dihitung dengan mengambil rata-rata atau mengalikan beberapa indikator.

Rincian lebih lanjut mengenai kumpulan data GSoD dan indeks yang terkait dapat ditemukan di Skaaning, S-E., *The Global State of Democracy Indices Methodology: Conceptualization and Measurement Framework* [Metodologi Indeks Kondisi Demokrasi Global: Konseptualisasi dan Kerangka Pengukuran]. (Stokholm: International IDEA, 2017), <<http://www.idea.int/gsoD>>.

Bab 1. Global State of Democracy, 1975–2015

Bagaimana kondisi demokrasi global? Beberapa pengamat (misalnya Levitsky dan Way 2015; Lührmann *et al.* 2017; Møller dan Skaaning 2013b) menganggap kondisi demokrasi yang membaik sangat pesat selama beberapa dekade terakhir, sejak pertengahan tahun 1970-an, diikuti dengan perlambatan atau malah justru stagnasi. Pandangan lainnya (misalnya Diamond 2016) bahkan menyatakan bahwa demokrasi menghadapi penurunan yang signifikan dalam skala global selama lebih dari satu dekade, bahkan juga terlihat tanda-tanda nyata atas gelombang balik demokratisasi. Persepsi negatif terhadap kondisi demokrasi seringkali didasarkan pada perkiraan tidak seimbang dengan fokus yang bias berbasis pada contoh-contoh negatif yang terjadi belakangan ini, atau mengandalkan kumpulan data kurang transparan dan dikonstruksi dengan prosedur yang secara ilmiah bisa dipertanyakan (Coppedge *et al.* 2011). Terlebih lagi, sekalipun kekhawatiran terhadap penurunan demokrasi umumnya menjadi kian intens dan mengemuka, tetapi sebenarnya hal itu bukanlah sesuatu yang baru (lihat Merkel 2010).

“Pemeriksaan kesehatan” demokrasi yang dilakukan International IDEA – yang mengacu pada analisis tren global dan regional antara tahun 1975 hingga 2015 dengan menggunakan indeks GSoD – menunjukkan bahwa demokrasi menghadapi banyak tantangan, serta ketahanannya tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang ada dengan sendirinya. Ada banyak ruang untuk perbaikan di semua dimensi demokrasi. Namun, keadaan demokrasi sebenarnya lebih baik daripada kondisi yang dipersepsikan oleh pandangan pesimistis mengenai prevalensi dan ketahanan demokrasi kontemporer. Tren sejak 1975 menunjukkan bahwa sebagian besar aspek demokrasi sudah berkembang, serta sebagian besar negara demokrasi sudah menjadi tangguh dari waktu ke waktu. Apalagi, kemunduran demokrasi sekarang ini cenderung bersifat jangka pendek dan akan pulih kembali saat kekuatan-kekuatan internal yang ramah-demokrasi bekerja sama menolak pemimpin yang cenderung otoriter.

Dengan menggunakan pemahaman demokrasi yang sempit (secara eksklusif elektoral) serta kaku (contoh, mengklasifikasi negara dalam posisi biner demokratis atau tidak), terlihat bahwa angka dan proporsi negara yang dianggap demokrasi elektoral meningkat selama periode 1975–2016. Pada tahun 1975, pemilu kompetitif yang menjadi penentu kekuasaan pemerintahan ada di sedikitnya

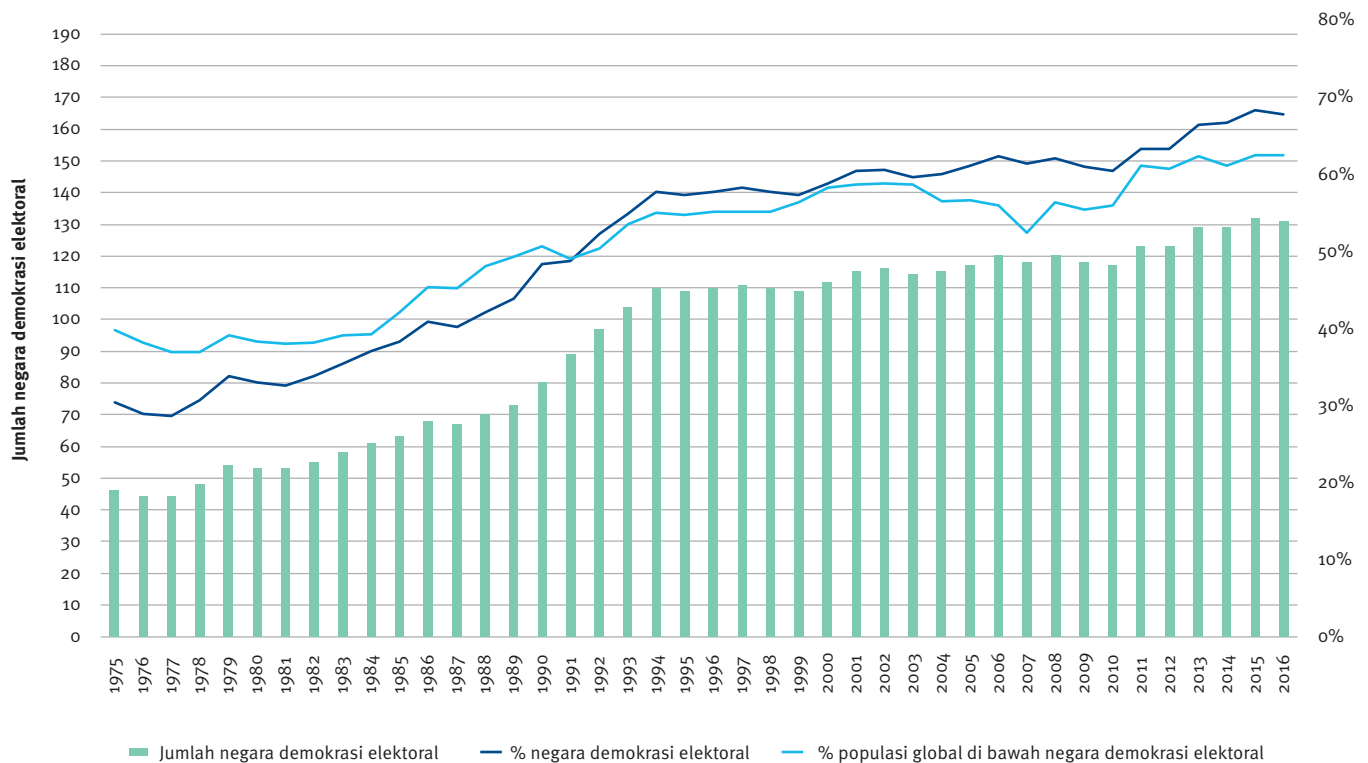
46 negara (30 persen), kemudian pada tahun 2016, jumlah ini tumbuh menjadi 132 negara (68 persen).

Satu per tiga dari seluruh negara masih berada di bawah penguasaan otokratik, termasuk kekuatan penting regional dengan penduduk besar seperti Cina, Mesir, Rusia dan Arab Saudi. Tambahan pula, sudah terjadi 24 pembalikan demokrasi sejak 2005 di negara-negara seperti Mali, Niger dan Thailand. Hal ini secara kuat mengindikasikan bahwa beberapa negara demokrasi baru tersebut ternyata tidak tangguh. Walaupun juga penting untuk diingat bahwa mayoritas dari negara-negara demokrasi elektoral yang terbentuk setelah 1975 masih tetap eksis. Selain itu, hampir tidak ada pembalikan demokrasi di negara-negara demokrasi elektoral yang telah lama berdiri.

Pada saat sejumlah negara baru-baru ini menjadi negara demokrasi elektoral untuk pertama kalinya, sebagian besar transisi demokrasi yang berlangsung belakangan ini terjadi di negara yang sebelumnya sudah punya pengalaman menjadi negara demokratis. Berdasarkan perkembangan ini, menjadi penting mempertimbangkan bahwa demokratisasi selalu melibatkan perpaduan antara pencapaian dan kegagalan (Møller dan Skaaning 2013: Bab 5).

GAMBAR 1.1

Jumlah global dan persentase negara demokrasi elektoral dan proporsi populasi dunia yang tinggal di negara demokrasi elektoral, 1975–2016



Catatan: Gambar menunjukkan jumlah dan proporsi negara yang dianggap sebagai negara demokrasi elektoral dalam periode 1975–2016. Persentase negara demokrasi elektoral dipengaruhi oleh fakta bahwa lebih banyak negara merdeka muncul selama periode ini. Gambar untuk ukuran penduduk digunakan untuk menghitung bagian dari populasi global yang hidup di negara-negara demokrasi elektoral diambil dari Indikator Pembangunan Dunia dan Gapminder.

Sumber: Skaaning, S.-E., Gerring, J. dan Bartusevicius, H., 'A lexical index of electoral democracy (Competitive Elections Indicator)' [Sebuah indeks leksikal demokrasi elektoral (Indikator Pemilu Kompetitif)], *Comparative Political Studies*, 48/12 (2015), hal. 1491–1525.

Gambar 1.1 didasarkan atas indikator pemilu kompetitif yang telah diperbaharui dari Indeks Demokrasi Elektoral. Indikator ini merupakan suatu upaya mengoperasionalkan definisi terkemuka dari Schumpeter mengenai demokrasi sebagai “pengaturan kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya individu-individu mendapatkan kekuasaan membuat keputusan dengan cara perjuangan kompetitif merebut suara rakyat” (1974: 269). Pengukuran indikator ini merekam apakah rezim elektoral itu ada pada jalurnya (pemilu diselenggarakan secara teratur dan tidak diganggu, misalnya, oleh kudeta) dan apakah pemilu multipartai berlangsung cukup bebas guna memungkinkan oposisi merebut kekuasaan dari pemerintah, sebagaimana dinilai oleh sumber-sumber spesifik negara seperti laporan pemilu dan penelitian dari para ahli yang diakui.

Pengamatan lebih mendalam pada 10 tahun terakhir mengungkapkan bahwa hanya ada sedikit pendukung pandangan bahwa ada penurunan substansial demokrasi skala global, dengan berdasar pada pemahaman sempit dari sistem pemerintahan ini. Sebaliknya, jumlah negara demokrasi elektoral bertambah. Pertanyaannya adalah apakah argumentasi ini masih tetap bertahan apabila menerapkan perspektif yang luas dan berkelanjutan pada kondisi demokrasi global.

Ketika menggunakan definisi demokrasi yang komprehensif dari International IDEA, data indeks GSoD menunjukkan bahwa kemajuan global substansial terjadi di empat (Pemerintahan Perwakilan, Hak-hak Asasi Manusia, Pengawasan Pemerintahan dan Keterlibatan Partisipatif) dari lima dimensi pada 1975–2015, sedangkan dari dimensi Administrasi yang Imparsial hanya sedikit berubah dalam kurun waktu itu.

Pemerintahan Perwakilan

Tren positif dalam dimensi Pemerintahan Perwakilan ditemukan di semua subdimensi (Pemilu yang Bersih, Hak Pilih Inklusif, Partai Politik yang Bebas, dan Pemerintahan yang Dipilih) dan di semua wilayah. Sejak 1975, pemilu telah menjadi lebih umum juga lebih bersih (misalnya berkurangnya kecurangan, manipulasi dan ketidakteraturan), dan partai politik menghadapi lebih sedikit hambatan untuk berorganisasi dan ikut serta dalam pemilu. Akan tetapi, perbedaan mencolok antar wilayah tetap ada. Rata-rata, Amerika Utara, Eropa, serta Amerika Latin memiliki pemerintahan yang lebih representatif daripada negara-negara di Afrika, Asia dan Pasifik, serta Timur Tengah dan Iran. Di banyak negara, kombinasi lembaga demokratis formal dengan kekurangan substansial dalam praktik demokratis menjadi ciri pemerintahan politik. Banyak negara masih bisa memperbaiki kualitas pemilu dan perlakuan terhadap partai oposisi.

Negara-negara di Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Latin serta Karibia umumnya memenuhi kriteria pemerintahan perwakilan dalam derajat yang lebih tinggi ketimbang negara lain di Timur Tengah, Afrika dan Asia serta Pasifik. Tatkala sejumlah negara di Timur Tengah berbentuk monarki tanpa pemilu multipartai, Afrika dan Asia serta Pasifik memiliki banyak rezim hibrida. Dalam rezim seperti ini, kriteria formal untuk pemerintahan perwakilan dipenuhi dalam bentuk pemilu multipartai, tetapi terdapat persoalan substansial berkenaan dengan integritas pemilu, kondisi kerja media dan partai oposisi, atau pengawasan pemerintahan. (lihat misalnya Cheeseman 2015; Norris 2015).

Beberapa negara di Amerika Latin dan Karibia, seperti Venezuela menghadapi masalah yang sama. Meskipun demikian, wilayah ini mengalami perubahan positif terbesar sejak 1975. Hak pilih universal menjadi norma resmi di semua negara di wilayah ini, dan hampir semuanya mempunyai pemilu multipartai, dengan Kuba yang konsisten menjadi pengecualian. Malpraktik elektoral telah menurun, dan kebebasan partai politik juga meningkat. Akan tetapi, kemajuan-kemajuan itu terhenti pada pertengahan 1990-an, serta terdapat jarak yang mencolok di antara rata-rata wilayah dengan negara-negara berkinerja terbaik di wilayah ini, seperti Chile dan Uruguay.

Negara-negara yang menunjukkan penurunan terbesar dalam pemerintahan perwakilan sejak 2005 adalah Bangladesh, Burundi, Suriah, Thailand dan Turki.

Sementara itu, Angola, Republik Demokratik Kongo (RDK), Guinea, Haiti, Kyrgyzstan, Myanmar, Nepal, Nigeria, Sudan dan Tunisia telah mengalami kemajuan yang paling substansial. Akan tetapi, tidak ada satu pun dari negara dengan peningkatan capaian substansial sejak 2005 itu yang mampu mendekati capaian negara dengan tingkat kinerja terbaik, seperti Perancis dan Uruguay. Yang mengesankan, Myanmar baru-baru ini mengalami liberalisasi yang signifikan dan keterbukaan demokratis, tetapi masih ada masalah dengan pendaftaran pemilih dan kekerasan. Di Angola, di mana kualitas pemilu bahkan lebih rendah, capaian kemajuan signifikan negara ini sepatutnya ditafsirkan dalam konteks awal perang saudara pada 1992 dan pemilu yang ditunda hingga 2008.

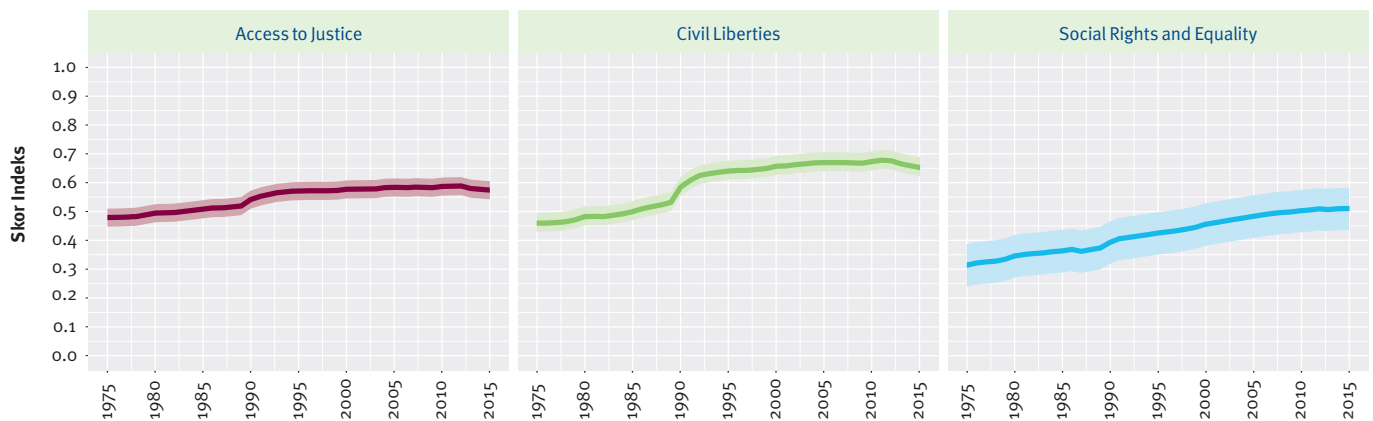
Hak-hak Asasi Manusia

Dimensi Hak-hak Asasi Manusia telah menorehkan kemajuan skala global sejak 1975 di seluruh subdimensinya (Akses ke Keadilan, Kebebasan Sipil, serta Hak-hak Sosial dan Kesetaraan; lihat Gambar 1.2). Perkembangan dalam hak-hak sosial dan kesetaraan mengikuti tren yang positif dan linear, sedangkan tren untuk akses ke keadilan dan kebebasan sipil telah beralih dari perbaikan gradual ke kemajuan signifikan sekitar tahun 1990, kemudian kembali ke periode perbaikan gradual lagi, hingga setelahnya menjadi relatif stabil setelah tahun 2005. Akan tetapi, para pembuat kebijakan juga perlu memahami bahwa terjadi penurunan global aspek kebebasan sipil antara 2010 dan 2015.

Dalam jangka panjang, capaian Amerika Utara dan Eropa lebih baik daripada Afrika dan Amerika Latin serta Karibia, sedangkan Timur Tengah dan Iran menunjukkan capaian yang paling rendah dalam dimensi ini. Akan tetapi, sebagian besar wilayah telah menunjukkan tren positif sejak 1975, dengan Amerika Latin dan Karibia menjadi negara yang mencapai perubahan positif terbesar. Pertumbuhan ekonomi dan kebijakan redistribusi kemakmuran di beberapa negara Amerika Latin dan Karibia, secara positif sudah mempengaruhi pemenuhan hak-hak sosial dan kesetaraan (Osueke dan Tsounta 2014). Berakhirnya perang saudara di Amerika Tengah (di El Salvador, Guatemala dan Nikaragua) dan wilayah Andes (di Kolombia dan Peru) juga memberi dampak positif terhadap akses ke keadilan dan kebebasan sipil. Sayangnya, jenis kekerasan lainnya yang berkaitan dengan perdagangan narkoba dan kejahatan perkotaan sering terjadi di wilayah ini (UN 2014).

Beberapa negara telah mencatat kemunduran substansial dalam dimensi hak-hak asasi manusia sejak 2005, termasuk

GAMBAR 1.2

Akses ke Keadilan, Kebebasan Sipil, serta Hak-hak Sosial dan Kesenjaraan: tren global, 1975-2015

Catatan: Pita dengan bayangan muda di sekeliling garis membatasi 68 persen batas kepercayaan dari perkiraan.

Sumber: Indeks GSoD 2017 (Indeks Akses ke Keadilan, Indeks Kebebasan Sipil, serta Indeks Hak-hak Sosial dan Kesenjaraan).

Burundi, Mauritania, Thailand, Turki, Ukraina dan Yaman. Negara-negara ini mengalami pergolakan politik yang sengit dalam bentuk upaya kudeta, penekanan terhadap anggota oposisi serta perang saudara. Di antara kasus tersebut, ialah Libya, Myanmar, Nepal, Sri Lanka dan Tunisia. Akan tetapi, sekalipun jatuhnya rezim Muammar Gaddafi pada 2010 mengarah pada perbaikan terhadap penghormatan kebebasan sipil, perang saudara di Libya saat ini menarik negara itu ke arah yang berlawanan (HRW 2017). Telah menjadi semakin lazim bagi pemerintah untuk menggunakan represi yang selektif, terarah, kurang menggunakan kekerasan fisik, dan komprehensif (Bermeo 2016; Schedler 2013). Hal ini termasuk perundang-undangan yang diberlakukan secara sah, tidak berbahaya dan demi mencapai kepentingan kebaikan bersama, tetapi digunakan secara bertahap untuk membungkam suara-suara kritis serta melemahkan oposisi, sebagaimana yang telah terjadi di Rusia, Turki, dan Vietnam, misalnya (Treisman 2017). Beberapa negara seperti Kuba, Republik Rakyat Demokratik Korea, Eritrea, Arab Saudi, Sudan dan Turkmenistan, terlibat dalam pelanggaran berat terhadap hampir semua hak-hak demokrasi.

Di belahan dunia lainnya, permasalahan hak-hak asasi manusia berhubungan dengan ketidaksetaraan sosial dan kurangnya sumber daya. Di banyak negara berkembang, sebagian besar penduduk kekurangan akses ke pendidikan dasar, pemeliharaan kesehatan, dan jaminan sosial. Berbagai bentuk diskriminasi dan perbedaan dalam pendistribusian

ekonomi dan jenis-jenis sumber daya lainnya dikaitkan dengan “kewarganegaraan intensitas rendah” (di mana suatu negara tidak dapat menegakkan hukum dan kebijakannya di antara kelompok sosial tertentu, yang dibedakan dengan identitas, kelas atau gender).

Sejak 1975, kesetaraan gender telah secara bertahap meningkat di seluruh region, tetapi dengan kecepatan yang berbeda dan dimulai dari tingkat yang berbeda-beda. Amerika Utara dan Eropa mencatat tren positif, sekalipun hambatan terhadap kesetaraan gender masih ada, khususnya yang berhubungan dengan upah yang setara serta representasi dalam posisi kepemimpinan baik di sektor swasta maupun publik. Indeks GSoD menunjukkan bahwa kesenjangan derajat kesetaraan gender paling mencolok ada di Timur Tengah dan Iran, sedangkan kesetaraan gender di dua wilayah lainnya yang menunjukkan kesenjangan juga memiliki ruang untuk perbaikan: Afrika serta Asia dan Pasifik.

Dua indikator yang digunakan untuk mengkonstruksi indeks kesetaraan gender GSoD memotret keterwakilan perempuan di parlemen dan kabinet. Rata-rata global perwakilan perempuan di parlemen telah meningkat dari sekitar 7 persen di tahun 1975 menjadi 15 persen pada 2015, sedangkan porsi perempuan dalam kabinet meningkat dari 5 persen di akhir 1980-an hingga mencapai 14 persen di tahun 2015. Oleh karena itu, dalam pengertian relatif sudah terjadi perkembangan kesetaraan gender, tetapi dalam

pengertian absolut, perempuan masih jauh dari menikmati keterwakilan yang setara di parlemen dan kabinet.

Pengawasan Pemerintahan

Dimensi Pengawasan Pemerintahan meliputi tiga subdimensinya (Parlemen yang Efektif, Kemandirian Yudisial, dan Integritas Media), telah menunjukkan perbaikan substansial sejak 1975. Akan tetapi, kemajuan tampaknya berhenti karena sebagian besar negara sudah mencapai tingkatan pengawasan pemerintahan yang sama pada tahun 2005 dan 2015. Terdapat perbedaan penting dalam sejauh mana pengawasan seperti itu dilaksanakan di berbagai wilayah, dengan sebagian besar mengikuti pola-pola yang mirip dengan dimensi pemerintahan perwakilan.

Upaya halus untuk mengikis demokrasi melalui pembatasan kekuasaan dan otonomi pengadilan, media dan parlemen tersebar luas di seluruh wilayah. Efisiensi dan kepentingan nasional, juga ancaman yang dirasakan sering digunakan sebagai alasan untuk meningkatkan kekuasaan eksekutif dengan mengorbankan parlemen. Cara yang seringkali digunakan untuk memusatkan kekuasaan dan membungkam kritik meliputi penyalahgunaan undang-undang pencemaran nama baik dan undang-undang pajak, pembatasan yang berlebihan pada akses publik atas dokumen administratif dan politik, serta pengangkatan hakim, anggota dewan media dan pejabat publik yang bias (Huq dan Ginsburg 2017; Ottaway 2003).

Di Afrika, integritas media telah mengalami perubahan positif yang terbesar, diikuti dengan parlemen yang lebih efektif. Data menunjukkan bahwa tingkat kemandirian yudisial hampir tidak berubah. Akan tetapi, sekalipun saat ini parlemen dan khususnya media bisa lebih mengawasi pemerintahan di Afrika dibandingkan masa lalu, tetapi rata-rata kinerja pada aspek ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara demokrasi yang lebih maju di Kanada, Denmark dan Inggris.

Untuk menggambarkan perbedaan wilayah, pengawasan pemerintahan sekarang ini lebih kuat di Swedia daripada di Rusia, di Kosta Rika daripada di Venezuela, di Ghana daripada di Ethiopia, dan di Jepang daripada di Cina. Burundi, Ekuador, Makedonia, Nikaragua, Thailand dan Turki telah mengalami kemunduran signifikan dalam dimensi ini sejak 2005, sedangkan Kyrgyzstan, Libia, Myanmar, Nepal, Togo dan Tunisia menunjukkan kemajuan.

Administrasi yang Imparsial

Rata-rata global pada dimensi Administrasi yang Imparsial (meliputi Ketiadaan Korupsi dan Penegakan Hukum yang Dapat Diperkirakan) menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan antara tahun 1975 dan 2015. Dengan kata lain, korupsi dan penegakan hukum yang diperkirakan merupakan problem besar saat ini sama seperti ketika pada tahun 1975. Hal ini menunjukkan bahwa akses ke kekuasaan politik dan penghormatan terhadap jenis kebebasan yang berbeda-beda lebih mudah diubah secara formal tergantung pada desain sistem konstitusional, setidaknya untuk jangka pendek, daripada menerapkan supremasi hukum dalam administrasi publik (lihat Mazzuca 2010; Møller dan Skaaning 2013). Hal ini sebagian bisa menerangkan ketidakpuasan terhadap demokrasi yang bisa diamati di banyak negara demokrasi elektoral yang muncul setelah 1975.

Sejak tahun 1975, hanya Amerika Latin dan Karibia yang mengalami perbaikan signifikan dalam administrasi yang imparsial hingga tahun 1990-an ketika negara-negara beralih dari rezim otoriter. Eropa bahkan mengalami penurunan dalam dimensi itu, setelah jatuhnya rezim komunis. Temuan ini dikaitkan dengan nepotisme dan meningkatnya korupsi selama transisi dari ekonomi terencana ke ekonomi pasar. (Holmes 2006). Penelitian-penelitian (misalnya Holmberg, Rothstein dan Nasiritousi 2009) telah menunjukkan bahwa ada variasi global yang besar dalam imparsialitas administrasi publik, serta lembaga-lembaga yang tidak efektif dan korup cenderung bertahan.

Tanjung Gading, Gabon, Guinea, Latvia, Krgyzstan, Nigeria, Sri Lanka dan Tunisia telah mengalami kemajuan substansial dalam memerangi korupsi dan memastikan penegakan hukum yang lebih transparan dan bisa diperkirakan sejak 2005. Di Guinea, pemerintahan Condé (2010–sekarang) telah melakukan upaya-upaya serius untuk melawan kesalahan manajemen puluhan tahun, sedangkan Latvia mengambil manfaat dari reformasi anti-korupsi saat ini (OECD 2015a). Beberapa negara, seperti Hungaria, Madagaskar, Mauritania, Suriah, Turki dan Venezuela, mengalami penurunan substansial. Kasus-kasus negatif seringkali dipengaruhi oleh konflik kekerasan atau pemerintah berusaha memusatkan kekuasaan secara tidak demokratis.

Keterlibatan Partisipatif

Peluang-peluang (dan realisasi) Keterlibatan Partisipatif pada umumnya mendapatkan titik pijak, sebagaimana

tercermin di seluruh dari empat subdimensi keterlibatan warga negara (Partisipasi Masyarakat Sipil, Partisipasi Elektoral, Demokrasi Langsung, dan Pemilu Subnasional). Peningkatan global dalam kemampuan aktor-aktor masyarakat sipil untuk berpartisipasi mencerminkan kenyataan bahwa pembatasan-pembatasan terhadap hak-hak masyarakat sipil untuk berorganisasi telah dihilangkan. Kelompok-kelompok otonomi sekarang pada umumnya telah memiliki kondisi kerja yang lebih baik daripada sebelumnya, meskipun beberapa negara masih menerapkan (atau bahkan menambah) pembatasan terhadap organisasi masyarakat sipil. Peningkatan global dalam partisipasi elektoral dalam pemilu nasional terutama mencerminkan penggantian dari rezim non-elektoral menjadi rezim elektoral. Pada saat bersamaan, penurunan tingkat partisipasi pemilih telah terjadi di beberapa negara yang memiliki tradisi panjang pemilu yang teratur dan kompetitif. Terjadi sedikit peningkatan dalam ketersediaan dan penggunaan mekanisme demokrasi langsung. Akan tetapi, hal ini tidak

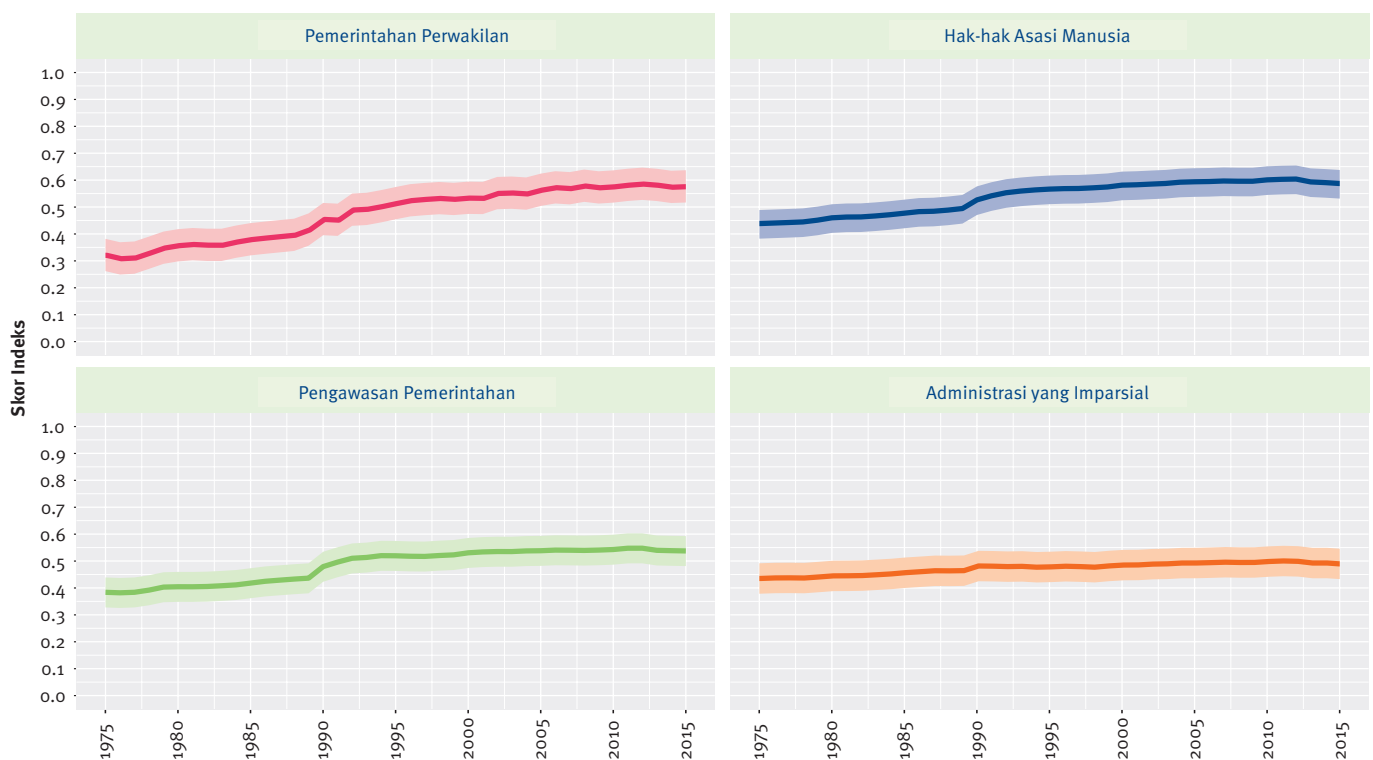
diterapkan sepenuhnya di setiap wilayah. Peluang-peluang untuk berpartisipasi dalam pemilu subnasional yang bebas dan adil secara substansial membaik, tapi dengan derajat yang bervariasi antarwilayah.

Dalam negara otokrasi yang terpusat, non-elektoral atau menerapkan sistem satu partai, warga negara umumnya menghadapi lebih banyak hambatan dan punya lebih sedikit peluang untuk berpartisipasi dibandingkan jika mereka berada dalam rezim multipartai yang lebih terbuka, rezim yang sudah menjadi norma di sebagian besar belahan dunia. Kendati begitu, beberapa negara, seperti Aljazair, Azerbaijan, Bangladesh, Mesir, Hungaria, Kazakhstan, Rusia dan Turki, selama 10 tahun terakhir mengalami “penyusutan ruang masyarakat sipil” (CIVICUS 2016).

Tren dalam dimensi keterlibatan masyarakat sipil sejak 1975 menunjukkan bahwa seluruh wilayah mengalami pembenahan bergelombang: pertama Amerika Latin

GAMBAR 1.3

Pemerintahan Perwakilan, Hak-hak Asasi Manusia, Pengawasan Pemerintahan dan Administrasi yang Imparsial: tren global, 1975–2015



Catatan: Pita dengan bayangan muda di sekeliling garis membatasi 68 persen batas kepercayaan dari perkiraan.

Sumber: Indeks GSoD 2017 (Indeks Pemerintahan Perwakilan; Indeks Hak-hak Asasi Manusia, Indeks Pengawasan Pemerintahan dan Indeks Administrasi yang Imparsial).

dan Karibia, kemudian Asia dan Pasifik, lalu diikuti oleh Eropa dan Afrika setelah berakhirnya Perang Dingin. Di saat partisipasi masyarakat sipil yang lebih tradisional dan terlembaga terus memainkan peranan penting, warga negara di seluruh dunia juga menggunakan bentuk lain keterlibatan partisipatif – seringkali bersifat longgar didasarkan pada jaringan informal dan gerakan penolakan sipil – yang difasilitasi oleh platform media sosial yang baru (Shirky 2011).

Sejak tahun 2005, partisipasi masyarakat sipil meningkat secara signifikan di beberapa negara di Afrika dan Asia serta Pasifik, termasuk Pantai Gading, Liberia, Myanmar, Nepal dan Tunisia. Negara-negara lainnya, seperti Albania, Azerbaijan, Serbia, Turki dan Thailand, mengalami hal sebaliknya.

Sejak 1975, partisipasi elektoral dalam pemilu nasional telah mengikuti pola-pola yang sama di Afrika, Asia dan Pasifik serta Amerika Latin dan Karibia; peningkatan terutama terjadi sebagai dampak dari penggantian rezim non-elektoral menjadi rezim elektoral. Karena tidak semua rejim elektoral tergolong negara demokrasi elektoral, maka perubahan dalam partisipasi pemilih tidak selalu bisa dimaknai sebagai kemajuan atau kemunduran demokrasi. Di Eropa, angka partisipasi pemilih dalam pemilu nasional menurun. Tren tersebut sebagian didorong oleh negara-negara demokrasi maju, termasuk Perancis, Swiss, dan Inggris, di mana partisipasi elektoral dalam pemilu nasional sudah menurun selama 40 tahun terakhir. Negara-negara demokrasi elektoral gelombang ketiga di Eropa Timur dan Eropa Tengah bahkan sudah mengalami penurunan partisipasi yang lebih cepat. Namun, partisipasi elektoral tetap pada tingkat tinggi di negara-negara Skandinavia.

Tren negatif yang paling terlihat ialah penurunan yang relatif besar dalam partisipasi pemilih sejak 2005 di negara-negara seperti Bangladesh, Siprus, Yunani, Guinea dan AS. Akan tetapi penurunan ini diimbangi dengan kenaikan besar partisipasi pemilih di negara lainnya seperti di Angola, Myanmar dan Nepal yang seringkali dihubungkan dengan pengenalan atau pengenalan kembali pemilu.

Sejak 1975, ketersediaan (dan penggunaan) mekanisme demokrasi langsung seperti referendum dan plebisit sedikit meningkat di semua wilayah. Namun, hal ini dimulai dari tingkat yang sangat rendah, dan masih bukan merupakan fitur demokrasi yang penting di tiap wilayah. Asia mewakili rata-rata regional terendah dan Eropa tertinggi (lihat Altman 2016). Beberapa negara menjadi pengecualian; Lithuania, Selandia Baru, Rumania, Slovenia, Swiss, Uruguay dan Venezuela, di mana penyediaan dan penggunaan mekanisme seperti ini relatif sering, sehingga mereka berada dalam derajat agak tinggi.

Peluang bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu subnasional yang bebas dan adil telah meningkat secara substansial di Eropa dan Amerika Selatan serta Karibia. Perkembangan lebih lambat dan kurang substansial terjadi di Asia dan Pasifik, juga di Afrika dan Timur Tengah serta Iran. Akan tetapi, ada beberapa pengecualian di mana pemilu subnasional tidak diselenggarakan, atau secara substansial kurang bebas dan adil dibandingkan pemilu nasional, seperti di Argentina, Brasil, India, Meksiko dan Afrika Selatan (lihat misalnya Behrend dan Whitehead 2016). Alasan pengecualian ini meliputi tantangan geografis dalam penyelenggaraan pemilu subnasional, derajat keragaman etnis dari penduduk negara, dan variasi dalam otonomi subnasional di antara negara-negara federal.

Lebih dari 40 tahun terakhir ini, sebagian besar aspek demokrasi telah maju, dan demokrasi saat ini sebenarnya lebih sehat ketimbang apa yang diperbincangkan banyak orang. Tren positif dalam dimensi demokrasi yang luas dari International IDEA ditemukan di seluruh wilayah utama dunia, dan lebih dari 10 tahun terakhir, demokrasi sudah bisa dikatakan cukup tangguh. Untuk beberapa aspek demokrasi, lebih banyak pencapaian daripada kemunduran yang dicapai di tingkatan negara. Untuk selebihnya, contoh-contoh kemunduran demokrasi sebagian besar juga telah diimbangi dengan kasus-kasus perbaikan.

Temuan-temuan ini menantang pandangan pesimis bahwa demokrasi sangat rapuh dan pada umumnya sedang menurun. Akan tetapi, keseluruhan perkembangan positif sudah melambat untuk banyak aspek demokrasi sejak pertengahan tahun 1990-an. Hal ini menunjukkan bahwa *Global State of Democracy* (Keadaan Demokrasi Global) saat ini merupakan salah satu fluktuasi yang tanpa tren – kemajuan dan kemunduran di masing-masing negara, tetapi ada kecenderungan meluas terjadi penurunan atau kemajuan demokrasi. Fluktuasi yang tanpa tren juga mewakili sebuah kecenderungan: kesinambungan demokrasi pada tingkat tertinggi dalam sejarah dunia. Mempertimbangkan tantangan saat ini terhadap demokrasi, kesinambungan ini menunjukkan bahwa di dalam persaingan yang paling mendasar antara demokrasi dan kediktatoran, yang pertama disebut cenderung lebih unggul. Akan tetapi, sebagaimana diindikasikan oleh tantangan demokrasi saat ini, sistem pemerintahan ini sebaiknya tidak diterima begitu saja. Warga negara biasa, organisasi masyarakat sipil dan elite politik perlu melanjutkan tugas mereka untuk mengadvokasi, menjaga dan memajukan demokrasi.

Bab 2. Ketahanan Demokrasi di Dunia yang Berubah

Di samping nilai intrinsiknya, demokrasi memiliki faedah instrumental konstan bagi pembangunan dan perdamaian (Sen 1999a, 1999b). Demokrasi memberikan kesetaraan suara warga, dan karenanya memajukan ekspresi kepentingan dan preferensi serta aliran informasi yang bebas, di mana keduanya merupakan unsur penting pembangunan. Keberlangsungan kontrak sosial dalam negara dijamin melalui inklusi; partisipasi dalam pemerintahan ditopang oleh perlindungan hak-hak asasi manusia. Praktik kebijakan dalam organisasi internasional telah berkembang untuk mengakui bahwa berbagai tujuan seperti pembangunan dan pertumbuhan, pencegahan konflik, dan perluasan partisipasi, martabat, kesetaraan dan keberlanjutan harus dikejar secara bersamaan. Pemerintahan demokratik menyediakan kerangka kerja normatif yang melaluinya kebijakan-kebijakan untuk mengatasi permasalahan “dibentuk dan dilaksanakan” (Asher *et al.* 2016: 80).

Demokrasi menawarkan kondisi bagi pengelolaan konflik tanpa kekerasan yang dapat merekonsiliasi perpecahan dan perselisihan di dalam masyarakat serta membentuk dasar bagi perdamaian berkelanjutan. Tatkala pemerintahan otoriter mungkin bisa ‘bertahan’ dan menjamin stabilitas jangka panjang, tetapi hal itu dicapai dengan mengorbankan hak asasi manusia. Selama bertahun-tahun, para akademisi berpendapat bahwa demokrasi pada umumnya berkontribusi pada perdamaian internasional – “teori perdamaian demokratis” meyakini bahwa negara demokrasi jarang, walaupun pernah, berperang dengan negara demokrasi lainnya – dan dapat memungkinkan suatu “perdamaian demokratis” dalam negeri: negara demokrasi cenderung kurang mengalami perang saudara (Gleditsch dan Hegre 1997; Russett dan Oneal 2001).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goal*) 16 (SDG16) PBB dibangun berdasarkan premis “tata kelola pemerintahan berpengaruh”: ia menyatakan bahwa masyarakat yang damai dan inklusif sangat penting untuk mencapai seluruh tujuan pembangunan lainnya. Promosi SDG16 mengenai “masyarakat yang damai dan inklusif” dan “lembaga-lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif” mencerminkan pengertian yang diterima bersama bahwa “demokrasi, perdamaian dan hasil-hasil pembangunan secara inheren terjalin, dan bahwa ‘kerapuhan’ dalam masyarakat berawal dari ketiadaan pemerintahan yang inklusif”. Demokrasi dipandang sebagai suatu sarana yang institusional

dan langgeng untuk menyelesaikan dan mencegah konflik sosial, dengan begitu pemerintahan demokratis berkontribusi pada perdamaian, yang pada gilirannya memfasilitasi pembangunan (Brown 2003).

Sebagaimana disebutkan di atas, ketahanan didefinisikan sebagai kemampuan suatu sistem sosial untuk mengatasi, bertahan hidup dan pulih dari tantangan dan krisis yang kompleks. Sistem sosial yang tangguh bersifat fleksibel (dapat menyerap ketegangan atau tekanan), dapat mengatasi tantangan atau krisis, dapat beradaptasi (dapat berubah dalam menanggapi tekanan terhadap sistem) dan inovatif (dapat berubah dengan cara yang lebih efisien dan efektif untuk mengatasi tantangan atau krisis).

Apa yang membuat demokrasi bertahan?

Warga negara yang tangguh: menghadapi masalah dan ancaman perwakilan

Keterlibatan warga negara dan keberadaan masyarakat sipil yang kuat sangat penting bagi ketahanan demokrasi. Di banyak tempat, perlawanan rakyat sipil, yang berkolaborasi dengan masyarakat sipil dan media, “melindungi” demokrasi melalui investigasi, transparansi informasi dan advokasi (Fox dan Halloran 2016). Dalam kasus warga negara dan masyarakat sipil aktif dan dapat berorganisasi—serta menjembatani perbedaan besar dalam masyarakat, termasuk perbedaan agama atau etnis—kekerasan sosial

Demokrasi di bawah tekanan: Respons ketahanan



yang melemahkan demokrasi cenderung tidak meletus. Masyarakat sipil yang kuat membantu menciptakan kepercayaan mendasar dan ikatan sosial yang, pada gilirannya, memperkuat kontestasi dan pertarungan yang memungkinkan demokrasi tetap kuat menghadapi tekanan (Cheema dan Popovski 2010).

Jika warga negara sangat berkomitmen terhadap demokrasi, maka demokrasi akan bertahan sebagai gagasan ideal yang permanen dan esensial (Norris 2011). Peningkatan ketahanan demokrasi diawali dengan pembentukan atau pemulihan kepercayaan warga negara terhadap kemampuan politik demokrasi lalu bergerak mempertahankannya, termasuk melawan nasionalisme otoriter.

Hak-hak warga negara untuk memobilisasi, memprotes, berkumpul dan berserikat, membuat blog dan melawan perlu dilindungi, termasuk oleh otoritas kehakiman yang dituntut untuk memastikan bahwa hak-hak yang diatur dalam konstitusi, piagam dan manifesto benar-benar ditegakkan dalam praktik. Hak-hak dimenangkan ketika warga negara dapat menuntut dan melindunginya: mereka pertama-tama harus mengetahui haknya sebelum dapat

bertindak atas nama hak tersebut; informasi yang terbuka, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul dan kemampuan berorganisasi secara damai harus dilindungi. Upaya negara untuk membatasi hak-hak atau mencegah pelaksanaan kebebasan berserikat harus diawasi oleh masyarakat sipil dan dilaporkan ke tingkat internasional.

Penyegaran masyarakat sipil tetap penting untuk ketahanan demokrasi jangka panjang. Mencegah kemunduran demokrasi memerlukan masyarakat sipil yang tangguh, kelembagaan yang berfungsi, determinasi, dan kadang-kadang keberanian bertindak. Demokrasi yang tangguh memerlukan komitmen warga negara untuk menyeimbangkan lembaga-lembaga yang tampak kuat. Menjaga demokrasi memerlukan penguatan kembali partisipasi masyarakat sipil, sehingga warga negara yang bertindak bersama dengan penguasa bisa memastikan pengendalian rakyat atas pemerintahan.

Melindungi hak-hak minoritas dan memajukan posisi kelompok-kelompok marginal penting bagi keberhasilan demokrasi dalam jangka panjang. Hak-hak minoritas dilindungi oleh norma-norma global dan instrumen hak-hak

asasi manusia. Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization*), misalnya, memiliki norma-norma dan praktik-praktik terbaik terkait sumber daya dan hak-hak masyarakat adat, yang seharusnya ditegaskan kembali. Di tengah meningkatnya retorika nasionalis yang kasar, mekanisme pemantauan dan perlindungan hak-hak minoritas menjadi sangat diperlukan.

Lembaga-lembaga yang tangguh

Peluasan institusionalisasi, dan pelaziman perimbangan kekuasaan (*checks and balances*) yang berlapis, mengurangi kemungkinan bahwa setiap cabang pemerintah atau aktor bisa sepenuhnya membajak demokrasi. Lembaga-lembaga yang otonom, berwenang, mandiri seperti parlemen, lembaga kehakiman dan penuntut bisa menyediakan sistem perimbangan kekuasaan untuk mencegah pembajakan (kebijakan) dan untuk menginvestigasi, menuntut, dan menghukum elite politik yang korup dan “pemburu rente” yang seringkali bekerja dengan korporasi atau elite ekonomi yang tidak etis.

Prinsip negara hukum, akses ke keadilan dan sistem yudisial yang kuat, mandiri, berwenang dan efisien adalah elemen penting demokrasi yang tangguh. Salah satu faktor penting adalah kontrol demokratis terhadap angkatan bersenjata dan sektor keamanan, dan profesionalisasi institusi tersebut di bawah kendali otoritas sipil yang dipilih secara demokratis.

Proses elektoral bisa membantu mengadaptasi dan memperkuat demokrasi dari waktu ke waktu. Badan penyelenggara pemilu yang mandiri, otonom, dan profesional amat penting, karena mandat mereka adalah untuk melindungi kredibilitas prosedural berbagai proses demokratis.

Negara demokrasi yang tangguh mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan sosial yang bisa memunculkan frustrasi, kekerasan, dan mobilisasi etnis. Untuk mengurangi kesenjangan, di tingkat daerah diperlukan pembaruan fokus penyediaan layanan penting seperti air bersih dan sanitasi, perawatan kesehatan, pendidikan dan akses ke keadilan. Harus ada insentif elektoral dan politik yang jelas, dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah memberikan layanan penting tersebut untuk mengurangi risiko struktural demokrasi akibat kesenjangan.

Memerangi pengaruh uang dalam politik memerlukan pendekatan holistik dan berorientasi integritas, yang bisa mengganti budaya politik memperkaya diri sendiri dan memburu rente menjadi pelayanan dan kepercayaan publik;

pendekatan-pendekatan holistik dan jaringan diperlukan untuk mengubah kultur dan memperkuat otonomi lembaga perimbangan kekuasaan. Pendekatan dan jaringan seperti ini seharusnya bekerja secara domestik dan global melalui pembagian informasi regional untuk memahami, berbagi, mengungkap, dan melawan jaringan yang melawan hukum, keterlibatan erat antara aktor-aktor negara dan organisasi berbasis komunitas, serta evaluasi berbasis pasar atas kondisi lokal yang digunakan jejaring ilegal untuk menyusupi pemerintah.

Mendesain Ketahanan

Para pakar kelembagaan berpendapat bahwa sangat mungkin untuk mendesain seperangkat peraturan—atau lembaga—guna merekayasa hasil-hasil yang diinginkan dalam negara demokrasi seperti inklusivitas, perwakilan yang bermakna atau akuntabilitas. Pendekatan “rekayasa konstitusi” mengasumsikan bahwa pertimbangan seperti desain sistem presidensial, desain sistem pemilu, atau penetapan daerah pemilihan internal dan pemerintahan terdesentralisasi (seperti dalam sistem federal) dapat mendorong tercapainya hasil yang diinginkan dalam sistem demokratis (stabilitas, inklusi atau politik etnik).

Mungkin penerapan yang paling luas dari perspektif ini bisa ditemukan dalam kepustakaan desain sistem pemilu, yang berpendapat bahwa sistem pemilu suatu negara harus dipilih berdasarkan pertimbangan atas tujuan yang ingin diraih seperti akuntabilitas, inklusivitas, dan kesetaraan gender (Norris 2004). Ada perdebatan yang luas dalam kepustakaan ilmiah mengenai tipe lembaga apa yang mengarah ke negara demokrasi yang tangguh.

Penguatan terus menerus terhadap integritas pemilu dan keamanan terkait pemilu adalah hal yang sangat penting. Peningkatan upaya diperlukan untuk memperbaiki seluruh aspek siklus pemilu, mulai dari memastikan kerangka kerja hukum yang jelas dan adil hingga menyediakan pengamanan di tempat pemungutan suara serta melindungi keamanan teknologi pemilu dan komunikasi. Pembaruan dukungan terhadap pendidikan, pelatihan dan pengembangan kapasitas dalam badan-badan penyelenggara pemilu dan masyarakat sipil diperlukan untuk membangun kapasitas di tingkat nasional dan daerah yang kuat guna memastikan integritas pemilu. Upaya-upaya ini merupakan bagian dari agenda pembangunan demokrasi global yang berorientasi pada ketahanan.

Proses penyusunan konstitusi sudah digunakan untuk meninjau kembali aturan-aturan dasar demokrasi dan

membangun lembaga-lembaga yang lebih inklusif dan tangguh. Desain kelembagaan dalam konteks ini meliputi pembuatan keputusan tentang struktur sistem politik yang paling fundamental yang bisa memastikan adanya inklusivitas, proporsionalitas, dan pengaruh kelompok minoritas dan marginal dalam politik. Membangun ketahanan demokrasi dalam konteks multikultural, baik untuk migran atau lintas etnis maupun perbedaan berbasis-identitas lainnya, memerlukan pemikiran di luar lembaga demokrasi tradisional dan proses adaptasi serta reformasi (Wolff 2011a).

Jalan baru dan inovatif untuk menyampaikan pendapat, perwakilan dan partisipasi diperlukan untuk membuka sistem dan lembaga politik untuk memungkinkan suara komunitas-komunitas marjinal dan minoritas didengar. Berbagai pendekatan untuk melibatkan migran, kelompok-kelompok minoritas dan komunitasnya juga tepat pada saat mengatasi eksklusi, diskriminasi, dan marginalisasi dalam masyarakat “pasca-globalisasi”.

Pendekatan-pendekatan inovatif untuk melibatkan komunitas non-warga negara (seperti imigran) sangat diperlukan. Program-program integrasi sosial harus diadakan untuk mencegah pengasingan dan radikalisme kelompok non-warga negara dan minoritas. Upaya-upaya ini dapat dilengkapi dengan hak suara terbatas atau hak suara lokal dan dialog di tingkat komunitas yang terstruktur untuk memberikan kepada kelompok marjinal keterwakilan dan kebebasan menyampaikan pendapat. Integrasi sosial yang efektif bagi para migran perlu memastikan terpenuhinya keamanan ekonomi, martabat, nilai dan hak-hak mereka di dalam negara tuan rumah.

Mendukung ketahanan: tanggapan regional dan internasional

Memelihara ketahanan demokratis memerlukan kesigapan aktor-aktor internasional dan nasional untuk menghadapi ancaman terhadap demokrasi. Sama halnya, pihak luar yang berusaha membantu menjaga demokrasi secara internal memerlukan sebuah visi jangka panjang: jika ketahanan demokratis pada dasarnya ialah kualitas internal (atau endogen), maka ia harus berkembang secara organik dari dalam, seringkali dengan dukungan dari organisasi-organisasi regional. Dalam jangka pendek, menjaga ketahanan demokrasi memerlukan berbagai tindakan untuk menyesuaikan praktik demokrasi dengan realitas sosial yang cepat berubah.

Organisasi regional dan subregional telah memainkan berbagai peran dalam membantu menjaga dan melindungi demokrasi. Partisipasi dan inisiatif dalam organisasi seperti itu membuka jalan penting untuk menanamkan norma-norma demokratis di dalam negara dan lintas organisasi regional (Kemp *et al.* 2013).

Garda terdepan praktik menjaga demokrasi adalah reaksi “otomatis” di tingkat regional yang berkembang menghadapi perubahan pemerintahan yang inkonstitusional, sebagaimana terlihat dalam tanggapan Masyarakat Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (*Economic Community of West African States/ECOWAS*) terhadap krisis Gambia pada tahun 2017. Mediasi elektoral juga merupakan area penting dari keseluruhan keterlibatan internasional (dan seringkali regional) untuk menjaga demokrasi (Kane dan Haysom 2016). Organisasi regional dan subregional di Afrika, misalnya, semakin bermitra dengan mediator elektoral masyarakat sipil setempat untuk memajukan norma-norma subregional dan kontinental bahwa perebutan kekuasaan yang inkonstitusional harus diganti dengan pemilu multipartai (Shale dan Gerenge 2017).

Komitmen Santiago 1991 Organisasi Negara-Negara Amerika (*Organization of American States/OAS*) merupakan suatu pendekatan regional perintis untuk menjaga demokrasi. Ia menyerukan organisasi untuk bertindak cepat jika muncul “gangguan” terhadap demokrasi di setiap negara anggota (Pevehouse 2005: 130). Piagam Demokratis Antar-Amerika OAS 2001 (*Inter-American Democratic Charter*) merupakan tonggak penting untuk menjaga demokrasi melalui respon regional yang seolah-olah otomatis; piagam ini mengidentifikasi kondisi-kondisi yang berdasarkan hal itu, OAS akan mengintervensi untuk melindungi demokrasi di wilayah itu.

Organisasi-organisasi regional telah terbukti sangat berperan dalam menjaga demokrasi selama krisis. Oleh karena itu, kapasitas mereka untuk memantau dan mengamati seharusnya diperluas dan lebih diprofesionalkan. Selain itu, mereka harus terus terlibat secara luas di dalam proses pemilu untuk membantu mencegah jangan sampai konflik terkait pemilu kemudian bisa meningkat menjadi krisis yang menimbulkan ketidakstabilan.

Bab 3. Ancaman dari Dalam: Ketahanan Demokrasi Menghadapi Kemunduran

Para pemimpin otoriter dan penguasa tiran yang dipilih lebih mengupayakan untuk memanfaatkan hukum ketimbang melanggar atau mengabaikannya guna meningkatkan kekuasaan mereka dalam batas-batas konstitusi (Przeworski 2014). Pada saat para pengkudeta klasik menggulingkan pemerintahan, “para pembalik demokrasi” modern berupaya memperlemah sistem demokratis dengan memanipulasinya ketimbang menghilangkannya (Bermeo 2016). Sebagai contoh, para pembalik demokrasi seringkali menghilangkan atau memperpanjang batas masa jabatan eksekutif, atau secara sepihak berupaya mengubah aturan elektoral sesuai keinginan mereka dengan mendesain kembali daerah pemilihan atau meningkatkan kekuasaan veto mereka (Bulmer 2015), atau mengubah sistem pemilu untuk menghasilkan mayoritas kuat secara artifisial. Konsekuensi umum dari kemunduran demokratis meliputi perluasan kekuasaan keputusan eksekutif, pengurangan pengawasan legislatif, pembatasan kemandirian lembaga peradilan dan media, menyalahgunakan keadaan darurat, dan pengesahan undang-undang yang membatasi hak-hak yang dijamin oleh konstitusi dalam rangka mengurangi oposisi politik dan perbedaan pendapat.

Contoh-contoh kemunduran demokratis melimpah di tahun 2016-2017. Di Venezuela, pemerintah menulis ulang konstitusi untuk memberikan kepada presiden kekuasaan meluas (*sweeping powers*) dan melemahkan lembaga-lembaga pengawas; di Turki, ribuan akademisi, wartawan, dan anggota oposisi dipenjara; dan di Hungaria, saluran media yang kritis terhadap pemerintah ditutup. Sejumlah kasus kemunduran demokrasi tampak meningkat (Bermeo 2016: 8), termasuk di negara-negara yang digambarkan sebagai negara yang berhasil dalam transisi demokrasi seperti Polandia dan Malaysia. Di negara-negara demokrasi mapan seperti Amerika Serikat, muncul tanda-tanda mengkhawatirkan bahwa kepresidenan Trump menantang tatanan konstitusional dan demokrasi.

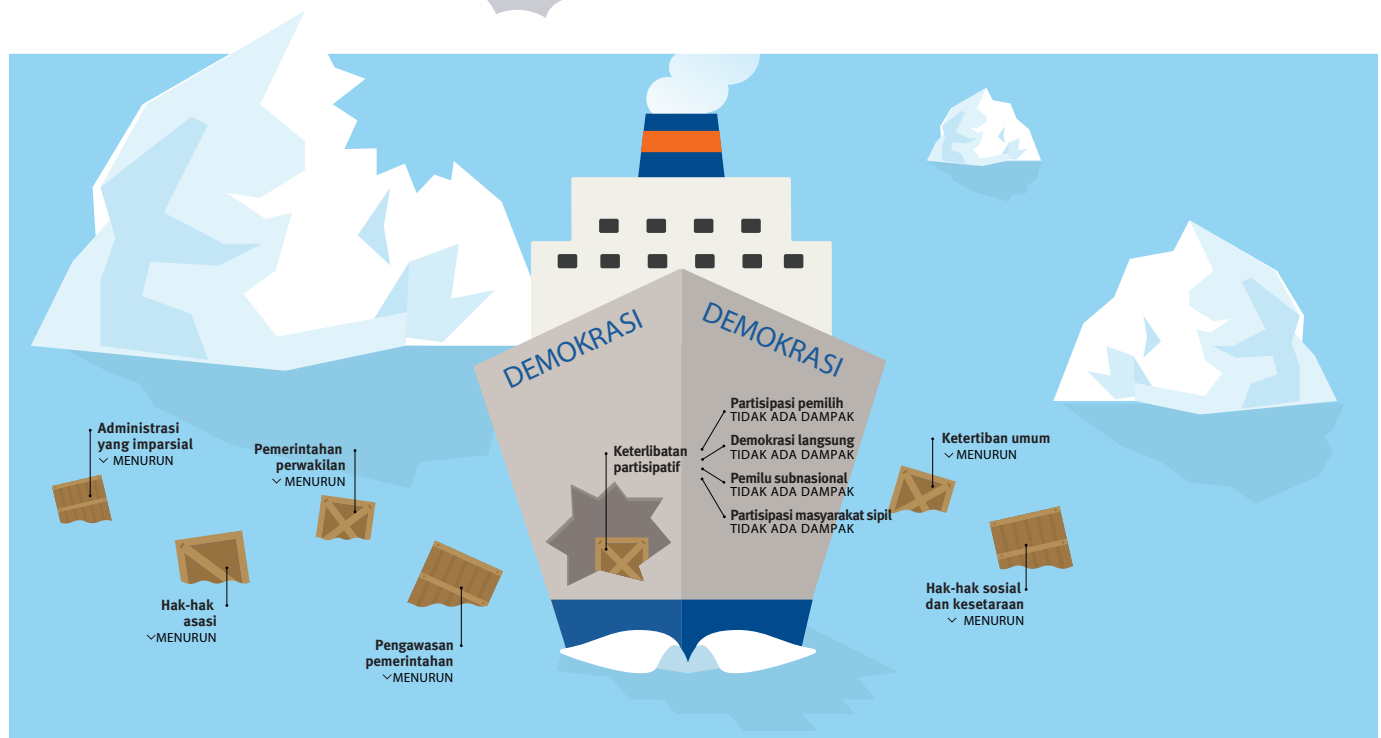
Agar sebuah negara demokrasi bisa melawan kemunduran, perimbangan kekuasaan dalam sistem politik harus mampu menangkal manipulasi, penghapusan, atau pelemahan terhadap aturan dan lembaga yang ada. Hal ini mengharuskan warga negara memiliki kapasitas untuk beradaptasi dan tanggap terhadap skenario perubahan

politik, juga perlawanan dari lembaga peradilan, legislatif, media dan partai politik. Aturan-aturan konstitusional memberikan batasan kepada mereka yang berkuasa; keberadaan aturan konstitusional itu mengasumsikan bahwa para pemimpin eksekutif bisa mencoba merebut kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi atau partisan. Aturan-aturan elektoral, yang merupakan bagian dari aturan konstitusional, menyediakan sarana bagi individu dan kelompok untuk berkompetisi mendapatkan akses kekuasaan melalui dukungan publik. Suatu sistem demokratis dapat pulih jika ia dapat bereaksi pada disfungsi ini.

Implikasi terhadap kualitas demokrasi

Ketika menganalisis kemunduran demokrasi modern, International IDEA lebih mempertimbangkan implikasinya bagi legitimasi demokrasi sebagai suatu sistem politik, dan mengapa hal itu mengancam nilai-nilai demokrasi serta hak asasi manusia dan supremasi hukum, ketimbang penyebab atau pendorongnya (Lust dan Waldner 2015). Analisis ini melengkapi penilaian *Global State of Democracy* sejak 1975

Apakah dampak kemunduran demokrasi?



dengan berfokus pada sejumlah kasus kemunduran demokratis yang dipilih hingga tahun 2016.

Berdasarkan data indeks *Global State of Democracy* (GSoD) International IDEA dan 15 negara yang dipilih, International IDEA mengkaji apakah kemunduran demokrasi mempengaruhi dimensi lain dari demokrasi suatu negara. Analisis ini dilakukan berdasarkan atribut indeks GSoD mengenai Pemerintahan Perwakilan, Hak-hak Asasi, Pengawasan Pemerintahan, Administrasi yang Imparsial dan Keterlibatan Partisipatif.

Negara-negara contoh dipilih di antara negara yang datanya tersedia, dengan berupaya menjaga keseimbangan wilayah, dan mempertimbangkan kasus di mana para pemimpin memodifikasi batasan periode jabatan untuk memperpanjang mandat mereka sebagaimana diidentifikasi oleh Ginsburg, Melton dan Elkins (2011: 1869), atau karena negara dipengaruhi oleh kemunduran demokrasi secara umum sebagaimana diidentifikasi oleh Bermeo (2016: 5–19). Tabel 3.1 menampilkan daftar lengkap negara dalam contoh yang mengalami kemunduran. Terlepas dari perbedaan-perbedaan di antara negara-negara

dan peristiwa ini, mereka bisa dibandingkan karena analisis tidak terfokus pada negara atau peristiwa itu sendiri, tetapi pada perubahan yang dipicu dalam kaitan dengan kualitas dimensi dan subdimensi demokrasi, juga persepsi terhadap demokrasi.

Analisis ini membandingkan kelompok negara sampel terhadap kelompok negara pengendali (dengan pembangunan manusia dan hubungan sejarah yang dapat dibandingkan), di mana peristiwa kemunduran tidak terjadi, meskipun beberapa negara mengalami rintangan demokrasi selama periode itu (lihat Tabel 3.2). Titik awal analisis data sesuai dengan tahun ketersediaan data dalam sumber survei. Tahun yang sama digunakan untuk analisis data indeks GSoD dan survei persepsi untuk memastikan homogenitas.

Analisis menunjukkan bahwa, rata-rata, empat dimensi demokrasi (Pemerintahan Perwakilan, Hak-hak Asasi Manusia, Pengawasan Pemerintahan dan Administrasi yang Imparsial) secara komparatif menjadi stagnan atau menurun setelah peristiwa kemunduran demokrasi.

TABEL 3.1

Negara dan peristiwa terpilih untuk analisis data

Negara (wilayah)	Tahun peristiwa kemunduran demokrasi	Jenis peristiwa kemunduran demokrasi	Periode analisis (Indeks GSoD)	Periode analisis (survei persepsi)
Argentina (Amerika Latin dan Karibia)	1995	Perpanjangan Presiden Carlos Menem—amandemen	1975–1995–2015	1996–2016
Brasil (Amerika Latin dan Karibia)	1998	Perpanjangan Presiden Fernando Henrique Cardoso	1975–1998–2015	2000–2015
Kolombia (Amerika Latin dan Karibia)	2006	Perpanjangan Presiden Álvaro Uribe Vélez	1975–2006–2015	2007–2015
Ekuador (Amerika Latin dan Karibia)	2007	Pemilu dan Amandemen Konstitusi Presiden Rafael Correa	1975–2007–2015	2008–2015
Lesotho (Afrika)	1994	Kudeta	1975–1994–2015	1999–2014
Madagaskar (Afrika)	2009	Kudeta	1975–2009–2015	2013–2015
Namibia (Afrika)	2000	Perpanjangan Presiden Samuel Nujoma	1995–2000–2015	2002–2014
Niger (Afrika)	2009	Perpanjangan Presiden Mamadou Tandja—kudeta/darurat	1975–2009–2015	2013–2015
Pakistan (Asia dan Pasifik)	1999	Kudeta	1975–1999–2015	2001–2012
Peru (Amerika Latin dan Karibia)	1995	Perpanjangan Presiden Alberto Fujimori	1975–1995–2015	1995–2015
Thailand (Asia dan Pasifik)	2007	Kudeta	1975–2007–2015	2007–2013
Rusia (Eropa)	2012	Presiden Vladimir Putin menjabat kembali	1991–2012–2015	2006–2011
Turki (Eropa)	2002	Pemilu Presiden Recep Tayyip Erdogan	1975–2002–2015	2007–2011
Ukraina (Eropa)	2010	Presiden Viktor Yanukovych menjabat	1991–2010–2015	2006–2011
Venezuela (Amerika Latin dan Karibia)	2004	Perpanjangan Presiden Hugo Chávez – penggantian	1975–2004–2015	2005–2015

Catatan: Tahun awal untuk periode analisis (survei persepsi) adalah tahun sebelum tahun peristiwa di mana data tersedia dalam survei persepsi; tahun akhir adalah tahun yang paling terkini di mana data tersedia dalam survei persepsi.

Sumber: Bermeo, N., 'On democratic backsliding' [Pada kemunduran demokrasi], *Journal of Democracy*, 27/1 (2016), hal. 5–19; Ginsburg, T., Melton, J. dan Elkins, Z., 'On the evasion of term limits' [Pada penghindaran masa jabatan], *William & Mary Law Review*, 52 (2011), hal. 1807–69, <<https://ssrn.com/abstract=1683594>>.

Sebaliknya, atribut Keterlibatan Partisipatif, yang diukur melalui subatribut partisipasi masyarakat sipil, partisipasi pemilih, demokrasi langsung dan pemilihan subnasional, tidak mengalami perubahan komparatif yang signifikan setelah negara mengalami kemunduran demokrasi. Hal ini mengindikasikan bahwa, ketika banyak aspek demokrasi “menderita” selama dan setelah peristiwa kemunduran demokrasi, mereka tampaknya tidak menghentikan keterlibatan penduduk, bahkan dalam upaya membungkam masyarakat sipil (HRW 2017). Negara demokrasi yang tangguh juga tampaknya mampu menahan penurunan kualitas demokrasi yang diakibatkan oleh peristiwa kemunduran demokrasi dalam kaitannya dengan pengendalian korupsi, karena kemunduran, rata-rata, tampaknya tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi.

Sebuah dampak sampingan mengkhawatirkan dari kemunduran demokrasi adalah dampak yang ditimbulkannya terhadap kehidupan individu sehari-hari

dan persepsi terhadap keamanan. Data yang dianalisis menggambarkan hubungan antara kemunduran demokrasi dan kemerosotan ketertiban umum (didefinisikan sebagai kombinasi konflik internal dan episode besar kekerasan politik). Rata-rata, peristiwa kemunduran demokrasi diikuti dengan suatu kemerosotan komparatif ketertiban umum. Kekerasan dalam konteks ini menjadi “*catch-22*” (suatu kondisi di mana solusi yang diinginkan sulit dicapai karena kondisi yang tidak logis): karena pemusatan kekuasaan meningkat, ketidakpuasan rakyat memuncak, mencetuskan reaksi kekerasan. Pada gilirannya, mereka yang berupaya mempertahankan kekuasaannya menggunakan kekerasan ini untuk membenarkan keputusan mereka dan membatasi kebebasan.

Selain itu, terdapat hubungan antara kemunduran demokrasi dan pembangunan. Data indeks GSoD menunjukkan bahwa insiden-insiden kemunduran demokrasi menekan kinerja negara dalam memenuhi hak-hak sosial dan kesetaraan (sejauh mana kesejahteraan dasar

TABEL 3.2

Negara Pengendali

Negara (wilayah)	Periode analisis (Indeks GSoD)	Periode analisis, (survei persepsi)
Botswana (Afrika)	1999–2015	1999–2014
Chile (Amerika Latin dan Karibia)	1995–2015	1995–2015
Kosta Rika (Amerika Latin dan Karibia)	1995–2015	1996–2015
Ghana (Afrika)	1999–2015	1999–2014
India (Asia dan Pasifik)	1995–2015	1995–2012
Republik Korea (Asia dan Pasifik)	1995–2015	1996–2010
Rumania (Eropa)	1991–2015	1995–2012
Afrika Selatan (Afrika)	1999–2015	1999–2014
Slovenia (Eropa)	1991–2015	1995–2011
Uruguay (Amerika Latin dan Karibia)	1995–2015	1995–2015

Catatan: Menurut periode analisis untuk indeks GSoD, seluruh negara dalam tiap wilayah memiliki tahun awal yang sama. Periode ini juga mencakup seluruh rentang negara-negara sampel untuk tiap wilayah yang berawal dari peristiwa pertama. Menurut periode analisis untuk survei persepsi, pengukuran mengumpulkan skor dari survei sumber, untuk pertanyaan ‘apakah demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang anda sukai?’ dan ‘apakah baik memiliki sistem politik demokrasi?’

Sumber: World Values Survey, “Wave 6: 2010–2014” [Gelombang 6: 2010–2014], <<http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp>>; Afrobarometer 2016; Latinobarometro 2016.

serta kesetaraan sosial dan politik direalisasikan) rata-rata sampai hampir setengahnya jika dibandingkan dengan kondisi sebelum insiden dan dibandingkan dengan kelompok negara pengendali.

Apakah kemunduran demokrasi berkorelasi dengan menurunnya dukungan rakyat untuk demokrasi? Apakah kemunduran terkini dari pemimpin yang dipilih secara demokratis merupakan indikasi penerimaan rakyat atas despotisme halus – yakni, apakah warga negara yang telah mengurangi dukungan bagi nilai-nilai demokrasi memilih para pembalik demokrasi? Pertanyaan ini penting, karena sikap individu itu penting. Ketika faktor yang berhubungan dengan elite dan kelembagaan dapat mendorong stabilitas demokrasi atau mencegah pembalikan demokrasi, warga negara memainkan peran kunci. Bahan bakar yang memicu tindakan kolektif dan kelembagaan melawan kesewenangan negara, dalam kasus ini kemunduran demokrasi, berawal dari warga negara.

Data indeks GSoD International IDEA menunjukkan bahwa di negara-negara yang mengalami kemunduran demokrasi, persepsi positif rakyat terhadap demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan meningkat (rata-rata lebih dari 8 persen), sedangkan di negara-negara pengendali terdapat rata-rata penurunan dalam dukungan bagi demokrasi.

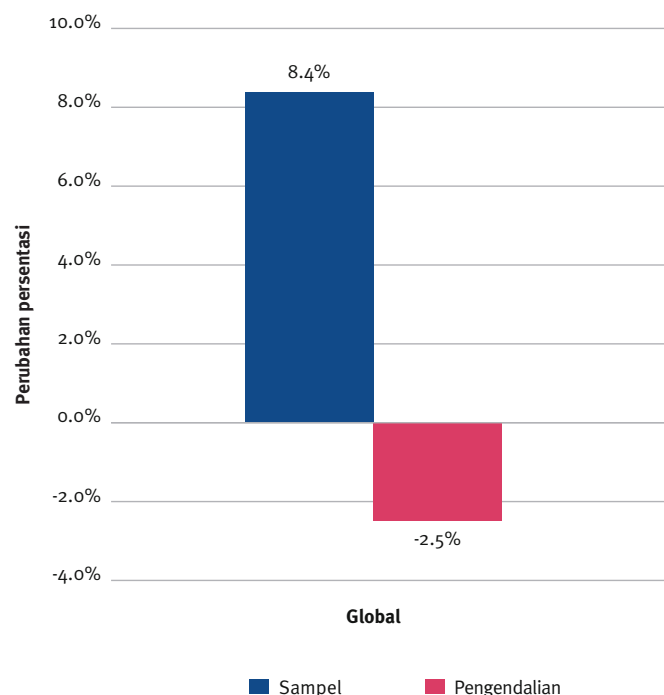
Kemunduran demokrasi tampaknya akan membuat warga negara menyadari bahwa demokrasi lebih baik dari jenis pemerintahan lainnya; di tempat-tempat di mana demokrasi tidak menghadapi tekanan, orang-orang mungkin menerimanya begitu saja. Karena menggambarkan penjelasan kausalitas berada di luar lingkup survei ini, temuan penting bagi penyedia pendampingan demokrasi adalah bahwa, di hampir seluruh kasus, kemunduran demokrasi tidak menunjukkan adanya penurunan dukungan rakyat terhadap demokrasi, tetapi justru sebaliknya.

Melawan kemunduran demokrasi

Badan peradilan berperan penting dalam membatasi upaya-upaya otoritas eksekutif untuk meningkatkan kekuasaan mereka dengan cara memanipulasi konstitusi. Sebagai contoh, sekalipun pada tahun 2005 pendukung Presiden Kolombia Alvaro Uribe berhasil mengubah konstitusi, sehingga memungkinkan Uribe mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua secara berturut-turut, pada tahun 2010 Mahkamah Konstitusi menghentikan upayanya mengubah konstitusi lagi guna memuluskan jalan Uribe

GAMBAR 3.1

Perubahan rakyat dalam persepsi positif mereka tentang demokrasi



Catatan: Pengukuran ini mengumpulkan skor dari survei sumber untuk pertanyaan mereka “apakah demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang anda sukai?” dan “apakah baik memiliki sistem politik demokrasi?”. Sementara pengukuran ini memuat beberapa bias dan keterbatasan yang melekat (lihat Schwertheim 2017), pengukuran ini dimitigasi tidak hanya dengan membandingkan skor tertentu di negara yang dipilih, tapi dengan melihat perubahan dalam persepsi itu di setiap negara sebelum dan sesudah peristiwa kemunduran dan hubungannya dengan perubahan di antara kelompok negara pengendali. Pilihan negara untuk negara sampel dan pengendali, juga tahun awal analisis masing-masing, dirinci dalam Tabel 3.1 dan 3.2. Bilah berwarna biru gelap dalam Gambar 3.1 menunjukkan perubahan persentase dalam negara sampel sebelum peristiwa, dan bilah merah menunjukkan perubahan persentase di negara pengendali setelah peristiwa. Sisi bawah skala menggambarkan persentase negatif (yaitu penurunan); sisi atas persentase positif (yaitu capaian). Tinggi bilah menunjukkan perubahan persentase antara tahun peristiwa dan 2015.

Sumber: World Values Survey 2016; Afrobarometer 2016; Latinobarometro 2016.

kembali mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga.

Parlemen dapat juga membatasi upaya memperluas kekuasaan eksekutif secara berlebihan (Fish 2006). Pada tahun 2001, sebuah rancangan undang-undang yang diusulkan di Zambia yang akan memperpanjang periode jabatan presiden dibatalkan karena prospek kekalahan di Parlemen. Di Malawi hal yang sama terjadi tahun 2002 ketika rancangan undang-undang gagal mendapat dukungan yang cukup dari Parlemen; di Nigeria hal ini terjadi pada tahun 2006 (Zamfir 2016: 5).

Media juga merupakan katalis yang penting untuk membatasi atau menangkal kemunduran demokrasi. Sebagai contoh, di Peru selama masa jabatan Presiden

Alberto Fujimori, sirkulasi media dari sebuah video menampilkan penasihat Alberto sedang menyuap seorang anggota kongres mengakibatkan kejatuhan sang presiden. Pada hari yang sama rekaman itu tersiar, presiden memerintahkan pemilu dan mengumumkan bahwa ia tidak akan mencalonkan diri kembali (La República 2016). Serupa dengan hal itu, media sosial memiliki potensi yang memungkinkan aktivis dan pemrotes untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap lanskap demokrasi yang semakin terkikis.

Dibandingkan dengan para pendahulunya, “para pembalik demokrasi” modern cenderung tidak menghapuskan partai politik, sehingga menyisakan beberapa jalur terbuka untuk mempertentangkan gagasan dan menolak perluasan eksekutif. Warga negara memiliki peluang yang lebih baik untuk memobilisasi penolakan rakyat ketika terdapat ruang bagi elite untuk saling bersaing (Brownlee 2007).

Organisasi-organisasi regional berusaha melindungi demokrasi; beberapa organisasi telah mengadaptasi perangkat yang pada mulanya dirancang untuk mengurus kudeta tradisional guna mengatasi ancaman terhadap demokrasi konstitusional dari dalam (Choudhry dan Bisarya 2014). EU, Uni Afrika (*African Union*) dan OAS, juga organisasi-organisasi subregional seperti ECOWAS, memiliki mekanisme untuk menjatuhkan sanksi kepada negara anggota karena melanggar nilai-nilai bersama yang memajukan demokrasi konstitusional dan supremasi hukum, di mana tindakan-tindakan kemunduran demokrasi modern dapat dikendalikan. Dengan cara ini, ketahanan demokrasi bisa didukung bukan sebagai karakteristik inheren pemerintahan demokrasi, tetapi karena ia merupakan nilai internasional bersama yang penting.

Rekomendasi untuk menghadapi dan melawan kemunduran

Penyedia pendampingan demokrasi

- Hindari menyatukan kemunduran demokrasi dengan penurunan dukungan demokrasi, dan memelihara dukungan komunitas internasional bagi negara-negara yang menghadapi risiko, atau pada permulaan, kemunduran demokrasi.

- Lihatlah melampaui transisi demokrasi, dan fokus pada konsolidasi demokrasi juga pada cerita keberhasilan demokrasi melalui pendekatan pencegahan yang keberlanjutan dan jangka panjang.

Partai politik oposisi dan organisasi masyarakat sipil

- Dengan cepat mengorganisasi dan memobilisasi masyarakat ketika terdapat tanda-tanda awal mengecilnya ruang sipil.
- Temukan cara untuk menjelaskan perubahan-perubahan teknis dalam pemerintahan kepada publik dalam rangka menimbulkan kesadaran. Berikan perhatian khusus pada mekanisme pengangkatan bagi badan peradilan dan perubahan dalam undang-undang pemilu.
- Tetap terorganisasi dan mencari dialog dengan elemen-elemen moderat kekuasaan pemerintahan selama kemunduran demokrasi.

Pembuat kebijakan

- Mempertahankan perlindungan konstitusional bagi minoritas politik dan oposisi, juga mekanisme yang lebih tradisional dari pemisahan cabang-cabang pemerintahan dan lembaga-lembaga akuntabilitas yang mandiri.
- Melakukan investasi dengan membangun badan penyelenggara pemilu yang profesional, mandiri dan kompeten dengan mandat yang kuat untuk menyelenggarakan pemilu yang transparan dan mendapatkan kepercayaan publik.

Organisasi-organisasi Regional

- Mengembangkan sistem sanksi yang sudah ada untuk mengembangkan sistem pemantauan formal penyerta yang berhubungan dengan peralihan kekuasaan yang inkonstitusional melalui pemantauan yang teratur terhadap pemerintahan konstitusional dan peralihan kekuasaan, serta lebih banyak pertukaran informasi.
- Melakukan investasi dalam pemantauan yang teratur terhadap pemerintahan konstitusional.
- Mempromosikan dialog intra-regional di antara negara-negara anggota mengenai praktik-praktik yang baik untuk menjaga demokrasi konstitusional.

Bab 4. Perubahan Sifat Partai Politik dan Perwakilan

Perwakilan politik tradisional sedang berada di bawah tekanan yang menguat: lintas benua, sebagian besar rakyat punya kepercayaan yang rendah terhadap partai politik. Banyak negara Eropa dan Amerika Serikat baru-baru ini menjalani pemilu dan referendum dengan hasil tak sesuai harapan, sehingga menyebabkan “gempa bumi” politik di antara elite tradisional. Sementara partai politik masih menawarkan suatu saluran terpusat bagi perwakilan demokratis, partai politik lama dan baru harus menyesuaikan cara mereka beroperasi untuk membangun kembali kepercayaan di kalangan pemilih.

Partai politik dan sistem kepartaian bisa tetap relevan dengan mengadaptasi dan menginovasi peran dan fungsi mereka dalam masyarakat. Partai-partai yang tangguh membuat keseimbangan yang hati-hati antara memberikan warga negara peran sentral dalam proses internal partai dan membuat warga negara menjadi tujuan dari kebijakan partai. Partai tangguh mengatasi krisis dan tantangan kebijakan yang kompleks dengan mengejar visi-visi politik yang koheren, dan memiliki pemimpin yang bisa dipilih, bisa mengambil keputusan, dan taktis, guna mengkomunikasikan visi-visi tersebut. Partai politik bisa membantu meningkatkan kepercayaan publik dalam lembaga-lembaga demokrasi dengan mengambil langkah-langkah inklusif, memperbaharui kepemimpinan (khususnya dengan perempuan dan pemuda) dan menerapkan pendekatan baru pada pelibatan warga negara.

Tantangan hasil: krisis dan pengendalian kebijakan

Sejak krisis keuangan global 2007–2008, baik negara-negara demokrasi gelombang ketiga maupun negara-negara demokrasi mapan telah berjuang untuk memberikan solusi dan kebijakan yang jelas untuk mengurangi berbagai masalah yang bersifat internasional tetapi menantang status quo. Seperti halnya krisis keuangan di Amerika Latin dan Karibia, serta Asia dan Pasifik, di tahun 1990-an yang memainkan peran dalam mengguncang sistem politik dan kepartaian, krisis keuangan saat ini juga memberikan tekanan yang sama kepada partai-partai di Eropa untuk beradaptasi dan berubah. Di Eropa, ketika memuncaknya utang memperberat tekanan perekonomian di zona euro, pemerintah harus berurusan dengan meningkatnya arus pengungsi dan migran, juga ancaman keamanan. Sebuah konsensus internasional mengenai bagaimana mengatasi krisis keuangan global

muncul, dan badan-badan supranasional mengesampingkan pemerintah nasional seperti Yunani pada saat negara itu tidak menyetujui konsensus tersebut. Teknokrat dan pegawai negeri membuat banyak keputusan terkait hal itu. Dengan memberikan kewenangan kepada pejabat yang tidak dipilih rakyat, politik pembuatan keputusan terkait masalah-masalah keuangan telah bergerer ke luar jangkauan akuntabilitas demokratis nasional. Sebagai akibatnya, politisi di seluruh dunia dituding berada “di luar kendali kebijakan” (Leterme dan van der Staak 2016) karena mereka tidak dapat mempengaruhi kebijakan sebesar yang diinginkan konstituennya, serta tidak bisa merespon pemilih di luar batas yang dimungkinkan oleh pengaruh mereka.

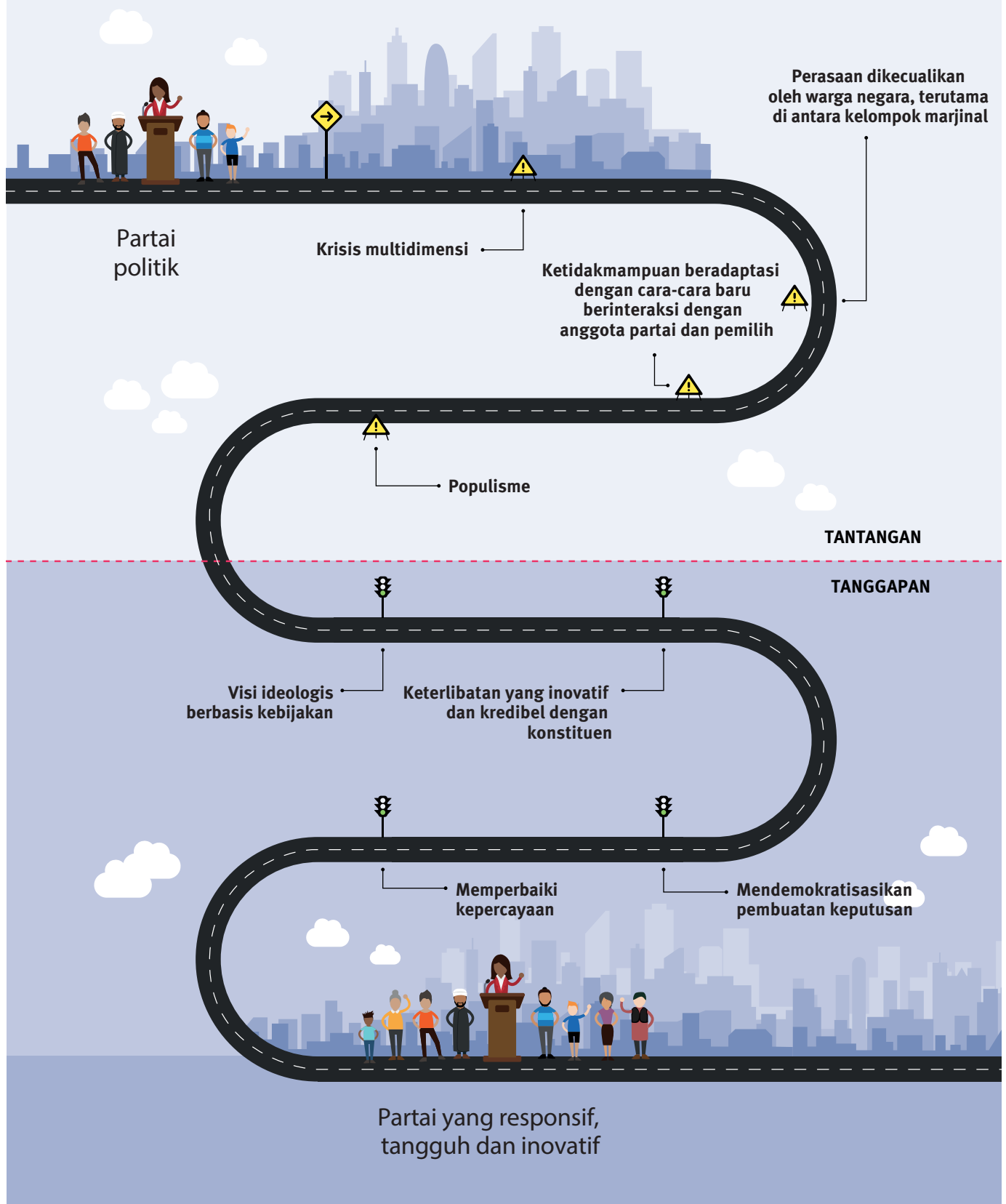
Tantangan kepercayaan dan inklusi

Warga negara berharap pemerintah melakukan lebih banyak untuk memberikan hasil yang lebih baik, tetapi mereka memiliki lebih sedikit kepercayaan bahwa wakilnya mampu menghadapi tekanan masalah saat ini. Kemajuan teknologi juga meningkatkan jumlah informasi yang tersedia kepada publik untuk mengawasi pernyataan dan perbuatan politisi – yang meningkatkan kerentanan mereka akan skandal korupsi – dan memiliki potensi untuk meningkatkan integritas dan transparansi. Kurangnya kepercayaan warga negara terhadap partai diperparah dengan eksklusivitas terhadap perempuan dan generasi muda dari posisi pengambilan keputusan dan hierarki partai.

Menurunnya kepercayaan kepada partai

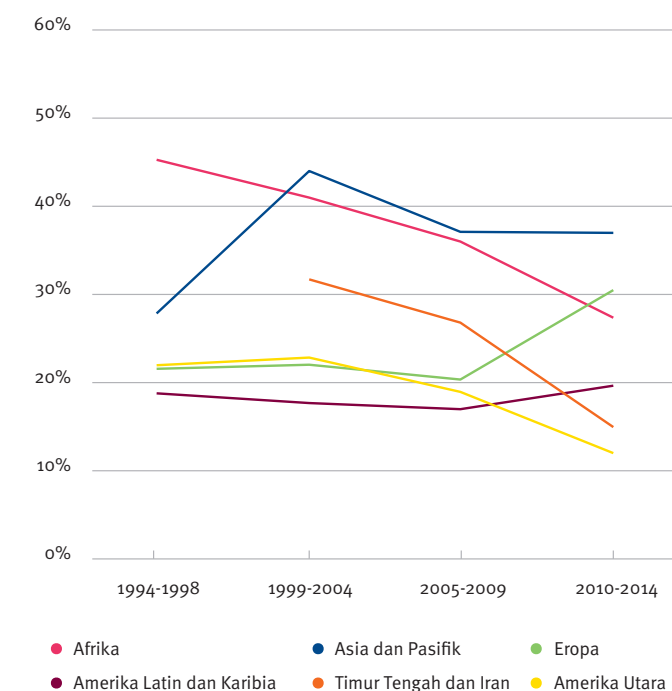
Berbagai barometer sosial dari seluruh dunia menunjukkan bahwa partai politik berada di antara lembaga yang paling tidak dipercaya masyarakat. Gambar 4.1 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan kepada partai politik di seluruh

Jalan partai politik menuju ketahanan



GAMBAR 4.1

Persentase warga Negara dengan kepercayaan “Sangat besar” atau “Cukup besar” pada partai politik dibandingkan dengan lembaga lainnya



Catatan: Seluruh gambar yang menunjukkan rata-rata regional data World Values Survey didasarkan pada seluruh negara yang dimasukkan dalam sampel untuk gelombang tertentu. Jadi, 1994–1998 didasarkan pada 52 negara, 1999–2004 pada 37 negara, 2005–2009 pada 57 negara, dan 2010–2014 pada 58 negara.

Survei: World Values Survey Gelombang 1–6, 1994–2014.

wilayah, setidaknya hingga tahun 2014, kecuali untuk Asia dan Pasifik serta Eropa, telah stagnan atau bahkan menurun sejak 1994. Ketika tingkat kepercayaan dasar pada partai politik di Asia dan Pasifik lebih tinggi daripada di wilayah lainnya, tetapi kepercayaan publik pada partai politik di sana masih lebih rendah dibandingkan dengan lembaga lainnya. Survei yang lebih mutakhir oleh Latinobarometer memastikan rendahnya tingkat kepercayaan, yang sudah berlangsung lama, di Amerika Latin – 20 persen pada tahun 1995 dan 16 persen pada tahun 2016, menyatakan memiliki kepercayaan yang tinggi atau sedikit kepercayaan pada partai politik (Latinobarómetro 2016).

Kepercayaan pada partai terkikis dengan munculnya retorika anti-kemapanan, ketika terdapat bukti korupsi, kegagalan dalam memberikan layanan, atau kurangnya inklusi dan kemampuan merespon tuntutan warga negara. Hal ini juga dapat mencerminkan cara berpikir warga negara yang lebih

canggih dan kritis, dengan demikian merepresentasikan insentif positif untuk reformasi.

Kepercayaan warga negara rusak ketika politisi membuat janji-janji kampanye yang muluk-muluk atau mengeluarkan pernyataan “nir fakta” yang dipelintir oleh media yang bias dalam perdebatan publik yang terpolarisasi. Hal ini terjadi di Amerika Latin dan Karibia pada tahun 1980-an, 1990-an dan 2000-an, dan dalam referendum Brexit 2016 di Inggris serta pada kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat 2016. Premis demokratis bahwa warga negara dapat membuat pilihan berdasarkan informasi menjadi dipertanyakan dalam era “politik pasca-kebenaran” (Davies 2016; Hochschild dan Einstein 2015; The Economist 2016). Menurunnya kepercayaan dapat pula dikaitkan dengan korupsi.

Marginalisasi perempuan dan pemuda

Demokrasi yang sehat dan tangguh didasarkan pada inklusivitas, di mana partai politik dan lembaga perwakilan berada pada posisi kunci untuk menjaganya. Namun partai menemukan bahwa hal ini sukar dilaksanakan, khususnya ketika perempuan dan pemuda, sebagian besar tidak terlibat dalam lembaga-lembaga perwakilan. Meskipun perwakilan perempuan di lembaga legislatif telah bertambah dua kali lipat selama 22 tahun terakhir – dari 11 persen pada tahun 1995 menjadi 22 persen pada tahun 2015, lalu menjadi 23,4 persen pada tahun 2017 (IPU 2015, 2017) – dengan kecepatan ini masih akan memerlukan 40 tahun lagi untuk mencapai jumlah yang setara antara laki-laki dan perempuan di lembaga legislatif.

Generasi yang lebih muda kurang terwakili dalam keanggotaan dan kepemimpinan partai, serta lembaga legislatif. Marginalisasi mereka dari (dan menurunnya kepercayaan pada) partai politik tradisional menjadi perhatian khusus, karena mereka dapat membuat atau merombak model perwakilan di masa depan. Keanggotaan partai mengalami pertumbuhan yang relatif kecil tapi penting di Jerman, Belanda dan Inggris pada tahun 2016–2017, khususnya di antara pemuda. Survei IPU pada tahun 2014–2015 terhadap 126 parlemen menunjukkan tingkat yang tidak mengejutkan, perwakilan pemuda dalam lembaga legislatif: 65 persen lembaga legislatif memiliki persyaratan usia yang lebih tinggi daripada usia minimum pemilih (IPU 2016). Hampir satu di antara tiga parlemen unikameral atau kamar perlemen yang lebih rendah dan 80 persen kamar parlemen yang lebih tinggi tidak memiliki anggota di bawah usia 30 tahun.

Tantangan partai baru dan populisme

Ketika partai dipandang berada di luar kendali kebijakan dan kehilangan kepercayaan, serta sistem kepartaian gagal mewakili secara memadai kelompok-kelompok berbeda dalam masyarakat, dukungan elektoral akan condong kepada partai baru dan pemimpin baru. Para penantang elektoral terhadap partai mapan telah muncul di mana-mana di seluruh Afrika, Amerika Latin dan Karibia, serta Amerika Utara, Eropa, dan Asia Tenggara dan Asia Timur, di negara-negara demokrasi gelombang ketiga dan negara demokrasi yang lebih lama terbentuk. Para penantang ini seringkali berhasil memberikan ekspresi politik untuk keluhan ekonomi, sosial maupun budaya baik yang nyata maupun yang dirasakan.

Populisme bukanlah hal yang baru ataupun eksklusif bagi negara demokrasi. Di Amerika Latin, presiden Evo Morales, juga mantan presiden Hugo Chávez, Alberto Fujimori, dan Kirchners, menggunakan taktik populis, sedangkan Presiden Rodrigo Duterte mendapatkan dukungan pada pemilu presiden di Filipina 2016 dengan menyalahkan kondisi negara pada kepemimpinan partai politik arus utama. Unsur-unsur populisme juga telah menjadi bagian integral pada politik Afrika, meskipun bentuk dan formatnya terus berubah. Sebagian besar negara benua ini mengadopsi politik multipartai pada tahun 1990-an, yang ditandai dengan munculnya mobilisasi populis oleh para aktor politik yang berupaya mengukir ceruk mereka sendiri dalam menghadapi pesaing yang mapan. Mobilisasi identitas etno-regional dan agama menyertai pengenalan posisi populis pada isu-isu seperti redistribusi kemakmuran, hak-hak sosial-ekonomi dan keadilan ke dalam politik. Tiga hal yang mencirikan varian isu populis di Eropa Barat dan Amerika Serikat; “anti-kemapanan”, “otoritarianisme”, dan “nativisme” (Inglehart dan Norris 2016: 5).

Di Eropa, partai dan gerakan populis telah muncul sejak tahun 1970-an. Front Nasional (Front National, FN) di Perancis dan Koalisi Kiri Radikal (Synaspismós Rizospastikís Aristerás, Syriza) di Yunani telah tumbuh pesat. FN meningkatkan perolehan suaranya dari 10,4 persen pada tahun 2007 menjadi 21,3 persen pada putaran pertama pemilihan presiden Perancis tahun 2017 (Ministère de l'Intérieur, tanpa tanggal). Demikian pula, bagian suara Syriza bertambah dari 4,6 persen dalam pemilu parlemen 2009 menjadi 16,8 persen pada tahun 2012, dan 35,6 persen pada tahun 2015 (Kementerian Dalam Negeri Yunani 2015). Pada tahun 2016, partai populis telah memasuki koalisi pemerintahan di 11 negara Eropa (Inglehart dan Norris 2016). Yang paling penting, mereka menunjukkan bahwa merombak tatanan

politik tidak harus dilakukan dengan memenangkan kursi parlemen.

Di Amerika Latin dan Karibia, lonjakan partai dan pemimpin baru telah muncul sejak awal 1990-an sebagai respons atas frustrasi rakyat terhadap korupsi dan kesalahan penanganan perekonomian dan diikuti dengan krisis ekonomi yang memperdalam kemiskinan dan kesenjangan kekayaan di negara mereka. Dalam menangani krisis ini, pemerintah menghadapi tantangan untuk bertindak secara bertanggung jawab dan responsif, tetapi hal ini terlalu sering dilakukan dengan mengorbankan yang lainnya (baik dengan pengetatan anggaran maupun program murah hati), atau tidak. Kegagalan mereka membuka jalan bagi munculnya partai-partai dan pemimpin baru yang memicu jatuhnya sistem kepartaian di negara-negara seperti Bolivia, Ekuador, Peru dan Venezuela. Frustrasi yang sama telah mendorong pembaharuan lanskap partai politik ke dalam sistem kepartaian yang lebih stabil seperti di Kolombia, Meksiko dan, yang paling mutakhir, Chile.

Gerakan politik yang tumbuh dari protes warga negara dan berciri retorika anti-kemapanan adalah fenomena lainnya yang muncul. Selama 10 tahun terakhir, gerakan ini paling sering berubah menjadi entitas politik ketika tujuan politik mereka mengharuskan untuk memegang kekuasaan legislatif.

Meskipun beberapa formasi baru ini hingga batas tertentu beroperasi dengan cara yang sama (dan menghadapi tantangan yang sama) seperti partai tradisional, mereka tampaknya lebih inovatif. Contohnya, mereka mengaburkan perbedaan antara anggota dan bukan anggota, dan menurunkan ambang batas (keuangan) untuk bergabung. Gerakan politik baru ini (banyak yang menghindari istilah “partai”) lebih banyak bergantung pada keterlibatan warga negara secara langsung, misalnya melalui media sosial dan perangkat digital lainnya, daripada melalui pertemuan-pertemuan partai tradisional. Mereka efektif dalam memobilisasi partisipasi warga negara dan memberikan penghargaan ke anggota melalui rasa keterwakilan politik yang kuat (Stokes 2015).

Tantangan keterlibatan warga negara

Jumlah keanggotaan partai mengindikasikan bagaimana warga negara berhubungan dengan partai politik tradisional. Secara keseluruhan, keanggotaan partai terus menurun sejak 1994 di Asia dan Pasifik, Eropa serta Amerika Latin dan Karibia, sedangkan di Afrika sejak 2005. Di Timur Tengah dan Iran, juga di Amerika Utara, keanggotaan partai cenderung meningkat (World Values Survey, Gelombang 1–6, 1994–2014).

Akan tetapi, tidak semua partai kehilangan anggotanya, dan beberapa upaya untuk menarik anggota baru menunjukkan keberhasilan. Keanggotaan Partai Konservatif, Partai Buruh dan Demokrat Liberal di Inggris meningkat dari 0,8 persen pemilih pada tahun 2013 menjadi 1,6 persen pada tahun 2016 (Keen dan Apostolova 2017). Dua partai tradisional di Perancis membuka proses nominasi calon kepada seluruh pendukung, tidak hanya kepada anggota. Partai Sosialis (*Parti Socialiste*) pertama kali membuka pencalonan partai kepada orang yang bukan anggota partai pada tahun 2011; Partai Republik Perancis (*Parti Républicain*) juga melakukannya selama pencalonan 2016. Gerakan Presiden Perancis Emmanuel Macron '*La République En Marche!*' memiliki pendukung ketimbang anggota.

Partai politik yang inovatif memutakhirkan budaya internal dan struktur operasional mereka untuk beradaptasi dengan interaksi online dan interaksi berbasis-jalan dan pembuatan keputusan. Teknologi digital memungkinkan warga negara menyuarakan pendapat mereka secara lebih langsung dibandingkan sebelumnya, sehingga menciptakan lebih banyak ruang horizontal daripada vertikal, dengan kesetaraan dan tanpa hierarki: setiap orang dapat memutuskan, dan tidak ada yang mengatur. Lebih jauh, keberadaan, perilaku dan keputusan politisi menjadi lebih cepat terlihat pada publik yang lebih luas – dan dapat berpengaruh lebih langsung.

Akan tetapi, digitalisasi menawarkan peluang maupun ancaman terhadap partisipasi dan perwakilan warga negara. Mereka yang tertinggal di luar perwakilan tradisional karena “kemudahan” mereka, disabilitas, jenis kelamin atau status minoritasnya dapat diuntungkan dari jalur-jalur baru keterlibatan yang bermakna serta menggunakan pengaruh dari luar struktur tradisional partai. Warga negara yang kurang terhubung dalam era digital – termasuk orang tua, orang-orang yang lebih miskin atau kurang berpendidikan – bisa merasa dikecualikan dari (atau kurang diwakili oleh) partai yang semakin terlibat dalam pembuatan keputusan secara online. Karena partisipasi online dapat dimanipulasi, partai harus merangkul bentuk etis partisipasi dalam jaringan (*online*) bersamaan dengan merawat relasi di luar jaringan (*offline*).

Pembuatan keputusan yang deliberatif

Sebagaimana dirinci dalam Portal Digital Partai International IDEA, partai politik di negara demokrasi mapan maupun demokrasi berkembang mengadopsi teknologi baru untuk menjangkau anggota dan bukan anggota untuk membantu melaksanakan tugas-tugas partai tradisional seperti perumusan

kebijakan daring, pemungutan suara dan penggalangan dana (International IDEA, tanpa tanggal). Perangkat lunak demokrasi seperti Agora Voting atau DemocracyOS, memungkinkan kelompok besar warga negara mendaftarkan proposal, dan berdiskusi serta memberikan suara secara daring.

Akan tetapi, ada risiko serius dalam penggunaan teknologi komunikasi oleh partai politik. Pada Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2016 dan Pemilihan Presiden Perancis 2017, akun email politisi senior diretas dan dibocorkan ke media. Karena keamanan siber partai politik dan kandidat seringkali berada di luar mandat otoritas elektoral, para aktornya seringkali dipandang sebagai bagian dari mata rantai terlemah dalam melindungi pemilu dari peretasan. Kedua, media sosial dan media digital lainnya semakin digunakan untuk menyebarkan informasi yang salah. Pada tahun 2016, pemilu presiden Amerika Serikat dan referendum Brexit dipengaruhi oleh kesalahan informasi yang berasal dari – atau didukung oleh – partai politik dan calon.

Partai politik seharusnya menggunakan teknologi untuk memfasilitasi fungsi-fungsi mereka, bukan untuk menggantikan perdebatan substantif dan interaksi tatap muka. Mereka harus memberikan perhatian yang sama pada inovasi luring yang menstimulasi keterlibatan warga negara dalam rangka menghindari kesenjangan digital yang berkembang.

Instrumen demokrasi langsung

Para pemimpin baru-baru ini menyerahkan beberapa keputusan kepada warga negara. Ada sedikit peningkatan penggunaan instrumen demokrasi langsung secara global sejak tahun 1975 (indeks GSoD 2017: 5.3). Antara tahun 2015 dan 2017 negara-negara yang beragam seperti Kolombia, Tanjung Gading, Hungaria, Italia, Belanda, Sudan, Swiss, Inggris, Tajikistan, Turki, Venezuela dan Zambia menggunakan referendum untuk mengambil keputusan. Pertanyaan referendum ada pada kisaran masalah yang meliputi reformasi keuangan, kemerdekaan, keanggotaan Uni Eropa (atau aspek integrasi), perdagangan internasional, imigrasi, pajak, hak-hak sipil dan politik, perjanjian damai, serta reformasi politik dan elektoral.

Referendum dapat mengarah menjadi kekecewaan warga negara karena banyak instrumen demokrasi langsung seringkali digabungkan dalam istilah “referendum” yang mencakup semua. Dalam praktiknya, beberapa merupakan inisiatif warga negara, sedangkan yang lainnya merupakan referendum yang

diinisiasi oleh pemerintah. Beberapa referendum merupakan pilihan, dan yang lainnya wajib. Beberapa referendum bersifat saran, sementara yang lainnya mengikat; beberapa memiliki ambang batas yang tinggi, dan yang lainnya rendah. Semua faktor desain ini mempengaruhi bagaimana politisi menafsirkan dan mengikuti hasil referendum. Terdapat kebutuhan umum untuk memperkuat pemahaman publik mengenai mandat terperinci atas sebuah referendum untuk menghindari kekecewaan atas hasilnya. Banyak referendum juga memiliki hasil yang tidak diduga. Pada tahun 2016, perdana menteri di Italia dan Inggris mengikat masa depan politik mereka secara langsung pada referendum tentang masalah yang lain. Akhirnya, politisi terpilih dapat menggunakan referendum secara strategis untuk memajukan agenda politik mereka. Sebagai contoh, partai dapat menginisiasi referendum opsional untuk mengeluarkan isu yang kontroversial dari kampanye pemilu, atau untuk menunjukkan dukungan rakyat untuk suatu posisi pemerintahan.

Masa depan seperti apa yang dimiliki referendum di negara demokrasi mapan? Banyak gerakan politik baru, dan bahkan beberapa partai mapan, sekarang secara terbuka berkampanye untuk memperkenalkan referendum wajib dalam upaya mendapatkan kembali kepercayaan warga negara. Swiss memberikan contoh yang baik mengenai bagaimana perwakilan dan demokrasi langsung saling mendukung. Untuk menghindari kekecewaan warga negara terhadap hasil referendum, politisi seharusnya lebih jelas memaparkan kewenangan pembuatan keputusan secara langsung yang diserahkan kepada warga negara, dan kewenangan yang tetap ada pada politisi terpilih. Dalam praktiknya, mereka seyogianya menghindari memperlakukan referendum bersifat saran sebagai mengikat secara *de facto*, atau mengadopsi sebuah kebijakan berdasarkan sebuah referendum dengan partisipasi di bawah ambang batas karena oportunistik politik. Terakhir, politisi harus menyadari bahwa penggunaan referendum secara taktis bisa mendelegitimasi demokrasi perwakilan dan secara politik bisa berisiko.

Peningkatan protes menantang akuntabilitas lembaga perwakilan. Sejumlah protes di beberapa tahun terakhir telah menjadi berita utama di seluruh dunia. Nama mereka merujuk pada lapangan yang mereka duduki (Tahrir di Kairo, Taksim di Istanbul, Euromaidan di Ukraina) atau warna dan simbol yang menolong mengikat mereka (payung kuning pada protes Hongkong 2014, topi merah muda dalam Women's March 2017). Protes semakin menjadi bentuk yang kian populer dan sah untuk mengungkapkan pendapat politik, khususnya ketika demokrasi semakin berkembang.

Ketika 59 protes besar berlangsung secara global pada tahun 2006, 112 protes terjadi di paruh pertama tahun 2013 (Ortiz *et al.* 2013). Gerakan protes yang signifikan terjadi di 56,4 persen negara dari tahun 2009 hingga 2014 (EIU 2015). Database Global tentang Proyek Peristiwa, Bahasa, dan Suara mencatat kenaikan intensitas protes pada kurun waktu tahun 2012 dan 2015 hingga tingkat yang sama dengan akhir 1980-an (World Economic Forum 2016). Membandingkan data dari indeks GSoD International IDEA dengan data tentang partisipasi warga negara melalui petisi, boikot, demonstrasi, mogok dan bentuk protes lainnya dari tahun 2010–2014 gelombang World Values Survey menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat hak sosial dan kesetaraan yang lebih tinggi juga mempunyai rakyat yang lebih aktif protes.

Tanggapan partai yang tangguh

Agar tetap relevan, partai politik harus menunjukkan pembaruan penekanan atas keterlibatan warga negara. Warga negara tidak hanya objek rayuan politik (misalnya untuk mendapatkan suara yang diperlukan untuk memenangkan jabatan politik); mereka merupakan target akhir. Partai yang tangguh membuat keseimbangan yang hati-hati antara memberikan kepada warga negara peran sentral dalam kegiatan dan keputusan internal partai, di satu sisi, dan menjadikan warga negara tujuan tindakan kebijakan mereka, di lain sisi.

Memberikan hasil memerlukan lebih dari sekadar keputusan-keputusan teknokratik. Partai yang mengejar tujuan politik yang koheren mungkin lebih mampu berurusan dengan krisis pemerintahan yang kompleks. Sama pentingnya, partai yang berhasil memiliki platform program pembeda dan bisa secara kredibel berkomunikasi dengan pemilih melalui pemimpin yang tegas, cerdas, dan dapat dipilih. Pemimpin yang sukses mampu menjelaskan masalah-masalah dan kebijakan yang kompleks kepada pemilih dan mengambil tanggung jawab untuk melaksanakannya. Mereka juga dapat membangun koalisi pendukung yang luas dengan kelompok-kelompok dalam masyarakat dengan menyentuh konstituensi dan agenda mereka, dan menarik anggota yang berpikiran sama melalui demokratisasi proses pembuatan keputusan internal partai (Valladares, Sample dan van der Staak 2014).

Partai populis berkembang dalam kekosongan kebijakan, ketika partai tradisional membiarkan mereka untuk menawarkan narasi satu sisi (populis). Dengan terlibat bersama warga negara, partai tradisional dapat menghancurkan kekosongan kebijakan dan menawarkan alternatif yang menarik. Beberapa partai politik mapan mengadopsi ciri-ciri dan praktik lawan

populisnya yang berhasil. Partai tradisional menjadi paling efektif ketika bisa menggabungkan kekuatan mereka dalam merumuskan kebijakan publik dan merekrut pemimpin politik baru yang punya kapasitas untuk memobilisasi warga negara dan mengartikulasikan kepentingan mereka dalam istilah yang jelas dan berani. Untuk merawat dukungan warga negara dalam jangka panjang, partai harus menyeimbangkan cara tradisionalnya dengan pendekatan-pendekatan inovatif untuk berinteraksi dengan dan mewakili jenis baru warga negara yang aktif.

Partai politik lebih mampu mempertahankan kepercayaan warga negara dengan mengkomunikasikan agenda integritas yang komprehensif. Berfokus hanya pada pendanaan partai politik dan pendanaan kampanye telah gagal melindungi politik dari korupsi yang disebabkan oleh jaringan yang kompleks dan peran uang dalam politik (OECD 2016). Sistem yang holistik dan meningkatkan integritas – yang mengkoordinasikan kerangka kerja lintas wilayah kebijakan yang berbeda seperti pengadaan, konflik kepentingan dan keuangan partai – meningkatkan ketahanan, yang melindungi kebijakan publik dan negara dari kepentingan ekonomi sempit. Para pemimpin yang dapat dipercaya bisa menunjukkan rekam jejak yang bersih dan berkomitmen secara kredibel untuk melaksanakan aturan dan praktik berorientasi integritas yang diterapkan di dalam partai mereka dan dalam pemerintahan.

Meningkatkan inklusivitas partai – khususnya perempuan dan pemuda – juga dapat memperbaiki kepercayaan. Untuk tetap kompetitif, pimpinan partai seharusnya menjangkau kedua kelompok itu dan memastikan mereka secara setara dilibatkan ke dalam proses demokrasi di internal partai dan proses pengambilan keputusan. Partai juga seharusnya memiliki seksi khusus dan kaukus perempuan dan pemuda, memperkenalkan penggunaan peralatan keterlibatan digital, meningkatkan keseimbangan gender dalam kepemimpinan dan menggunakan daftar pendek calon yang semuanya perempuan.

Pilihan kebijakan dan rekomendasi untuk mengatasi tantangan sifat partisipasi politik

Partai politik

- Komunikasi visi politik yang kuat dan berani.
- Menciptakan bentuk-bentuk alternatif keterlibatan warga negara melalui bentuk keanggotaan alternatif.

- Tetap responsif kepada pemilih di antara pemilu dengan memikirkan kembali strategi komunikasi partai, dan memutakhirkan budaya internal partai dan struktur operasional untuk menyesuaikan dengan meningkatnya interaksi daring dan interaksi berbasis jalanan dan pembuatan keputusan.
- Mendorong suasana pluralisme dan inklusivitas di dalam partai dengan melibatkan dan membangun hubungan dengan berbagai macam organisasi sosial, gerakan sosial dan kelompok kepentingan yang sesuai secara ideologi.
- Mengatasi ketidakpercayaan publik dengan menjanjikan transparansi penuh keuangan partai, pengaturan konflik kepentingan secara ketat, dan melaksanakan kebijakan anti-korupsi dan mekanisme demokrasi internal partai.
- Memastikan bahwa para pemimpin dan perwakilan yang dipilih secara demokratis mencerminkan demografi masyarakat dengan melakukan mentoring dan merekrut lebih banyak perempuan dan pemuda ke dalam peran kunci yang mengarah pada posisi kepemimpinan.
- Mempertimbangkan dengan saksama penggunaan perangkat demokrasi langsung seperti referendum, dan memperkuat pemahaman publik mengenai mandat referendum yang pasti.
- Memperluas keterlibatan warga negara di semua tingkatan dengan menggunakan peralatan digital seperti website dan aplikasi interaktif. Hal ini termasuk menjangkau para anggota dan bukan anggota untuk membantu dalam melaksanakan tugas-tugas partai tradisional seperti perumusan kebijakan secara daring, pemungutan suara, dan penggalangan dana.
- Meningkatkan transparansi mengenai perwakilan yang dipilih, termasuk menyediakan akses pada data pendanaan kampanye politik juga kepentingan keuangan perwakilan partai.
- Memastikan bahwa segmen masyarakat yang lebih luas dipilih dan dilibatkan, dengan fokus khusus pada perempuan dan pemuda. Pertimbangkan untuk memperkuat pendidikan kewarganegaraan dan menurunkan usia pemilih.

Masyarakat Sipil

- Terlibat bersama partai politik untuk menerjemahkan tekanan publik ke dalam kebijakan, dan terlibat dengan cabang-cabang legislatif dan eksekutif dari pemerintahan melalui partai politik.
- Menyerukan lebih banyak transparansi dan perdebatan demokratis yang konstruktif.

Bab 5. Uang, Pengaruh, Korupsi dan Pembajakan Kebijakan: Dapatkah Demokrasi Dilindungi?

Skandal korupsi mempengaruhi persepsi terhadap politik demokrasi. Hal tersebut membahayakan kepercayaan warga negara pada partai politik, politisi dan lembaga-lembaga, serta memicu protes dan kemarahan yang mendalam. Orang seringkali menghubungkan politik dengan korupsi dan memperkaya diri sendiri (Edelman Insights 2013). Bahkan ketika uang digelontorkan secara legal ke dalam politik, pengaruh yang tidak proporsional yang dimiliki pendonor besar atas pembuatan keputusan publik memperburuk persepsi tentang politik yang pada dasarnya sudah terkikis. Bahwa uang merupakan sumber yang penting untuk berkomunikasi dengan konstituen, menjalankan kampanye pemilu dengan sukses, memperkuat organisasi politik, mendukung penelitian kebijakan atau pelatihan anggota partai, bisa dilupakan atau rusak ketika skandal politik melanda publik.

Kemunculan uang besar dalam politik menimbulkan risiko bagi semua politisi. Hal ini merupakan salah satu ancaman yang paling kritis bagi ketahanan lembaga-lembaga perwakilan, terutama partai politik. Terdapat tiga tantangan yang saling berhubungan: tidak samanya akses menuju pendanaan yang mengurangi peluang yang sama dalam kompetisi politik, pendanaan politik yang seringkali berfungsi sebagai saluran bagi korupsi dan pembajakan kebijakan, serta uang dalam politik yang mempengaruhi kepercayaan publik terhadap (dan legitimasi pada) politik dan politisi.

Melemahkan tingkat lapangan permainan yang setara

Uang mendukung terjadinya partisipasi politik, karena membantu kandidat dalam suatu pemilihan untuk menjangkau konstituen, menyebarkan gagasan dan mengorganisasi pendukung. Hal ini sangat penting bagi partai baru atau mereka yang bersaing melawan petahana. Namun, uang juga bisa menjadi penghalang dengan menghambat partisipasi yang adil bagi mereka yang punya keterbatasan akses keuangan. Ketika biaya untuk berkompetisi dalam politik tinggi, akses untuk mendapatkan dana membatasi siapa yang bisa berkompetisi. Sebagai contoh, rata-rata pengeluaran nasional untuk calon anggota parlemen di pemilu India tahun 2014 adalah 50 kali produk domestik bruto (PDB) per kapita. Masalah ini lebih akut bagi perempuan, pemuda, dan kelompok minoritas, yang

seringkali menjadi bagian dari jejaring penggalangan dana yang lebih sedikit. Penelitian dari Kolombia, Kenya dan Tunisia sudah memastikan kecenderungan ini: ketika calon diharapkan mendanai kampanyenya sendiri, perempuan memiliki lebih sedikit akses ke jaringan pendanaan, menerima lebih sedikit dukungan keuangan dari partainya, dan memiliki lebih sedikit aset ekonomi untuk diinvestasikan dalam kampanye.

Para pelaku yang melawan hukum juga dapat membeli suara dan menggunakan uang untuk melanggengkan sistem patronase dan klientelistik (Briscoe dan Goff 2016a: 42; World Bank 2017: 78). Sistem patronase memberikan hadiah kepada pendukung berupa pekerjaan atau manfaat pemerintahan karena afiliasi atau koneksi mereka, tanpa mempertimbangkan kualifikasi. Dalam sistem klientelistik, pemilih didorong untuk menukar dukungan politik mereka dengan bantuan-bantuan (Falguera, Jones dan Ohman 2014). Hal ini merongrong pelayanan sipil berbasis-jasa, dan menyandera pejabat pemerintah untuk kepentingan jaringan ini. Dengan demikian uang melemahkan mayoritas dengan memberikan peluang yang lebih besar kepada sedikit aktor yang punya pendanaan memadai.

Baik negara demokrasi yang kuat maupun rapuh memperdebatkan apa (dan bagaimana) pengaturan uang dalam politik. Beberapa negara membenarkan pengurangan

peraturan dengan argumen bahwa mereka melemahkan hak-hak asasi seperti kebebasan berpendapat dan hak partisipasi politik. Pendekatan ini pada akhirnya mengarah pada peraturan keuangan politik yang longgar (Will 2014). Pendekatan lainnya mengadvokasi penambahan peraturan dan pembatasan pembiayaan, yang mencakup pengaturan batas atas pengeluaran partai politik, implementasi langkah-langkah transparansi, dan menyediakan pendanaan publik bagi kandidat dalam pemilihan dan partai politik.

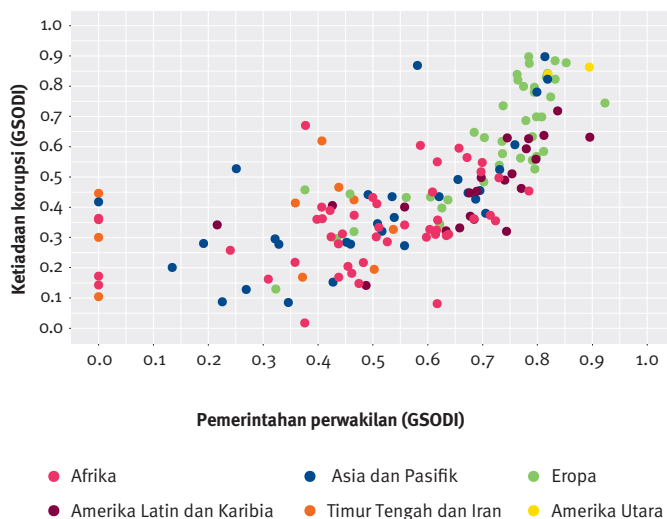
Salah satu pengaturan pendanaan politik yang paling umum adalah ketentuan pendanaan publik (Norris, van Es dan Fennis 2015); 120 negara memberikan pendanaan publik secara langsung kepada partai politik baik untuk kampanye maupun secara reguler (Skaaning 2017). Di semua negara OECD kecuali Swiss, partai politik menerima pendanaan publik secara langsung (OECD 2016). Juga ada sistem *matching* (pemadanan), seperti di Jerman, di mana dana negara disalurkan sesuai dengan kapasitas partai untuk menarik sumbangan-sumbangan pribadi skala kecil (Casas-Zamora dan Zovatto 2016: 31–32).

Pendanaan publik bisa membantu menyetarakan tingkat lapangan permainan, misalnya dengan mengurangi ketergantungan pada pendanaan swasta dan menyediakan dana bagi partai oposisi. Sumber daya negara kepada partai politik bisa digunakan untuk menghasilkan keseimbangan gender yang lebih besar dalam partisipasi politik atau mendukung mobilisasi pemuda. Akan tetapi, dana seringkali diberikan berdasarkan hasil pemilu sebelumnya, yang lebih menguntungkan partai-partai mapan daripada pendatang baru atau partai kecil. Jika partai dipandang memboroskan uang pembayar pajak, publik bisa lebih kehilangan kepercayaan pada mereka. Jika pendanaan publik disediakan, tapi pendanaan swasta tidak terbatas, jumlah pengeluaran keseluruhan bisa naik dan donor yang kaya akan memelihara pengaruhnya atas politisi. (Casal Bértoa *et al.* 2014: 355–75). Tingkat pendanaan publik juga harus cukup tinggi agar bisa berdampak. Jadi keseimbangan harus dicapai antara pendanaan publik dan swasta dalam upaya membatasi efek buruk uang dalam politik (Dewan Eropa 2001).

Lebih lanjut, adalah penting untuk membatasi harapan mengenai apa yang dapat dicapai melalui pendanaan publik. Sekalipun hal ini mungkin merupakan cara yang penting untuk mendorong partisipasi politik perempuan dan kelompok marjinal, pendanaan publik mungkin hanya memberi dampak terbatas terhadap upaya menyeluruh mengendalikan korupsi

GAMBAR 5.1

Pemerintahan Perwakilan dihubungkan dengan ketiadaan korupsi, 2015



Catatan: Grafik ini menunjukkan hubungan antara pemerintahan perwakilan dengan ketiadaan korupsi. Baik atribut pemerintahan perwakilan maupun subatribut ketiadaan korupsi diberi skala dari 0 hingga 1; skor yang lebih tinggi menunjukkan tingkat pemerintahan perwakilan yang lebih tinggi dan ketiadaan korupsi yang lebih tinggi, secara berturut-turut. Hasil koefisien korelasi Pearson: $n = 153$, $r = .671$, $p\text{-value} < .005$.

Sumber: Indeks GSOD 2017 (Indeks Ketidadaan Korupsi dan Indeks Pemerintahan Perwakilan).

Korupsi dan pembajakan kebijakan

Ada begitu banyak cara di mana kekuasaan dan sumber daya keuangan bisa disalahgunakan dalam politik, yang mempengaruhi baik negara demokrasi kuat maupun rapuh (Stiglitz 2013). Korupsi dan pembajakan kebijakan – ketika kepentingan swasta dan bukan kepentingan publik yang menentukan kebijakan (Warren 2003) – adalah risiko yang lazim.

Pada umumnya, pemerintahan yang lebih demokrasi, lebih baik dalam mengendalikan korupsi. Ketika pengenalan pemilu semata bisa memicu korupsi, korupsi menurun ketika kualitas pemilu meningkat dan ketika pengawasan lain dalam masyarakat dan negara mulai mengakar, seperti kebebasan berpendapat dan berserikat, dan kontrol yudisial (McMann *et al.* 2017; Rothstein dan Holmberg 2014: 33). Hubungan antara pemerintahan perwakilan dan ketiadaan korupsi tampaknya menguatkan korelasi positif itu (lihat Gambar 5.1).

Aliran sumbangan yang besar juga dapat mendorong pembajakan kebijakan. Politisi yang kurang mapan secara

finansial mungkin perlu mencari pembiayaan dari donor eksternal, kadang-kadang melalui cara yang melawan hukum, termasuk dari para penjahat terorganisasi (Briscoe, Perdomo dan Uribe Burcher 2014; Briscoe dan Goff 2016b). Para aktor tersebut bisa tersandera oleh kepentingan dan agenda para donor mereka sendiri. Jika mereka tidak bisa menemukan pendanaan tambahan, seorang politisi tidak mungkin bisa berdiri sebagai seorang calon yang layak. Pandangan ini memicu sentimen bersama bahwa demokrasi dilemahkan karena individu berpendapatan tinggi dapat memiliki pengaruh yang jauh lebih besar atas pilihan politisi dan kebijakan melalui sumbangan dan lobi, yang pada akhirnya merusak penyampaian dan akuntabilitas negara yang efisien bagi mayoritas (Reitano and Hunter 2016). Pembajakan keputusan bahkan dapat mengarah pada kekerasan di mana mereka yang berkuasa berupaya mempertahankannya dengan menekan lawan secara paksa (Perdomo dan Uribe Burcher 2016).

Globalisasi telah memfasilitasi pergerakan transaksi perbankan internasional dan memperkuat korporasi internasional, yang mengaburkan struktur kepemilikan dan kepentingan dalam mempengaruhi politik nasional dan lokal. Anak perusahaan multinasional seringkali menanamkan akar mendalam di masyarakat, menyediakan lapangan kerja dan, dalam beberapa kasus, bahkan menyampaikan program sosial jangka panjang. Hal ini menciptakan jaringan hubungan dan kepentingan yang kompleks, serta mengaburkan batas antara kontrol luar negeri dan nasional.

Pembatasan atau larangan bagi sumbangan asing kepada partai politik dan calon dalam pemilihan merupakan peraturan umum untuk mengendalikan pengaruh kepentingan luar negeri dalam politik; negara-negara seringkali memberlakukan langkah-langkah itu untuk melindungi kedaulatan mereka. Memang, 63,3 persen negara melarang sumbangan dari kepentingan luar negeri untuk partai politik, dan 48,9 persen melarang sumbangan asing kepada calon (Skaaning 2017).

Meskipun larangan atau pembatasan sumbangan sudah umum dalam pengaturan pendanaan politik, banyak skema digunakan untuk menghindari pembatasan tersebut (OECD 2016). Panama Papers, misalnya, telah menunjukkan bahwa uang dari berbagai sumber mempengaruhi politik di berbagai penjuru dunia (The Guardian 2016).

Sumbangan politik, korupsi dan pembajakan kebijakan tampak berjalanan dalam industri ekstraktif (khususnya

minyak, gas dan eksploitasi hutan), dan dalam kegiatan pemerintahan seperti pengadaan publik dan penyediaan layanan (misal air dan pendidikan) (OECD 2016). Negara-negara yang bergantung pada rente sumber daya alam sebagai sumbangan yang penting bagi PDB mereka cenderung menunjukkan tingkat korupsi yang lebih tinggi (International IDEA 2017b; World Bank 2016). Perusahaan multinasional seringkali menekan otoritas di negara-negara yang kaya sumber daya alam untuk mengadopsi peraturan yang longgar untuk industri ekstraktif (Moore dan Velasquez 2012).

Jurnalis investigatif memainkan peranan yang penting dalam mengungkap skandal, yang penting untuk mengendalikan korupsi dan pembajakan kebijakan. Berdasarkan data indeks GSoD, situasi global akhir-akhir ini terkait kebebasan berekspresi dan integritas media mengkhawatirkan. Meskipun ada capaian-capaian di seluruh dunia dalam aspek integritas media dari pertengahan 1970-an hingga pertengahan 1990-an, tren ini stagnan hingga tahun 2012. Sejak saat itu, situasi memburuk, terutama terkait dengan kebebasan berekspresi di Eropa, Timur Tengah dan Iran, serta Amerika Utara.

Kurangnya kepercayaan pada politik dan politisi

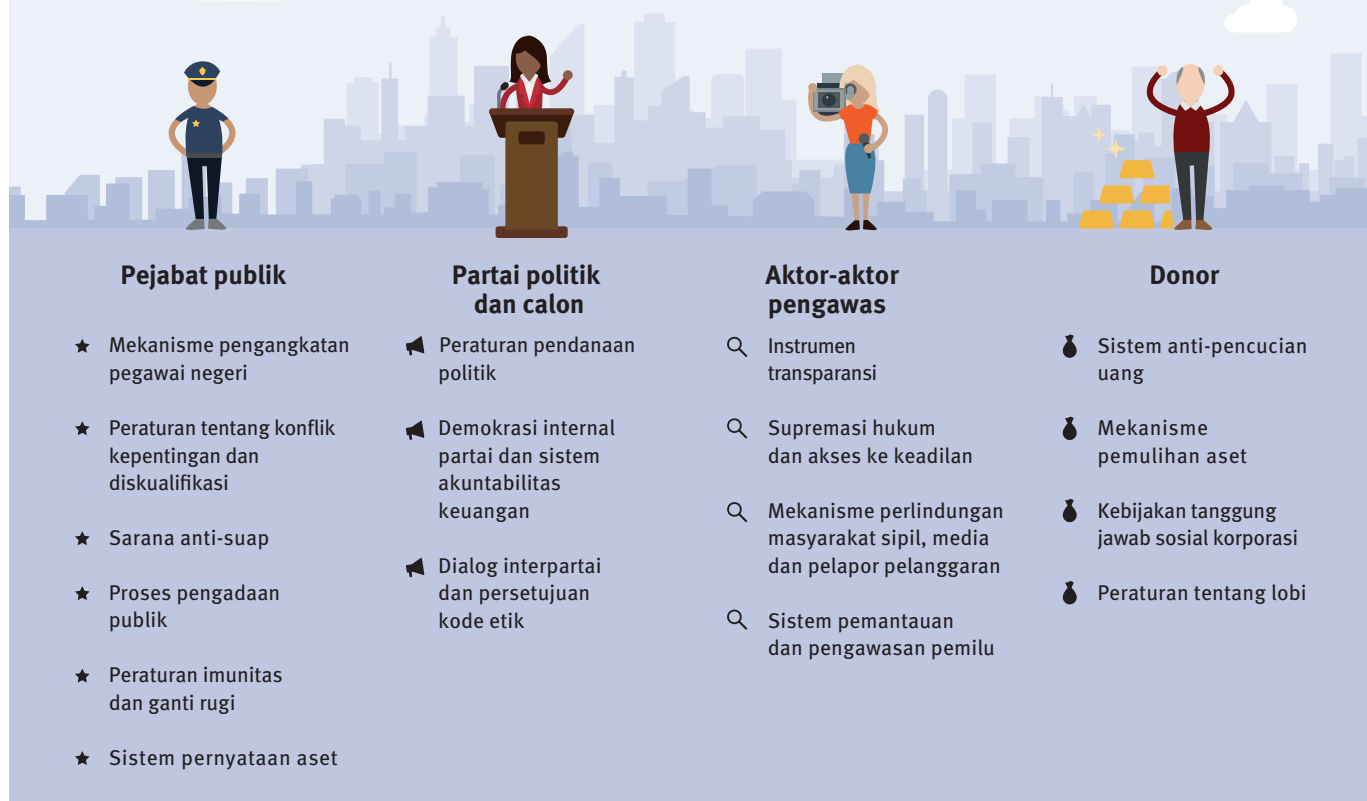
Korupsi dan pembajakan kebijakan pada umumnya mempengaruhi kepercayaan warga pada politisi, yang pada gilirannya secara negatif mempengaruhi partisipasi politik lebih luas (Arkheide Olsson 2014). Data indeks GSoD International IDEA menunjukkan bahwa kedua hal tersebut cenderung terkait dengan Amerika Latin dan Karibia, dan pada tingkat yang lebih rendah, di Afrika. Kecenderungan ini juga terdapat di Eropa, tapi terutama di negara-negara dengan tingkat korupsi rendah. Akan tetapi, di Asia dan Pasifik, kepercayaan pada politisi tampaknya tidak didorong oleh persepsi korupsi.

Hilangnya kepercayaan pada politisi sangat akut di kalangan pemuda; di hampir 60 persen negara yang disurvei pada tahun 2010–2014, pemuda memiliki kepercayaan yang lebih rendah kepada partai politik jika dibandingkan dengan orang yang lebih tua (OECD 2015b). Sentimen ini sangat berbahaya bagi demokrasi, karena mereka dapat membentuk sikap sosial jangka panjang terhadap lembaga-lembaga ini.

Keterbatasan kerangka kerja hukum pendanaan politik

Terdapat banyak peraturan pendanaan politik yang berupaya membatasi dampak uang dalam politik. Pendanaan publik

Uang dalam politik: sistem yang meningkatkan integritas



merupakan salah satu bentuk pembatasan yang paling umum, dan seringkali bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pendanaan swasta, menyediakan dana bagi partai politik, dan memajukan keseimbangan gender yang lebih besar dalam partisipasi politik atau mendukung mobilisasi pemuda. Pembatasan atau larangan sumbangan kepada partai politik dan kandidat juga umum, khususnya yang melarang sumbangan luar negeri.

Sayangnya, hal ini dan peraturan pendanaan politik lainnya memiliki kelemahan yang inheren. Sebagai contoh, seringkali ada harapan bahwa peraturan pendanaan politik punya dampak yang lebih terlihat dan luas dalam mengendalikan korupsi dan pembajakan kebijakan. Namun, langkah seperti pengungkapan sumbangan kampanye dan pendanaan publik hanya punya sedikit dampak positif dalam membatasi korupsi.

Banyak peraturan pendanaan politik memiliki celah. Dalam beberapa contoh badan-badan pengawas mengumpulkan data pengungkapan aset dari pejabat publik di cabang eksekutif, tapi kemudian gagal untuk mengaudit atau menelaah akurasinya. Di kasus lainnya, keharusan

melapor dana dibatasi pada periode kampanye yang resmi, mengecualikan uang yang dibelanjakan sebelum waktu ini. Masalah lain adalah bahwa peraturan keuangan politik seringkali fokus pada politik tingkat nasional, walaupun banyak korupsi terjadi di tingkat lokal. Dalam banyak kasus peraturan, seperti larangan dan pembatasan sumbangan, dapat dielakkan dengan menyamakannya sebagai iuran atau pinjaman keanggotaan, atau dengan mentransfernya melalui pihak ketiga, sebagaimana dilakukan di Amerika Serikat, melalui Komite Aksi Politik (*Political Action Committees*).

Peraturan pendanaan politik dapat memiliki kelemahan tergantung pada tipe mekanisme akuntabilitas yang digunakan. Sanksi merupakan instrumen utama yang digunakan untuk mempertahankan akuntabilitas aktor politik, sedikit penekanan diberikan pada mekanisme penghargaan dan pembelajaran. Denda, perampasan uang atau properti, dan penjara merupakan hukuman yang paling umum, dan sanksi yang tidak terlalu umum mencakup hilangnya pendanaan publik, penangguhan pendaftaran partai politik dan larangan ikut serta dalam pemilu berikutnya. Sebagian besar sanksi diarahkan pada

perseorangan, yang menempatkan sedikit tanggung jawab bagi penegakan hukum atas partai, serta denda cenderung rendah dibandingkan dengan keuntungan yang didapat dari korupsi.

Respon yang holistik, berorientasi keadilan, dan meningkatkan integritas

Peraturan pendanaan politik semata tidak dapat membatasi akses kepentingan pribadi ke kekuasaan politik. Upaya-upaya reguler harus mencakup keseluruhan siklus politik, terutama melalui mekanisme peningkatan integritas untuk kompetisi politik. Mekanisme ini meliputi perangkat-perangkat inovatif untuk memerangi korupsi, mengedepankan transparansi, dan melindungi serta memperbaiki pengawasan negara dan politik. Hal tersebut harus difokuskan pada wilayah-wilayah yang paling rawan korupsi, seperti konflik kepentingan, aktivitas melobi, aturan kerahasiaan bank dan pajak, norma-norma imunitas parlemen, perlindungan bagi pelapor pelanggaran dan kebebasan pers. Terlebih lagi, mekanisme ini harus melibatkan berbagai aktor, seperti pejabat publik, partai politik dan calon dalam pemilihan, aktor pengawas dan donor swasta.

Terdapat empat wilayah tindakan utama untuk mengurangi dampak negatif uang dalam politik sebagai bagian perlawanan yang lebih luas terhadap korupsi dan pembajakan kebijakan. Hal ini di antaranya, meliputi sistem yang meningkatkan integritas yang dapat diadopsi negara melalui legislasi, peraturan atau kode etik.

Pilihan kebijakan dan rekomendasi untuk mengatasi tantangan uang dalam politik

Semua aktor

- Adopsi sistem yang mempromosikan integritas politik, pembuatan kebijakan dan pelayanan negara melalui koordinasi antara legislatif dan lembaga publik serta swasta untuk memerangi korupsi, memajukan pendidikan kewarganegaraan dan kesadaran atas integritas politik, melindungi dan mendukung pengawasan negara dan politik, serta mencegah pembajakan kebijakan.
- Targetkan mekanisme internasional yang memfasilitasi korupsi politik dan aliran uang transnasional yang melanggar hukum melalui (dan ke dalam) politik.
- Promosikan dan dukung mekanisme pengawasan yang mandiri untuk melaksanakan peraturan anti-korupsi dan pendanaan politik, termasuk hak untuk mengakses informasi.

- Buat badan-badan pengawas bisa memenuhi peran mereka secara mandiri, dengan sumber daya yang memadai, perangkat hukum dan kewenangan pengendalian, serta memastikan adanya langkah-langkah perlindungan pelapor pelanggaran.
- Eksplorasi penggunaan teknologi baru dan interkonektivitas untuk memonitor transparansi politisi dan pelaku bisnis, seperti platform urundaya (*crowdsourcing*) yang memfasilitasi sumbangan kecil serta sarana media sosial untuk pelaporan dan pengawasan.

Pemerintahan

- Menerapkan kebijakan dan norma yang mencegah dan mendeteksi pencucian uang, khususnya dalam hubungannya dengan orang yang terpapar secara politik serta penyitaan aset.
- Memungkinkan badan-badan pengawas yang bertugas mengendalikan kontrak publik, konflik kepentingan, sistem diskualifikasi, pendanaan politik, dan norma-norma umum antikorupsi untuk berkolaborasi dan berbagi informasi dengan lembaga keuangan dan otoritas lainnya.
- Sesuaikan perundang-undangan untuk mencegah pembajakan kebijakan dan korupsi serta menghindari rezim khusus dan pengecualian-pengecualian atas peraturan.
- Adopsi mekanisme sanksi, penghargaan, dan pembelajaran, serta pencegahan untuk memajukan akuntabilitas partai.
- Tingkatkan dan promosikan peraturan-peraturan yang bertujuan menyetarakan “lapangan permainan” antara laki-laki dan perempuan, seperti mengaitkan ketentuan untuk pendanaan publik dan manfaat keuangan lainnya bagi kesetaraan gender di antara para calon.
- Fasilitasi, promosikan dan lindungi pekerjaan jurnalis dalam melawan korupsi.

Partai politik

- Adopsi kode etik yang mempromosikan pengendalian dan akuntabilitas yang lebih baik dari perwakilan partai politik yang difokuskan pada mekanisme pembuatan keputusan dan prosedur demokrasi internal partai.
- Kode etik harus meliputi mekanisme anti-korupsi seperti pernyataan aset dari perwakilan partai dan norma-norma tentang konflik kepentingan.
- Laksanakan mekanisme transparansi yang melampaui persyaratan hukum pendanaan politik dengan mempublikasikan data keuangan terinci, mempublikasi-

kan aset pengurus partai, dan melaksanakan kegiatan akuntabilitas yang berinteraksi dengan konstituen dan organisasi masyarakat sipil.

Masyarakat sipil dan media

- Pantau peran negatif uang dalam politik dengan membahas semua cara yang mungkin dilakukan untuk menyamarkan uang, dengan memfokuskan pada pelacakan kontrak publik, pengangkatan pejabat publik, konflik kepentingan, kemandirian badan-badan pengawas dan ketidaksetaraan gender dalam mengakses pendanaan politik.
- Menuntut pendekatan terkoordinasi dan holistik untuk memerangi korupsi dan pembajakan kebijakan negara yang memajukan integritas dalam politik. Pemilik media, asosiasi profesional dan serikat pekerja harus melobi pemerintah dan parlemen untuk mengadopsi—dan mematuhi norma-norma internasional dan regional tentang hak atas akses informasi, kebebasan berekspresi dan pembangunan opini, dalam kepatuhan terhadap Agenda 2030

mengenai Pembangunan Berkelanjutan, khususnya Target ke-16, yang meliputi mengurangi korupsi dan memastikan akses publik terhadap informasi.

- Bekerjasama dengan media lainnya tentang topik-topik sensitif, berbagi informasi dan menerbitkan cerita secara bersamaan, untuk menyebarkan risiko terhadap wartawan perseorangan sambil memungkinkan reporter meliput topik yang berbahaya. Saluran-saluran ini juga seharusnya menyediakan staf dan tenaga lepas dengan pelatihan keamanan pencegahan dan wawancara pasca-penugasan.

Organisasi Regional

- Pertimbangkan untuk memperkenalkan sistem penelaahan sejawat yang meliputi pemantauan peraturan pendanaan politik dan pelaksanaannya.
- Ambil inspirasi dari praktik yang baik seperti Kelompok Negara melawan Korupsi (*Group of States against Corruption*/GRECO) dalam suatu upaya meningkatkan proses pengaturan, meningkatkan kesadaran dan meningkatkan pelaksanaan dari peraturan yang ada.

Bab 6. Mewaspada Kesenjangan: Dapatkah Demokrasi Melawan Ketidaksetaraan?

Sejak tahun 1990, hampir 1,1 miliar orang telah terangkat dari kemiskinan yang ekstrim (World Bank 2016). Secara global, langkah signifikan telah dibuat di berbagai bidang, yang meliputi kematian ibu, kematian yang diakibatkan penyakit yang dapat disembuhkan seperti polio dan malaria, kelangsungan hidup anak dan pendaftaran sekolah dasar (Gates dan Gates 2016). Subkomponen kesejahteraan dasar dari indeks GSoD International IDEA (yang memperhitungkan tingkat kematian bayi, harapan hidup, pasokan kilokalori, tingkat melek huruf dan rata-rata tahun sekolah, termasuk evaluasi ahli tentang kesetaraan akses ke pendidikan dasar dan perawatan kesehatan) mencerminkan kemajuan yang serupa. Sebagaimana ditunjukkan Gambar 6.1, terdapat peningkatan yang stabil di bidang kesejahteraan dasar di seluruh wilayah dunia sejak 1975.

Namun, pemusatan kekayaan menjadi semakin parah. Antara tahun 1988 dan 2008, 5 persen terbawah distribusi pendapatan global tidak mengalami kemajuan sama sekali, sedangkan 5 persen teratas (dan bahkan 1 persen teratas) berhasil dengan sangat baik (Paz Arauco *et al.* 2014). Semakin banyak orang miskin dan termarginalisasi, yang secara konsisten “tertinggal” (Oxfam 2017; UN 2015) dan telah dikecualikan atau diabaikan oleh kemajuan yang sedang berlangsung – bahkan di negara seperti Cina dan India, yang telah menikmati periode pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Meningkatnya ketidaksetaraan telah menjadi tantangan yang menentukan di abad ini; hal ini memiliki implikasi yang mendalam bagi kesehatan dan tingkat ketahanan demokrasi. Ketidaksetaraan dan eksklusi sangat mengecilkan peluang generasi muda untuk terlibat secara ekonomi, sosial dan politik, serta untuk melaksanakan (atau bahkan mengamankan) kewarganegaraan sepenuhnya. Ketidaksetaraan juga sangat membatasi mobilitas sosial –prospek yang selama masa hidup, seorang pemuda akan dapat bekerja dengan cara mereka untuk meraih kondisi perekonomian yang lebih baik. Kerugian tersebut dapat diabadikan dari generasi ke generasi.

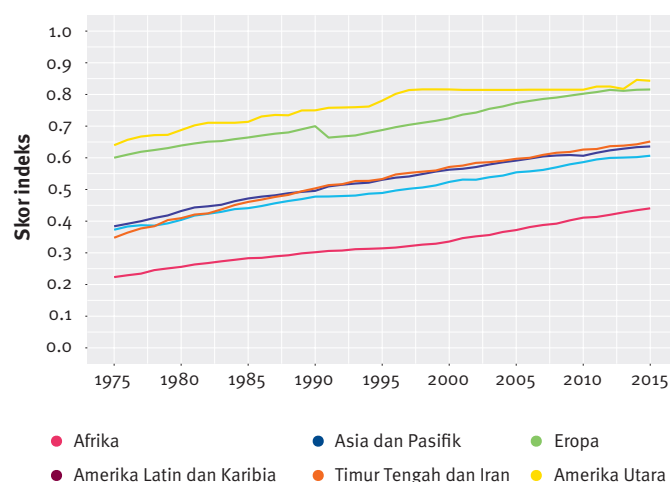
Mendefinisikan ketidaksetaraan

Ketidaksetaraan merupakan fenomena individual maupun kolektif; ia berada di antara perseorangan dan rumah tangga,

juga di antara kelompok sosial. Oleh karena itu, ia bersifat ekonomi, politik, sosial dan budaya, dan dibentuk melalui suatu proses interaksi dan kontestasi yang dinamis antara

GAMBAR 6.1

Kesejahteraan Dasar: tren regional, 1975–2015



Catatan: Grafik ini menunjukkan perkembangan skor subkomponen kesejahteraan dasar (sumbu y) untuk wilayah yang berbeda dari waktu ke waktu (sumbu x). Kisaran sumbu y dari 0 sampai 1; skor yang lebih tinggi menunjukkan penyediaan kesejahteraan dasar yang lebih tinggi.

Sumber: Indeks GSoD 2017 (Indeks Kesejahteraan Dasar).

negara dan masyarakat terhadap distribusi kekuasaan dan sumber daya. Pola-pola ketidaksetaraan dan pengecualian sosial bercokol dalam pengaturan institusional yang mendasarinya dan “aturan-aturan main” yang menyokong sistem sosial dan politik tertentu.

Hubungan antara ketidaksetaraan dan demokrasi sudah menjadi subjek perdebatan. Bukti kepustakaan yang ada menyatakan bahwa ketidaksetaraan tidak memiliki dampak yang jelas pada perubahan rezim: suatu rezim yang otoriter tidak akan hancur dan menjadi demokratis hanya karena ketidaksetaraan semata, dan demikian pula negara demokrasi yang sangat tidak setara juga tidak akan jatuh karena ketidaksetaraan (Knutsen 2015). Namun bagaimana kekayaan, kekuasaan dan hak istimewa didistribusikan di antara pendudukan secara fundamental mempengaruhi kualitas pemerintahan demokratis dan mengganggu kekokohan dan ketahanan sebuah negara demokrasi (Houle 2009).

Negara-negara demokrasi menghadapi tantangan yang berbeda ketika berupaya mengatasi ketidaksetaraan. Akan tetapi, berbagai faktor memungkinkan negara yang berbeda membuat sejumlah kemajuan di bidang ini dalam lingkungan demokratis. Hal ini meliputi kebijakan-kebijakan yang sehat dan inovatif yang membahas sifat interseksionalitas ketidaksetaraan, serta kapasitas negara yang diperlukan, komitmen elite, partai politik yang efektif, koalisi reformasi, mobilisasi dan gagasan dari bawah, dan pemingkiaan visi dan nasib nasional bersama. Bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi dengan penggerak dan dinamika internasional juga penting.

Ketidaksetaraan, penyediaan sosial dan penyampaian layanan

Kemampuan sebuah pemerintahan untuk menjalankan fungsi-fungsi kunci dan memberikan layanan yang diperlukan sangat penting bagi ketahanan demokrasi. Warga negara menilai kualitas demokrasi berdasarkan kemampuan negara menyediakan “barang publik” serta untuk mendorong pembangunan dan kemakmuran. Layanan-layanan, termasuk air bersih dan sanitasi, pemeliharaan kesehatan, pendidikan, jaring pengaman kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, dan keamanan serta akses ke keadilan, merupakan hubungan yang terlihat dan nyata antara negara dan rakyat. Kegagalan menyediakan layanan-layanan seperti itu melemahkan legitimasi lembaga-lembaga negara maupun dukungan bagi pemerintahan demokrasi.

Ketidaksetaraan, dan jenis eksklusi multi-dimensional yang dihasilkannya, mendistorsi ketentuan sosial bagi mereka yang mendapat manfaat dari layanan yang disediakan. Ia menciptakan jarak sosial yang besar antara kelompok-kelompok yang berbeda, meskipun jarak mereka (kadang dekat) berada pada ruang geografis yang sama, yang melemahkan prospek bagi interaksi substantif dan pengalaman bersama. Hal ini berakibat dalam sistem penyediaan sosial dan keadilan yang terfragmentasi, hanya memberikan layanan berkualitas baik kepada mereka yang bisa membayarnya (Paz Arauco *et al.* 2014). Elite sering memilih keluar dari layanan publik; mereka membangun sekolah dan rumah sakit sendiri, dan tinggal di lingkungan bertembok (Karl 2000). Mereka yang miskin dan termarginalisasi seringkali kekurangan akses pada layanan dasar, perlindungan sosial dan keadilan. Kemampuan rezim demokratis untuk melayani – baik secara ekonomi maupun sosial – tetap ambivalen.

Ketidaksetaraan dan kohesi sosial

Tatkala transisi menuju demokrasi telah terjadi dalam berbagai kondisi tanpa melihat tingkat pembangunan ekonomi, berkembang konsensus yang menganggap bahwa tingkat kemakmuran tertentu mungkin diperlukan untuk menjamin keberlangsungan dan ketahanan demokrasi (Carothers 2002; Houle 2009; Karl 2000; Rocha Menocal 2012). Akan tetapi, boleh jadi bukan tingkat kemakmuran yang penting, tetapi cara kekayaan dan kemakmuran terdistribusi di antara rakyatlah yang punya pengaruh lebih besar dalam memelihara kondisi yang sesuai bagi ketahanan demokrasi.

Ketidaksetaraan menyuburkan polarisasi sosial dan menciutkan masyarakat moderat-tengah yang vital. Ia juga mengarahkan suara dan perwakilan politik kepada siapa yang memiliki sumber daya dan kekuasaan. Hal ini menghasilkan dan melanggengkan situasi di mana para elite memiliki pengaruh yang besar atas kebijakan dan proses pembuatan keputusan, yang pada saatnya menentukan prospek pembangunan negara dan seberapa progresif dan adilnya kebijakan mereka, termasuk dalam wilayah vital kinerja negara dan penyediaan layanan sosial. Untuk jangka panjang, ketidaksetaraan bisa menciptakan ketidakseimbangan dalam suara, perwakilan, peluang dan akses yang memarginalkan segmen populasi, dan merusak kepercayaan pada (dan dukungan bagi) demokrasi.

Negara-negara demokrasi menjadi lebih tangguh dan berfungsi lebih baik ketika ikatan-ikatan kepercayaan dan timbal balik mengikat warga negara satu sama lain dan

dengan negara (World Bank 2011). Ikatan-ikatan seperti itu harus berlapis-lapis, tumpang tindih dan lintas sektoral, ketimbang didasarkan pada identitas yang lebih sempit yang menghubungkan orang-orang dalam satu dimensi kunci tunggal seperti kekerabatan, keluarga, agama atau kelas (Varshney 2001). Hal ini terutama benar di mana hubungan antara warga negara terpecah akibat konflik dan kekerasan.

Ketidaksetaraan, suara, dan perwakilan politik

Masyarakat yang dicirikan dengan ketidaksetaraan yang mengakar dan tumpang tindih bisa terpecah dan terpolarisasi, yang membuatnya sukar untuk mencapai konsensus politik bagi kebijakan sosial dan kebijakan redistribusi kemakmuran, serta menjamin jalan menuju keadilan. Di negara-negara yang beragam seperti Kolombia, Filipina, Afrika Selatan dan Amerika Serikat, ketidaksetaraan dan perbedaan dalam akses, peluang dan kekuasaan telah memungkinkan para elite untuk menggunakan pengaruh yang tidak proporsional terhadap pemerintah. Melalui pembajakan kebijakan, korupsi dan masuknya uang yang tidak terkendali ke dalam politik, beberapa orang kaya di negara-negara tersebut bisa memanfaatkan

sumber daya mereka untuk membengkokkan hukum sesuai keinginan mereka, memperlemah pengadilan, melanggar hak-hak asasi, menyuap politisi dan partai politik, mengintimidasi atau mengendalikan media, dan tidak mengindahkan konstitusi dan kontrak (Levin-Waldman 2016). Hal ini melemahkan kepentingan negara dalam (dan kapasitas untuk menyediakan) pendidikan, kesehatan, keamanan dan layanan penting lainnya yang berkualitas.

Ketidaksetaraan yang semakin mendalam, diperburuk oleh guncangan dan dislokasi yang diakibatkan oleh krisis keuangan tahun 2007–2008, telah berkontribusi pada meluasnya kekecewaan terhadap kinerja sistem politik di negara demokrasi yang lebih mapan. Ketika gerakan melintasi spektrum politik – mulai dari gerakan *Tea Party* Amerika Serikat dan gerakan “Pendudukan” (*Occupy*) di beberapa negara sampai gerakan populis anti-Uni Eropa di Perancis, Belanda dan Inggris – menggambarkan, terdapat ketidakpuasan yang mendalam terhadap kualitas perwakilan. Sentimen ini bermuara pada kekhawatiran bahwa tidak semua suara setara, dan bahwa kemapanan

Bagaimana meningkatnya ketidaksetaraan melemahkan demokrasi



Bagaimana?

- ⌞ Menurunkan kesejahteraan kaum marjinal
- ⌞ Meningkatkan kekuasaan orang kaya dan orang yang punya hak istimewa

Apa konsekuensinya?

- ⌞ Mengeksklusi kelompok-kelompok masyarakat dari proses politik
- ⌞ Penyediaan pendidikan, kesehatan dan layanan lainnya menjadi bias
- ⌞ Memperburuk ketidakpercayaan
- ⌞ Menciptakan perasaan terasing
- ⌞ Mengancam legitimasi pemerintahan
- ⌞ Dapat meningkatkan polarisasi dan kebencian
- ⌞ Dapat mengarah pada populisme
- ⌞ Dapat meningkatkan ekstremisme kekerasan
- ⌞ Dapat memicu konflik dan perang

ekonomi dan politik melanggengkan kontrol para elite yang sudah kehilangan hubungan dengan rakyat (Gershman 2016; Caryl 2016).

Ketidaksetaraan dan legitimasi lembaga politik

Tingkat kesenjangan yang tinggi bisa menempatkan pemerintahan di bawah tekanan besar dalam sebuah negara demokrasi karena melemahkan legitimasi lembaga-lembaga negara (Stewart 2010). Legitimasi ini dapat terancam jika kebijakan-kebijakan negara bias dan eksklusif; jika otoritas negara tidak menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia atau menegakkan supremasi hukum secara merata di segala bidang; atau jika segmen populasi yang signifikan tidak dilibatkan dalam kekuasaan dan proses pengambilan keputusan. Kurangnya legitimasi merampas “sistem imunitas” kelembagaan yang diperlukan untuk menunjukkan ketahanan lintas waktu dan untuk menganalisis tantangan-tantangan dan konflik secara damai (World Bank 2011).

Penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketidaksetaraan yang lebih tinggi secara konsisten mengikis tingkat dukungan warga negara atas negara demokrasi secara menyeluruh (Bergh *et al.* 2014; Kriekhaus *et al.* 2014). Meskipun ada kemajuan demokratis yang luas, khususnya terkait pemilu, ketidaksetaraan memunculkan perasaan keputusasaan publik secara kolektif mengenai apa yang bisa diberikan oleh demokrasi dan apa yang dapat dicapai melalui lembaga dan proses politik formal. Generasi muda di seluruh dunia merasa kecewa kepada politik arus utama dan merasa dirugikan oleh kebijakan publik (UN 2016a). Generasi milenial sangat kecil kemungkinannya tertarik dalam politik elektoral dan memberikan suara dalam pemilu nasional dibandingkan dengan kelompok yang lebih tua.

Pemuda belum tentu apatis. Protes dan demonstrasi menjadi jalur penting bagi ekspresi politik. Kaum muda telah berada di garda depan di banyak gerakan politik yang muncul, banyak di antaranya berfokus pada ketidaksetaraan. Dari gerakan *Occupy* hingga *Indignados* di Spanyol ke #Yo Soy 132 di Meksiko, mereka telah menyampaikan kritik tajam pada keamanan politik (Oxfam 2016).

Munculnya atau bangkitnya wacana populisme, nasionalis dan anti-imigran di banyak negara demokrasi berkembang dan mapan (misalnya Filipina, Turki, Perancis, Inggris dan Amerika Serikat, secara berturut-turut) didorong oleh kenyataan bahwa bahkan, tatkala pertumbuhan ekonomi telah meningkat, hal itu belum menguntungkan mereka

yang hidup dalam kemiskinan (Plattner 2012; Caryl 2016). Ketika banyak faktor berkontribusi pada meningkatnya populisme, termasuk xenophobia dan “ketakutan akan perbedaan dan perubahan sosial” (Beauchamp 2017), tampaknya juga ada faktor penting tumpang tindihnya politik kelas dan politik identitas.

Ketidaksetaraan, kekerasan dan konflik bersenjata

Ketidaksetaraan dapat menjadi pendorong utama polarisasi sosial dan konflik kekerasan. Eksklusi sosial, dan pola-pola yang mengakar di bidang politik, ekonomi dan sosial, yang mempertahankan kesenjangan, adalah faktor-faktor penting yang diasosiasikan dengan kekerasan (DFID 2005; Stewart 2010). Ketidakstabilan politik dan kekerasan lebih mungkin muncul dan lebih sukar diberantas, dalam masyarakat di mana pertumbuhan ekonomi dan kebijakan sosial sudah mengurangi kemiskinan, tetapi tanpa mengatasi perbedaan obyektif yang dirasakan antarpribadi dan regional (World Bank 2016). Ketidaksetaraan yang meluas di negara-negara berkembang – seringkali ditandai oleh pencarian keuntungan oleh aktor domestik dan internasional, termasuk korporasi besar skala global – mengancam stabilitas sosial (UNDP 2013).

Ketidaksetaraan dapat menghasilkan kekerasan dan konflik karena melahirkan kebencian dan memperparah “akar” lain penyebab konflik, dan melemahkan kapasitas sosial, politik dan ekonomi lintas sektoral yang diperlukan untuk menghambat eskalasi konflik (kekerasan). Hal ini terutama terjadi ketika ketidaksetaraan didasarkan pada kelompok atau identitas.

Penyelesaian politik yang didasarkan pada proyek pembangunan-bangsa yang inklusif – atau suatu “komunitas terbayang” yang dapat melampaui identitas yang didefinisikan secara lebih sempit – cenderung lebih stabil dan tangguh dari waktu ke waktu (Anderson 1983).

Demokrasi dan ketidaksetaraan: tidak ada hubungan yang otomatis

Dapatkah demokrasi mengurangi kesenjangan? Korelasi positif antara kekayaan, demokrasi dan kesetaraan merupakan salah satu hubungan terkuat dan paling bertahan dalam ilmu sosial (Acemoglu dan Robinson 2011; Haggard dan Kaufman 2009). Negara demokrasi yang mapan dan kaya cenderung dikelola dengan lebih baik (Acemoglu dan Robinson 2011).

Ada alasan yang kuat untuk mengasumsikan bahwa demokrasi, pada hakikatnya, seharusnya mengurangi

kesenjangan. Bagaimanapun, demokrasi didesain untuk menjadi suatu sistem politik yang memberikan pengawasan populer atas pembuatan keputusan berdasarkan kesetaraan politik. Rata-rata, mayoritas pemilih sudah tentu mendukung redistribusi kemakmuran dari orang kaya, sedangkan orang kaya mungkin menjadi kelompok minoritas. Pada prinsipnya, sifat redistributif demokrasi merupakan ancaman utama bagi para elite. Akan tetapi, kenyataannya jauh lebih kompleks: kesetaraan di muka hukum secara politik formal tidak dengan sendirinya mengarah pada kesetaraan di bidang lain, dan demokrasi tidak secara otomatis mengurangi kesenjangan.

Di bawah rezim demokratis, otoritas publik seharusnya terlibat dengan banyak aktor secara luas ketika memutuskan dan melaksanakan kebijakan (World Bank 2008). Warga negara cenderung menilai legitimasi negara berdasarkan kinerjanya dan kemampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan harapan utama, ketimbang hak dan proses demokratis seperti pemilu (Chang, Chu dan Welsh 2013). Implikasi krusialnya adalah, dengan semua hal lainnya sama (*ceteris paribus*), menempatkan lembaga demokratis partisipatif dan perwakilan pada tempatnya tidak akan secara otomatis berimbas pada dukungan populer untuk sebuah sistem politik jika mereka tidak bisa memberikan barang dan jasa yang diharapkan, terutama di antara kaum muda.

Sebagaimana ditunjukkan oleh nasib banyak negara demokrasi yang telah muncul sejak 1980an, lembaga formal partisipasi, perwakilan dan inklusi pada umumnya tetap rapuh dan tidak efektif, pada saat banyak rezim tidak mampu atau tidak mau memenuhi kebutuhan dan harapan penting rakyatnya. Dengan kata lain, sistem politik belum menjadi lebih inklusif, baik dalam konteks proses yang melampaui bentuk prosedural maupun dalam hal hasil (Rocha Menocal 2015a).

Tantangan reformasi dan kebijakan redistributif

Pembuatan kebijakan bersifat teknis dan politis. Hambatan masuk dan pembagian kekuasaan di antara aktor –termasuk pembuat kebijakan, birokrat, kelompok masyarakat sipil, sektor swasta dan warga negara perseorangan – menentukan siapa yang ikut berpartisipasi dalam arena pembuatan kebijakan, dan suara siapa yang didengar. Tantangan utama di semua negara, termasuk di negara demokrasi, adalah bagaimana memanfaatkan aksi kolektif di antara elite, juga antara elite dengan kelompok sosial yang lebih luas, untuk mengembangkan pembangunan yang inklusif.

Oleh karena itu, para pendukung reformasi untuk memajukan kesetaraan yang lebih besar dan pembangunan inklusif menghadapi sebuah tugas yang berat: supaya kebijakan dirumuskan dan dilaksanakan, para pembaharu harus mempengaruhi semua lembaga pembuat keputusan yang relevan serta para pemain yang memiliki kekuasaan untuk membuat upaya-upaya tersebut jadi melenceng dari jalurnya. Mereka yang menentang lebih banyak reformasi redistributif hanya perlu mendapatkan dukungan dari sejumlah kecil lembaga ini dan pelaku untuk menghalangi perubahan (Weyland 1996; Keefer 2011).

Hal ini menunjukkan tantangan demokrasi yang besar: ketidaksetaraan melemahkan keberlangsungan dan ketahanan demokrasi. Namun, demokrasi juga tidak secara otomatis mengurangi ketidaksetaraan; secara historis, beberapa upaya yang paling berhasil untuk mengurangi kesenjangan (misalnya reformasi tanah) sudah berlangsung dalam kerangka kerja non-demokrasi (Plattner 2012). Akan tetapi, beberapa negara berhasil mengembangkan bentuk pembangunan yang lebih inklusif dan mengurangi kesenjangan dalam konteks demokrasi. Sifat dan laju perubahan juga dapat lebih bertahap, berulang dan akumulatif. Pada saatnya nanti, kerangka kerja dan lembaga demokrasi formal bisa menyediakan titik masuk penting untuk mendorong reformasi lanjutan yang dapat, pada waktunya, meningkatkan kualitas demokrasi dan membantunya menjadi lebih tangguh (Stokke dan Törnquist 2013).

Pembuatan kebijakan yang masuk akal telah menjadi bagian yang penting dalam memerangi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Kebijakan-kebijakan dan inisiatif-inisiatif yang diarahkan kepada kelompok-kelompok rentan dan marjinal membantu mengurangi ketidaksetaraan, khususnya yang berfokus pada kesenjangan yang saling bersimpangan dari waktu ke waktu (Paz Arauco *et al.* 2014). Riset yang berkembang menunjukkan bahwa faktor konteks-spesifik yang mendorong marjinalisasi perlu dimasukkan ke dalam tujuan-tujuan, desain dan implementasi program perlindungan sosial, serta bahwa pertautan antara perlindungan sosial dan sektor lainnya adalah penting. Sebagai contoh, program-program yang menggunakan pendekatan terpadu untuk mengatasi kerentanan sosial dan ekonomi bagi perempuan melalui peningkatan kesadaran akan hak-hak mereka dan pemberian bantuan tunai bisa mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan dan mulai membongkar norma-norma sosial yang diskriminatif (Stuart *et al.* 2016). Beberapa negara sudah menerapkan kebijakan

dan tindakan afirmasi untuk memperbaiki kesenjangan yang bersimpangan, seperti kuota untuk perempuan dan kelompok marjinal lainnya.

Negara memiliki amanat, kapasitas dan legitimasi untuk meredistribusi kekayaan dan sumber daya, yang memberinya peran utama dalam memajukan dan menjamin inklusivitas hasil-hasil pembangunan (Leftwich 2008; Törnquist dan Harriss 2016). Kapasitas negara, yang dipahami sebagai administrasi yang cakap dan imparial yang dilindungi dari pembajakan kebijakan negara untuk keuntungan swasta, pribadi atau patronase, penting bagi ketahanan demokrasi. Akan tetapi, salah satu pelajaran yang terpenting yang telah muncul dalam siklus kebijakan pembangunan selama dua dekade terakhir adalah politik kebijakan—lebih daripada kebijakan itu sendiri—penting dalam membentuk pelaksanaan dan efektivitasnya, serta dalam menentukan kebijakan seperti apa yang layak diterapkan (Booth 2012; Putzel dan Di John 2012; Levy 2014; Hickey, Sen dan Bukenya 2014; Rocha Menocal 2017; World Bank 2017). Pada saat banyak negara yang sebelumnya berhasil mengembangkan pembangunan inklusif dan mengurangi kesenjangan di negara-negara berkembang telah menjadi otoriter, Botswana, Brasil, Ghana, India dan Afrika Selatan merupakan contoh yang lebih kompleks dari tarik ulur kemajuan dan kemunduran dalam demokrasi dan kesenjangan.

Elite di dalam negara dan masyarakat yang berkomitmen memerangi kesenjangan telah terbukti berperan untuk mengorganisasikan atau memobilisasi orang-orang dan sumber daya untuk mengejar tujuan dan sasaran tertentu, serta untuk upaya menyeluruh mengembangkan perubahan yang progresif. Mobilisasi sosial dan tekanan dari bawah ke atas yang terus menerus juga bisa membantu menggapai transformasi substantif menuju inklusi yang lebih besar dan kemakmuran bersama.

Partai politik berperan sebagai penghubung krusial antara negara dan masyarakat, dan karenanya menjadi sarana bagi aksi dan organisasi kolektif. Partai juga memainkan peranan kunci dalam mendorong penyelesaian politik sekaligus mempengaruhi insentif pemerintah untuk mengadopsi lebih banyak kebijakan inklusif (Putzel dan Di John 2012).

Membangun koalisi – baik di tingkat domestik maupun internasional – bisa menjadi penting dalam meloloskan reformasi yang diperlukan. Hal ini bisa berdampak positif, bahkan menentukan, di mana ia berkembang menjadi

sebuah proses tawar-menawar di sekitar isu-isu kepentingan publik yang lebih luas, dan di mana ada peluang bagi para pemangku kepentingan negara dan non-negara pada tingkat yang berbeda – subnasional, nasional, regional, global – untuk berpartisipasi.

Dalam lingkup bantuan pembangunan internasional, perhatian yang relatif kecil diarahkan kepada pentingnya, atau bahkan kekuatan, gagasan membentuk lintasan pembangunan (Hudson dan Leftwich 2014). Sekalipun begitu, gagasan merupakan unsur kunci politik dan sangat penting dalam membentuk pemikiran, perilaku dan hasil mengenai inklusi dan eksklusi, serta tentang sejauh mana kesenjangan masih dapat ditoleransi. Gagasan dan norma juga mempengaruhi sifat dan kualitas interaksi antara elite dengan para pengikutnya, dan antara kelompok yang berbeda dalam negara atau masyarakat (Hudson dan Leftwich 2014). Selain membantu membentuk konsepsi legitimasi negara, kekuatan gagasan juga menjadi sentral dalam diskusi mengenai siapa yang dilibatkan (dan dieksklusi dari) proses pembangunan negara dan bangsa.

Ketika transformasi kelembagaan sudah gamblang didorong dari dalam, faktor-faktor internasional juga berpengaruh. Dinamika dan dorongan regional dan global dapat memainkan peranan penting dalam menginformasikan (atau membantu membentuk) proses reformasi internal serta mempengaruhi insentif dan dinamika aktor-aktor domestik untuk mendukung ketahanan demokrasi dan kualitas tata kelola pemerintahan demokratis (ketidaksetaraan merupakan komponen yang penting dari proses ini). Sebagai contoh, jaringan transnasional yang memajukan hak asasi manusia, pemberdayaan perempuan, serta transparansi dan akuntabilitas telah mengendalikan tindakan kolektif pada tingkat internasional dan global, yang pada gilirannya juga mempengaruhi politik dan perdebatan domestik (Keck dan Sikkink 1999). Tata kelola global lain serta jaringan transnasional di bidang kesehatan dan pendidikan global juga penting dalam meletakkan ekspektasi dan menghasilkan lebih banyak insentif bagi pemerintah untuk memberi hasil, terutama di negara-negara yang bergantung pada bantuan. Upaya donor internasional untuk menggunakan insentif atau persyaratan yang berhubungan dengan demokrasi atau pembangunan untuk mendorong fokus yang lebih besar terhadap hasil pendidikan dan kesehatan di negara-negara mitra juga sudah berdampak, sekalipun pendekatan seperti ini tidak selalu berhasil. Oleh karena itu, pertanyaannya bukan apakah donor mempengaruhi dinamika politik dan kekuasaan internal, tetapi lebih ke bagaimana mereka seharusnya mendesain keterlibatan dan intervensi mereka, berdasarkan

penilaian yang masuk akal dari berbagai dilema dan tawar-menawar yang berlangsung (Yanguas 2017).

Pilihan kebijakan dan rekomendasi untuk melawan ketidaksetaraan

Semua aktor

- Manfaatkan iklim politik saat ini untuk memprioritaskan dan mengendalikan tindakan kolektif melawan kesenjangan.
- Kembangkan pemahaman mendalam mengenai konteks politik dan dinamika kekuasaan mendasar di mana ketidaksetaraan eksis, untuk menentukan kebijakan-kebijakan apa yang masuk akal dan layak secara politik.
- Investasikan riset untuk mengembangkan dan berbagi pengetahuan dalam rangka pemahaman yang lebih baik mengenai apa yang berhasil dan yang tidak, dan untuk melacak kemajuan dengan memperbaiki pengumpulan data dan monitoring data.

Pembuat kebijakan nasional dan lokal

- Gunakan kebijakan sosial dan ekonomi untuk memperbaiki kesenjangan sosial, politik, dan ekonomi yang bersimpangan dan melembutkan sudut-sudut tajam ketidaksetaraan ekonomi dan eksklusi sosial. Hal ini termasuk kebijakan pajak, pendidikan, kesehatan, pengangguran, bantuan tunai bersyarat, kredit mikro, dan tindakan afirmasi. Fokus seharusnya ada pada kaum muda guna membantu memutus lingkaran setan kesenjangan antargenerasi.
- Identifikasi dan atasi kendala teknis – dan terutama politik – terhadap implementasi kebijakan yang efektif dengan mereformasi hukum dan lembaga-lembaga formal lainnya yang diperlukan guna mengatasi kesenjangan serta berupaya mempengaruhi insentif, perilaku, praktik dan nilai-nilai aktor dan pemangku kepentingan yang strategis dan utama. Berikan perhatian khusus pada bagaimana ruang formal dan

informal berinteraksi, dan apakah mereka saling melengkapi atau saling menarik ke arah yang berbeda.

- Kendalikan koalisi redistributif yang dapat memanfaatkan tekanan domestik dan internasional guna mengatasi ketidaksetaraan sebagai suatu prioritas kebijakan.
- Perhatikan efek samping potensial dan konsekuensi yang tidak diinginkan dari kebijakan sosial yang dimaksudkan untuk memperbaiki kesenjangan, dan temukan keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bersaing.

Masyarakat Internasional

- Fokus pada kesenjangan sebagai fenomena yang bersimpangan, dan prioritaskan pengurangannya, ketimbang hanya fokus semata pada pengurangan kemiskinan dan tingkat pendapatan.
- Perhatikan konteks politik, dan sesuaikan pendekatan-pendekatan dan intervensi untuk mengatasi ketidaksetaraan pada realitas kontekstual. Kembangkan pemahaman yang lebih tajam mengenai bagaimana intervensi di satu area (misalnya dukungan demokrasi) dapat mempengaruhi intervensi di area yang lainnya (misal pembangunan negara), dan mengenali ketegangan-ketegangan, tawar-menawar dan dilema yang terlibat. Hal ini memerlukan pemikiran dan kerja terhadap serangkaian isu – dari pemberian layanan, partisipasi warga negara, dan reformasi tata kelola, hingga pembangunan ekonomi dan memajukan inklusi – dengan kata lain, fokus bukan pada “praktik terbaik” tetapi lebih pada praktik “yang paling cocok”.
- Fokus pada revitalisasi dan menemukan kembali hubungan antara negara dan masyarakat untuk memberikan kepada negara demokrasi, semangat dan ketahanan yang diperbaharui.
- Dukung kerja sama internasional untuk memberantas penghindaran pajak dan pelarian modal dengan mengharuskan pelaporan negara demi negara, memajukan transparansi dan pertukaran informasi, serta memberlakukan penyatuan pajak atas modal.

Bab 7. Migrasi, Polarisasi Sosial, Kewarganegaraan dan Multikulturalisme

Di seluruh dunia, migrasi seringkali menjadi pusat perdebatan publik, terutama selama kampanye pemilu. Di beberapa negara, platform partai kian menjanjikan pengusiran migran atau membatasi masuknya migran. Di negara lainnya, anggapan bahwa pemerintah gagal mengatasi rasa khawatir terhadap migrasi sudah menyebabkan kekerasan xenofobia dan kerusuhan sipil. Akan tetapi, banyak negara mengakui manfaat ekonomi migrasi dan semakin membutuhkan migran yang terampil untuk mendukung ekonomi mereka.

Krisis Suriah mendorong peningkatan jumlah pengungsi yang belum pernah terjadi sebelumnya ke negara-negara seperti Libanon, Yordania dan Turki serta Uni Eropa, yang kemudian memicu perdebatan global dan regional mengenai pembagian beban yang adil dan bagaimana negara-negara dapat mengatasi meningkatnya arus migrasi. Negara-negara lainnya, seperti Botswana, Ethiopia, Kenya, Namibia dan Afrika Selatan, menjadi tuan rumah jangka panjang bagi para migran ekonomi, juga pengungsi yang melarikan diri dari perang dan konflik di Afrika.

Pada akhir 2015, kaum migran menyumbang lebih dari 3 persen populasi dunia. Selama 45 tahun terakhir, jumlah penduduk yang hidup di luar negara asalnya sudah mencapai hampir tiga kali lipat, dari 76 juta menjadi 244 juta orang (IOM 2015a). Akan tetapi, penting dicatat bahwa meskipun terjadi peningkatan dramatis dalam jumlah absolut, proporsi migran sebagai bagian dari penduduk dunia relatif stabil sejak 1990 (UN 2016b).

Pada tahun 2015, perempuan mencapai 48 persen dari penduduk migran dunia (UN 2016b). Migran perempuan menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan dengan migran laki-laki. Migran bisa menghadapi berbagai bentuk diskriminasi, termasuk yang berdasarkan gender, etnisitas, kebangsaan, kelas dan bias lainnya – di samping status mereka sebagai migran. Hal ini dapat secara signifikan melemahkan hak asasi manusia migran, sekaligus melemahkan

kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik di negara penerima.

Karena sifat transnasionalnya, migrasi merupakan topik kontroversial yang menimbulkan dilema rumit bagi pembuat kebijakan di lembaga-lembaga demokratis. Di banyak negara tujuan, perhatian dan sikap publik terhadap migrasi secara signifikan mempengaruhi kebijakan pemerintah, agenda partai dan kampanye pemilu. Reaksi negatif dari penduduk asli kepada imigran diungkapkan dalam protes anti-imigran, kelompok yang main hakim sendiri, serta penerimaan atas kebijakan-kebijakan pembatasan migran. Ancaman terhadap berfungsinya lembaga-lembaga dan proses-proses demokrasi timbul dari polarisasi politik dan sosial, sekuritisasi, eksklusivitas, dan marginalisasi maupun diskriminasi melalui pendefinisian yang sempit atas bangsa. Liputan media mengenai migrasi juga mempengaruhi perilaku pemilih di tingkat nasional dan lokal. Kekhawatiran terhadap migrasi telah menghidupkan kembali partai dan pemimpin populis kanan-jauh (*far-right*). Kekhawatiran ekonomi atas imigrasi seringkali terfokus pada imigran yang mengambil lapangan kerja yang semakin langka atau bahwa migran membutuhkan dukungan pendanaan publik. Munculnya organisasi teroris yang mengklaim dimotivasi oleh agama Islam telah menimbulkan Islamofobia di banyak negara, di mana migran dan pengungsi, khususnya yang Muslim, seringkali menjadi sasaran empuk kambing hitam publik.

Migrasi dapat juga mempengaruhi lembaga dan proses demokrasi di negara asal, ketika warga negara di luar negeri berupaya mempengaruhi politik di negara asalnya. Migran semakin menjadi aktor politik yang bisa mempengaruhi kualitas demokrasi di negara tujuan dan negara asal. Meningkatnya arus migrasi telah menekan kapasitas lembaga-lembaga demokrasi untuk secara efektif mengintegrasikan migran ke dalam masyarakat dan menyoroti kebutuhan untuk mengkaji bagaimana pemerintah bisa memfasilitasi dan mendorong partisipasi politik migran. Migrasi mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan publik, yang menimbulkan tantangan pada akuntabilitas demokrasi dan menggarisbawahi perlunya mengombinasikan respons lokal, nasional, dan global.

Inklusi – seberapa baik masyarakat secara politik mengintegrasikan imigran – merupakan faktor kunci ketika menilai bagaimana migrasi mempengaruhi negara demokrasi, dan dalam kondisi demokrasi apa negara bisa menjawab tantangan ini secara tangguh.

Imigran dan rute sempit menuju kewarganegaraan

Kewarganegaraan merupakan sebuah insentif yang penting bagi integrasi dan menghilangkan penghalang bagi imigran untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Kewarganegaraan memberikan sepenuhnya hak-hak sipil dan politik serta perlindungan dari diskriminasi, yang dapat meningkatkan rasa memiliki dari para migran, serta keinginan untuk berpartisipasi.

Kewarganegaraan dapat diperoleh secara otomatis (terutama dengan kelahiran) atau atas permohonan. Naturalisasi didefinisikan di sini sebagai perolehan kewarganegaraan secara tidak otomatis oleh perseorangan yang lahir di negara lain, yang memerlukan suatu permohonan dari imigran serta tindakan pemberian oleh negara tuan rumah (OECD 2011).

Hukum yang mengatur perolehan kewarganegaraan berbeda-beda di seluruh dunia; negara memiliki otoritas eksklusif untuk mengatur syarat-syarat bagi imigran untuk mendapatkan kewarganegaraan. Hukum kewarganegaraan mengatur kriteria kelayakan seperti persyaratan tempat tinggal dan apakah kewarganegaraan diperoleh berdasarkan kelahiran berdasarkan warisan orang tua atau “darah” (*ius sanguinis*) atau negara kelahiran (*ius soli*). Mereka juga mengatur syarat-syarat pemberian kewarganegaraan, termasuk kemahiran bahasa, ujian kewarganegaraan

atau integrasi, persyaratan gender, ekonomi dan catatan kriminal, biaya-biaya, serta jaminan hukum dan kekuasaan pembuatan keputusan diskresi. Yang terakhir, hukum ini mengatur apakah negara membolehkan kewarganegaraan ganda.

Imigran lebih mungkin menjadi warga negara di negara yang memiliki kebijakan kewarganegaraan inklusif daripada di negara dengan kebijakan yang membatasi. Di Australia, Kanada, Selandia Baru dan Amerika Serikat – semua negara dengan angka naturalisasi tinggi – imigran mendapatkan izin tinggal pada saat masuk dan didorong untuk naturalisasi pada akhir periode pemukiman awal. Pendekatan kebijakan ini mendorong imigran mengidentifikasi diri mereka sebagai “warga negara masa depan” sejak awal, dibandingkan dengan pendekatan kebijakan (Eropa) yang menekankan “bukti integrasi”, sebelum naturalisasi dipertimbangkan. Imigran dari negara berkembang lebih mungkin melakukan naturalisasi, dan lebih dipengaruhi oleh kebijakan imigrasi yang restriktif. Demikian pula, pengungsi, perempuan dan imigran dengan tingkat pendidikan yang tinggi lebih mungkin melakukan naturalisasi.

Naturalisasi dapat menjadi alat integrasi (politik) yang berguna bagi imigran. Salah satu pendekatan untuk mendorong migran berpartisipasi dalam kehidupan politik setara dengan penduduk asli sekaligus meningkatkan rasa memiliki (terhadap negara penerima) adalah dengan mempromosikan kebijakan naturalisasi inklusif yang membolehkan kewarganegaraan ganda. Tren naturalisasi cenderung mengikuti arus migrasi dengan jeda waktu, yang berarti bahwa negara harus fokus pada pemukim jangka panjang jika mereka ingin mendorong naturalisasi.

Imigran dan hak pilih

Globalisasi telah menguji syarat kewarganegaraan dan tempat tinggal: warga negara bisa kehilangan haknya karena migrasi. Sekarang banyak masyarakat tuan rumah mengizinkan imigran untuk berpartisipasi dalam pemilu hingga derajat tertentu. Dalam 50 tahun terakhir lebih dari 50 negara telah mengadakan debat parlemen mengenai perluasan hak pilih untuk migran setelah masa tinggal tertentu. Lebih dari 30 negara sudah mengubah undang-undang pemilu dan konstitusi untuk membolehkan pemukim yang bukan warga negara untuk memberikan suara (Pedroza 2015). Hak pilih bagi penduduk non-warga negara ada, atau diberikan dalam konstitusi tanpa pernah diterapkan atau dilaksanakan, di 64 negara demokrasi (Blais *et al.* 2001; Earnest

2004). Negara-negara Nordik dan Irlandia memberikan hak pilih tingkat lokal yang paling inklusif di Eropa, sedangkan di luar Uni Eropa, Selandia Baru memberikan hak pilih tingkat nasional inklusif yang paling demokratis (Huddleston *et al.* 2015).

Memberikan hak pilih pada imigran adalah kontroversial, karena hak pilih secara tradisional dipandang sebagai ciri kewarganegaraan. Apakah kewarganegaraan didefinisikan sebagai kompilasi hak-hak sipil, sosial dan politik atau sebagai status keanggotaan penuh dalam suatu negara, terdapat kecenderungan semakin banyak negara menghubungkan hak pilih imigran di tingkat lokal dengan residensi, sementara hak pilih nasional jarang diberikan kepada imigran sebelum naturalisasi (Bauböck 2005). Di beberapa wilayah, seperti Amerika Latin dan Karibia, demokratisasi telah dihubungkan dengan perluasan hak pilih kepada penduduk non-warga negara, meskipun hal itu tetap merupakan isu yang secara politik sensitif. Di Myanmar, penduduk non-warga negara, seperti Muslim Rohingya, adalah “pemegang kartu putih” dengan hak pilih sampai pemilu November 2015, ketika hak itu ditarik, mereka tidak bisa ikut serta dalam pemilu demokratis pertama di negara itu. Di Jepang, orang asing dibolehkan berpartisipasi di beberapa referendum lokal, tetapi tidak diberikan hak pilih lokal (Huddleston *et al.* 2015).

Sistem pemilu dan konteks sosial politik mempengaruhi pelaksanaan hak pilih yang lebih inklusif. Kebijakan-kebijakan yang memperluas hak pilih secara universal, bahkan walaupun hanya terbatas pada tingkat lokal, menawarkan pemukim non-warga negara kesempatan untuk berintegrasi ke dalam politik berdasarkan kesetaraan sambil memberi mereka kesempatan untuk mengakui rasa memiliki yang baru.

Imigran dan pengaruh tingkat partisipasi pemilih—keinginan untuk terlibat secara politik?

Partisipasi pemilih merupakan sebuah indikator keterlibatan sipil. Jadi apakah hak pilih warga negara imigran menjadi pertimbangan yang penting bagi strategi partai politik dan pemerintah untuk melibatkan imigran dan penduduk asli. Imigran yang punya hak pilih tidak selalu memilih, dan penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa partisipasi imigran dalam pemilu nasional biasanya lebih rendah daripada dalam pemilu lokal. Bahkan dalam pemilu lokal, imigran memiliki angka partisipasi pemilih yang lebih rendah dibandingkan dengan penduduk asli. Kanada menjadi pengecualian (Bird, Saalfeld dan Wüst

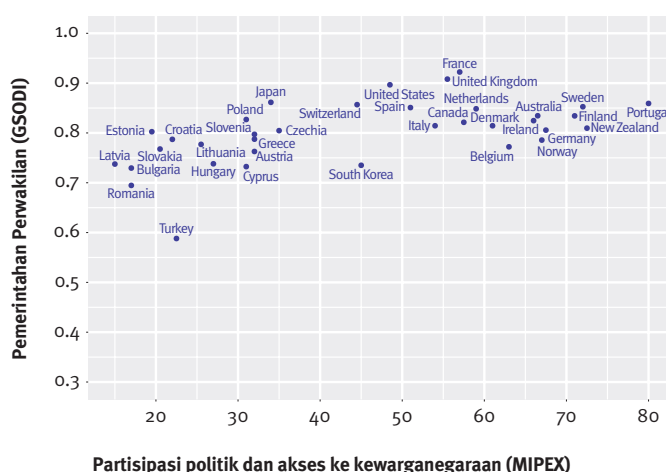
2016). Hal tersebut benar tanpa memandang apakah negara secara politik inklusif pada imigran, memiliki rejim kewarganegaraan yang terbuka atau membolehkan imigran memberikan suara di pemilu lokal. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi partisipasi pemilih imigran, termasuk sosialisasi politik imigran, status sosial ekonomi mereka dan keinginan migran untuk terlibat secara politik dalam masyarakat di negara penerima. Strategi partai politik dan pemerintah dengan demikian perlu mengatasi skeptisisme pemilih secara umum tanpa memandang apakah pemilih itu imigran atau penduduk asli.

Integrasi politik imigran

Salah satu prasyarat kunci bagi inklusi imigran dan kemampuan migran untuk terlibat dalam kehidupan politik di negara tuan rumah adalah keterbukaan sistem legislatif dan politik negara terhadap integrasi politik imigran. Berdasarkan data indeks GSoD dan Indeks Kebijakan Integrasi Migran (*Migrant Integration Policy Index/ MIPEX*), sistem politik yang terbuka atau inklusif dalam hal integrasi politik imigran cenderung mendapat nilai tinggi dalam kualitas demokrasi (International IDEA

GAMBAR 7.1

Partisipasi politik dan akses ke kewarganegaraan oleh pemerintahan perwakilan, 2014



Catatan: Grafik ini menunjukkan hubungan antara indeks GSoD atribut pemerintahan perwakilan (sumbu y) dan rata-rata indikator MIPEX partisipasi politik dan akses ke kewarganegaraan (sumbu x). Semakin tinggi skor sebuah negara di kedua sumbu, semakin inklusif secara politik bagi imigran dan semakin tinggi kualitas pemerintahan perwakilannya. Koefisien korelasi Pearson: $n = 35$, $r = .567$, nilai $p < .005$.

Sumber: Indeks GSoD 2017 (Indeks Pemerintahan Perwakilan); Huddleston et al. 2015 (MIPEX Partisipasi politik dan Akses ke Kewarganegaraan).

2017b; Huddleston *et al.* 2015). Hal ini berarti bahwa negara ini selain inklusif terhadap imigran secara politik dan memungkinkan naturalisasi, juga memiliki nilai tinggi pada atribut kunci demokrasi mereka.

Sebuah contoh, skor indeks GSoD pada Pemerintahan Perwakilan, yang mengukur sejauh mana sebuah negara memiliki pemilu yang bersih, hak pilih inklusif, partai politik yang bebas dan pemerintahan yang dipilih diukur terhadap indikator MIPEX partisipasi politik dan akses ke kewarganegaraan (yang mengukur kebijakan migrasi negara dalam hubungan dengan hak-hak elektoral, kebebasan politik, badan konsultatif dan implementasi kebijakan juga kriteria kelayakan naturalisasi, persyaratan perolehan status kewarganegaraan, keamanan status kewarganegaraan, dan penerimaan atas kewarganegaraan ganda). Semua negara anggota Uni Eropa dimasukkan, juga Australia, Kanada, Eslandia, Jepang, Selandia Baru, Norwegia, Republik Korea, Swiss, Turki dan Amerika Serikat terhadap 167 indikator atas periode waktu 2004–2014.

Di Eropa, skor tinggi indeks GSoD/MIPEX bagi negara-negara ramah imigran seperti Finlandia, Norwegia, Portugal dan Swedia mencerminkan kebijakan yang fokus untuk memastikan bahwa imigran memiliki hak-hak yang sama dengan warga negara dan memastikan tingkat dukungan integrasi yang tinggi. Sebaliknya, skor MIPEX partisipasi politik/akses ke kewarganegaraan yang rendah dan skor indeks GSoD medium untuk negara yang membatasi imigrasi seperti Bulgaria, Ceko, Hungaria, Polandia dan Rumania mencerminkan kenyataan bahwa negara-negara ini menawarkan hanya kesempatan dasar bagi integrasi, dengan partisipasi politik migran yang terbatas, dan rute yang sulit menuju kewarganegaraan (Huddleston *et al.* 2015).

Sementara skor indeks GSoD kualitas demokrasi tinggi tercatat untuk Kanada, Spanyol, Swiss dan Amerika Serikat, negara tersebut mendapatkan skor di kisaran pertengahan untuk indikator MIPEX partisipasi politik/akses ke kewarganegaraan, mencerminkan kebijakan terbatas mereka pada hak pilih untuk imigran dan kurangnya badan konsultatif (dalam kasus Kanada) dan rute sempit menuju kewarganegaraan (dalam kasus Amerika Serikat). Negara lain, seperti Jepang, mendapat skor tinggi pada indeks GSoD kualitas demokrasi tetapi rendah pada indikator MIPEX partisipasi politik/akses ke kewarganegaraan, mencerminkan kebijakan mereka yang terbatas atas hak pilih imigran dan partisipasi politik. Meskipun baru-baru ini ada reformasi kebijakan mengenai pengungsi

dan suaka, Turki memiliki skor rendah baik pada indeks GSoD kualitas demokrasi dan indikator MIPEX partisipasi politik/akses ke kewarganegaraan, mencerminkan kerangka hukum yang tidak menguntungkan bagi integrasi dan partisipasi politik imigran, juga rute yang sulit menuju status kewarganegaraan atau bahkan residensi yang sah. Kebijakan integrasi politik imigran yang inklusif karenanya menguntungkan masyarakat demokrasi dan membantu menciptakan kondisi-kondisi bagi demokrasi kualitatif.

Perwakilan imigran dalam lembaga politik kunci dan badan-badan konsultatif

Partai politik dan parlemen serta dewan-dewan daerah menghadapi tantangan mengintegrasikan kepentingan populasi yang semakin beragam sebagai dampak dari migrasi. Sebagai representasi rakyat yang utama dalam proses pembuatan keputusan politik, partai harus berupaya mencerminkan kepentingan seluruh warga negara (Kemp *et al.* 2013).

Di saat data kurang mengenai apakah partai politik mencerminkan keanekaragaman penduduknya, tapi biasanya kelompok minoritas kurang terwakili (Bloemraad 2013). Imigran tetap kurang terwakili pada tingkat lokal, sekalipun cenderung ada lebih banyak anggota dewan dengan latar belakang imigran di tingkat kotamadya dan di kota-kota, serta partai mencalonkan sejumlah besar calon minoritas di pemilu lokal.

Menambah minimnya perwakilan merupakan tantangan yang dihadapi imigran ketika bergabung dengan partai politik. Partai telah menerapkan strategi yang berbeda untuk meningkatkan representasi minoritas, termasuk memperkuat profil mereka dalam komunitas etnik, menerapkan gerakan rekrutmen untuk mendorong perwakilan etnis minoritas untuk ikut pemilu, dan mengadopsi target numerik untuk calon minoritas. Dalam sedikit kasus, partai politik telah menyusun daftar calon berlatar belakang etnik. Partai lainnya telah menggunakan target, jaringan minoritas intrapartai dan kuota untuk menambah perwakilan minoritas. Banyak partai politik memperbolehkan imigran memegang jabatan dalam struktur partai, termasuk dalam daftar calon (Htun 2004), dan beberapa partai sudah menciptakan insentif bagi imigran untuk terlibat secara politik melalui forum-forum khusus atau kampanye. Banyak struktur ini tidak formal dan lemah, dan bergantung pada interaksi individual dibandingkan struktur kelembagaan. Secara keseluruhan, partai politik dapat lebih efektif dalam menarik orang dari latar belakang imigran (Dähnke *et al.* 2014).

Sistem pemilu dan agenda serta pandangan partai mengenai migrasi – tanpa memandang di mana letaknya dalam spektrum politik – mempengaruhi apakah imigran diwakili dalam struktur partai politik, apakah mereka bisa mencalonkan diri dalam pemilu, dan apakah mereka memiliki peluang yang realistis untuk menang karena posisi mereka dalam daftar calon partai. Tingkat dukungan yang diberikan partai kepada imigran mempengaruhi keterwakilan migran. Partai politik yang memiliki kebijakan ramah migran dapat mempertimbangkan membuat statuta partai, platform pemilu, dan daftar calon yang lebih inklusif, serta melibatkan migran dengan kerangka memperkuat basis perwakilan partai.

Negara dapat memasukan imigran dalam proses pembuatan keputusan melalui badan-badan konsultatif, bahkan walaupun negara tidak memberikan hak pilih formal atau memfasilitasi inklusi imigran dalam partai politik. Selain itu, inisiatif yang didorong masyarakat sipil dan berbasis komunitas yang difokuskan pada inklusi imigran harus dibina untuk memfasilitasi integrasi para imigran tersebut. Pelibatan konstruktif imigran dan komunitas tuan rumah, khususnya migran yang kurang terampil dan kurang terdidik, dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah bisa dilakukan dengan mengikutsertakan warga negara setempat, sebagai contoh melalui platform dialog dan pembuatan kebijakan partisipatif. Pendekatan ini dapat membantu membangun kohesi sosial dan kepercayaan di antara imigran dan komunitas tuan rumah, karena keduanya ditawarkan ruang untuk berinteraksi dan saling memahami pandangan dan keprihatinan masing-masing.

Tantangan partai anti-imigran

Kekhawatiran atas imigrasi telah menghidupkan kembali partai dan pemimpin populis sayap kanan di negara-negara seperti Austria, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Belanda dan Swedia serta Australia dan Amerika Serikat. Banyak partai di semua spektrum politik kian aktif menggunakan media untuk mengkomunikasikan narasi mengenai elite politik yang berada di luar jangkauan melawan rakyat, dan mentalitas “kami versus mereka” yang didasarkan pada identitas etnosentris dan xenofobia (Greven 2016). Selain itu, partai politik arus utama semakin mengakomodasi retorika partai anti-imigran selama kampanye pemilu, yang menambah bahan bakar bagi sikap publik yang anti-imigran dan mempengaruhi platform partai politik.

Pandangan warga negara terhadap migrasi, dan akibatnya terhadap perilaku memilih, menantang nilai-nilai inti

dari proyek demokrasi seperti Uni Eropa, sebagaimana ditunjukkan oleh referendum Brexit Inggris, yang dipengaruhi oleh isu migrasi dalam konteks kebebasan bergerak di dalam Uni Eropa.

Migrasi yang didorong oleh globalisasi lantas mempengaruhi demokrasi dengan meningkatkan dukungan publik bagi partai populis (khususnya sayap kanan) dan agenda anti-imigran mereka. Apakah ukuran populasi asing dalam sebuah negara atau ukuran dan kecepatan arus migrasi yang memicu bangkitnya partai populis, hal itu masih kontroversial. Namun, juga ada beberapa contoh positif publik memilih partai politik atau pemimpin yang pro-imigran yang mengadvokasi kebijakan migrasi inklusif dan adil, seperti pemilihan Sadiq Khan sebagai walikota London pada tahun 2016.

Menurut penelitian Eropa 2010, kekhawatiran publik pada imigrasi merupakan salah satu penyebab kurangnya kepercayaan warga negara kepada lembaga politik dan politisi, dan bukan hanya hasil retorika dan pesimisme partai sayap ultra kanan, atau tingkat migrasi (McLaren 2010). Terlebih, jika warga negara mempersepsikan bahwa migrasi berdampak negatif, maka mereka kurang percaya pada sistem politik. Pihak-pihak dengan pandangan yang kurang negatif terhadap imigran, punya lebih sedikit ketidakpercayaan terhadap sistem politik dan politisi dibandingkan mereka yang sangat khawatir terhadap arus imigrasi. Hubungan antara kekhawatiran terhadap imigrasi dan ketidakpercayaan politik ada tanpa memandang munculnya partai-partai yang sangat kanan. Pada dasarnya, mengurangi keterputusan antara warga negara dan lembaga-lembaga politik dan pemerintah, serta meningkatkan kepercayaan di antara mereka, dapat membantu memperbaiki sikap publik terhadap imigrasi lantas menghasilkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (McLaren 2010).

Salah satu implikasi kebijakan kunci bagi pemerintah – selain mempertimbangkan kapasitas negara dalam hubungannya dengan pembuatan kebijakan migrasi – adalah bahwa negara-negara dengan angka imigrasi yang tinggi dan ramah imigran atau kebijakan multikultural harus berupaya untuk mengurangi potensi reaksi dari warga negara yang punya persepsi negatif terhadap imigrasi. Hal ini terutama akurat di Eropa, Amerika Latin dan Karibia, serta Amerika Serikat, yang mengalami kebangkitan pemimpin dan partai populis sebagai akibat dari ketidakpuasan pemilih, yang seringkali dikaitkan dengan sentimen anti-imigran. Hal

ini tampaknya dikuatkan oleh penjelasan mutakhir bahwa munculnya populis otoriter dalam masyarakat Barat telah menyebabkan reaksi budaya yang kuat terhadap perubahan sosial jangka panjang dan nilai-nilai liberal (Norris 2016).

Emigran sebagai agen demokrasi – bagaimana demokrasi dapat memperoleh manfaat dari emigrasi?

Negara asal dapat menikmati keuntungan demokratis dari emigrasi: migran dapat berfungsi sebagai agen demokrasi yang membantu menyebarkan norma-norma demokrasi. Komunitas diaspora mentransfer informasi, gagasan-gagasan inovatif, kapasitas intelektual, keterampilan teknologi baru, bisnis dan praktik perdagangan. Dengan demikian mereka yang kembali dapat meningkatkan tuntutan bagi akuntabilitas pemerintah, yang dapat meningkatkan partisipasi elektoral dan politik serta mendorong pembentukan partai politik baru.

Negara-negara asal dapat sangat diuntungkan oleh integrasi kembali emigran, terutama mereka yang dipaksa pergi tapi bisa kembali pasca-konflik. Ketika mereka berada di luar negaranya, jika masyarakat di negara penerima memberikan kesempatan kepada mereka, para migran dapat meningkatkan keterampilan, kekayaan serta minat dan kapasitas politiknya. Mereka mungkin sudah mencalonkan diri dalam pemilu tingkat kota dan sudah memperoleh pengalaman politik yang signifikan yang bisa diterapkan di negara asalnya. Diaspora mungkin sudah membentuk asosiasi sipil atau bahkan kelompok politik yang bersiap untuk memperkenalkan (kembali) demokrasi dalam hal negara asal mereka memulai transisi demokrasi. Dalam beberapa kasus, diaspora memainkan peranan kunci dalam meningkatkan kesadaran mengenai situasi di negara asal mereka, dan memobilisasi pemerintah asing dan masyarakat internasional untuk mengadvokasi reformasi demokrasi di negara asalnya (Koinova 2009; Egretreau 2012).

Kewarganegaraan dan emigran

Salah satu pertimbangan penting bagi banyak emigran adalah apakah mereka bisa mempertahankan kewarganegaraan asalnya ketika mereka bernaturalisasi sebagai imigran di negara penerima. Banyak negara menerima kewarganegaraan ganda, terutama jika melepaskan kewarganegaraan negara asalnya punya konsekuensi negatif bagi emigran yang telah memelihara ikatan dengan negara asalnya (OECD 2011). Kewarganegaraan ganda dapat membantu mendorong keterlibatan politik emigran di negara asalnya, dan karenanya berkontribusi pada (dan dapat mempengaruhi) kualitas demokrasi di negara itu.

Kewarganegaraan ganda dapat juga diberikan dari kelahiran atau diperoleh. Negara-negara pada umumnya menerima yang pertama disebutkan, seringkali dengan kewajiban untuk memilih ketika mencapai usia dewasa (*age of majority*), sementara itu, memperoleh kewarganegaraan lain di kemudian hari biasanya mengharuskan memilih di antara kewarganegaraan atau otomatis kehilangan salah satu.

Sejak 1975 tiap wilayah di dunia telah mengalami penambahan substansial jumlah negara yang menawarkan kewarganegaraan ganda; sekarang hal itu sudah menjadi norma (Database Kewarganegaraan Ganda Ekspatriat Global MACIMEDE 2015). Pada tahun 2015, kewarganegaraan ganda paling umum diterima di negara-negara Amerika Latin dan Karibia (91 persen), Amerika Utara (100 persen), Eropa (76 persen), Timur Tengah dan Iran (90 persen), serta Afrika (63 persen), tapi bahkan di wilayah dengan angka terendah, Asia dan Pasifik, mayoritas (57 persen) negara menawarkan kewarganegaraan ganda. Apakah negara-negara harus memberikan atau mengizinkan kewarganegaraan ganda, mencetuskan kontroversi, yang melibatkan masalah hukum seperti wajib militer dan kewajiban pajak yang mungkin menimbulkan konflik administratif, juga perdebatan sosial-politik mengenai pemberian hak pilih ganda kepada migran baik di negara penerima maupun negara asal.

Memperluas hak pilih eksternal bagi emigran?

Apakah memberikan hak pilih kepada emigran memperkuat demokrasi di negara asal? Sebagaimana dengan hak pilih bagi imigran, membolehkan emigran untuk memilih juga kontroversial, karena hal itu berarti membiarkan warga negara mempengaruhi politik di negara asal mereka tanpa harus terpengaruh oleh hasil pemilu atau kebijakan pemerintah (Lopez-Guerra 2005). Beberapa pihak berpendapat bahwa membolehkan kewarganegaraan ganda untuk memilih di dua negara memperlemah prinsip “satu orang satu suara”. Pihak yang lainnya berpendapat bahwa globalisasi telah mengakibatkan yurisdiksi yang tumpang tindih, dan bahwa pemilih ekspatriat memiliki “saham” yang cukup di negara asalnya untuk menjustifikasi hak untuk berpartisipasi secara politik (Spiro 2006).

Memberikan emigran hak suara merupakan tindakan diskresi dari sebuah negara, karena hukum internasional tidak menciptakan kewajiban hukum bagi negara-negara untuk mempertahankan hak pilih bagi emigran. Banyak negara memperluas hak suara kepada warga negara yang bukan penduduk, meskipun kendala teknis dan administratif bisa

menimbulkan hambatan untuk memberikan suara dari luar negeri. Hukum di 146 dari 206 negara demokratis di dunia, sudah mengizinkan warga negara non-penduduk untuk memilih dari luar negeri (Database Suara dari Luar Negeri International IDEA 2015). Dari jumlah tersebut, 48 negara menerapkan suara ekspatriat hanya untuk satu jenis pemilu, sedangkan sebagian besar negara membolehkannya untuk dua atau lebih jenis pemilu. Praktik yang paling umum – di 43 negara – adalah memperbolehkan pemilihan eksternal untuk tiga atau lebih jenis pemilu; negara-negara ini mengizinkan pemilihan eksternal dalam pemilu presiden dan legislatif (Database Suara dari Luar Negeri International IDEA 2015).

Pengungsi secara tradisional berada di antara kelompok yang paling marjinal untuk mendapat hak pilih. Tidak ada praktik internasional yang baku yang memajukan hak-hak politik pengungsi; terdapat variasi regional dalam alokasi sumber data, praktik, dan kepemimpinan kelembagaan.

Akan tetapi, tidak ada korelasi yang jelas antara ketentuan pemilihan eksternal dengan ciri politik atau sosial-ekonomi negara. Ketika gelombang ketiga demokratisasi secara umum sudah menyebarkan hak pilih eksternal sejak tahun 1990-an, buktinya beragam. Negara-negara demokrasi baru di Amerika Selatan memberikan hak pilih pada emigran, sedangkan negara-negara Afrika tidak, seringkali karena ekspatriat mendukung partai oposisi. Negara-negara yang telah memberikan hak pilih kepada ekspatriat meliputi negara demokrasi yang sudah mapan, juga negara yang baru muncul, atau dipulihkan, dan bahkan negara yang tidak dapat diklasifikasikan negara demokratis (Navarro, Morales dan Gratschew 2007). Dampak hak pilih terhadap demokrasi tergantung pada banyak faktor, termasuk konteks sosial-politik dan sistem pemilu yang melaluinya hak-hak tersebut dilaksanakan, juga proporsi warga negara di antara ekspatriat, serta aksesibilitas dan angka partisipasi.

Partisipasi pemilih emigran

Ketika emigran diberikan hak pilih, mereka memiliki potensi untuk mempengaruhi pemilihan yang berlangsung secara ketat. Pada pemilihan presiden Perancis 2017, sebanyak 2,6 persen warga negara Perancis yang tinggal di luar negeri terdaftar untuk memilih. Di pemungutan suara putaran pertama, Emmanuel Macron memenangkan 24 persen suara, sementara Marine Le Pen menerima 21,3 persen suara. Macron memenangkan putaran pertama dengan sekitar 1 juta suara, memberikan 1,3 juta warga negara Perancis yang berhak memilih di luar negeri potensi untuk memutuskan hasil pemilu (Lui 2017).

Akan tetapi, ketika pemilihan melibatkan emigran diperbolehkan, angka pendaftaran dan partisipasi biasanya lebih rendah daripada tingkat partisipasi di negara asal, seperti di Italia, Filipina, Senegal, Spanyol, dan Swedia. Namun di beberapa negara, sekalipun jumlah orang yang memilih dari luar negeri menurun, persentase emigran yang memberikan suara tetap tinggi. Alasan partisipasi yang rendah berbeda-beda di antara pemilih luar negeri, sama halnya seperti di antara pemilih dalam negeri, tetapi ada beberapa faktor yang khusus ada pada pemilihan eksternal. Pemilihan yang melibatkan emigran mahal dan mengurangi manfaat dari aktivitas memberikan suara, serta tingkat kemudahan di tempat pemilihan emigrasi berlangsung mempengaruhi partisipasi (Kostelka 2017).

Meskipun angka partisipasi pemilihan emigran biasanya lebih rendah daripada angka pemilihan penduduk asli terkait dengan biaya yang dibutuhkan, akan tetapi ukuran diaspora mempengaruhi partisipasi pemilih emigran karena diaspora yang besar dapat memotivasi partai politik untuk memobilisasi emigran. Oleh karena itu, jika ukuran diaspora bertambah, angka partisipasi emigran cenderung meningkat. Pada saat yang sama, partisipasi pemilih di seluruh negara asal cenderung menurun (Kostelka 2017). Untuk mendukung demokrasi, pembuat kebijakan di negara asal perlu mempertimbangkan potensi partisipasi politik emigran di negara asalnya di tengah kecenderungan umum menurunnya partisipasi pemilih.

Perwakilan politik emigran dalam lembaga politik kunci dan badan konsultatif

Sebagian besar negara (67 persen) membolehkan dan memfasilitasi pemilihan emigran di pemilu nasional dengan memberikan suara pada daerah pemilihan di mana emigran memiliki ikatan, seperti tempat tinggal sebelumnya (Navarro, Morales dan Gratschew 2007). Hanya 13 negara memiliki kursi yang dicadangkan atau "perwakilan khusus" bagi warga negara yang bukan penduduk di parlemen mereka: Aljazair, Angola, Tanjung Verde, Kolombia, Kroasia, Ekuador, Perancis, Italia, Mozambik, Panama, Portugal, Rumania dan Tunisia. Akan tetapi, Angola dan Panama tidak melaksanakan undang-undang ini (Sundberg 2007; EUDO Database Pemilu Nasional Kewarganegaraan/*Citizenship National Elections Database*, tanpa tanggal).

Terdapat bukti bahwa migrasi di negara dengan tingkat pemberdayaan politik perempuan yang lebih tinggi meningkatkan proporsi perempuan di parlemen negara

asal (Lodigiani dan Salomone 2012). Organisasi dan aktivis diaspora perempuan telah memainkan peranan yang signifikan dalam pembangunan kapasitas dan memajukan pemberdayaan politik perempuan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di negara asalnya. Contohnya, termasuk upaya advokasi yang berhasil dari Jaringan Pemberdayaan Perempuan Sudan Selatan yang dibentuk oleh migran Sudan yang berbasis di Amerika Serikat dan aktivis perdamaian Liberia Leymah Roberta Gbowee.

Beberapa negara tidak memperbolehkan emigran untuk memberikan suara di pemilu walikota atau dewan daerah. Pengecualian termasuk Australia, Austria, Kanada, Siprus, Italia, Malta, Meksiko, Selandia Baru dan Uruguay, meskipun hak pilih warga negara yang bukan penduduk setempat ada di antara mereka yang terikat dengan persyaratan tambahan tempat tinggal, persyaratan untuk kembali ke negara asal untuk memberikan suara atau status pegawai negeri sipil (EUDO Database Kewarganegaraan n. d.).

Banyak negara asal ingin mempertahankan ikatan dengan warga negara mereka di luar negeri, karena mereka dapat menjadi sumber remitansi yang berharga atau pengaruh politik di negara tujuan (Itzigsohn 2000; Bauböck 2003). Pada saat yang sama, banyak negara asal berupaya mempertahankan pengendalian politik atas diaspora. Terdapat 15 negara Afrika – termasuk Ethiopia, Ghana, Mali, Nigeria, Rwanda, Senegal, Tanzania dan Uganda – yang telah membentuk lembaga-lembaga dan kementerian yang berhubungan dengan diaspora.

Selain mempertimbangkan pemberian hak suara kepada ekspatriat, negara asal harus memberdayakan migran yang kembali untuk terlibat secara politik di negara mereka. Para migran harus berkonsultasi dengan komunitas diaspora mereka mengenai isu-isu migrasi untuk mendorong mereka bertindak sebagai duta persahabatan di negara tujuan dan untuk berinvestasi dalam pembangunan di negara asal mereka, berpotensi memberi kontribusi pada kohesi sosial dan memajukan pemahaman budaya.

Implikasi kebijakan: pendekatan untuk menangani tantangan migrasi

Terdapat peningkatan reaksi balik global terhadap multikulturalisme dalam opini publik, wacana politik, kebijakan imigrasi dan teori politik. Banyak negara yang biasa memiliki penekanan kebijakan yang kuat terhadap

multikulturalisme, seperti Australia, Belanda dan Swedia, telah bergeser ke mengharuskan lebih banyak “adaptasi”, “berbagi nilai-nilai” dan “integrasi” dari imigran, seringkali di bawah tekanan dari munculnya partai yang sangat kanan atau populis.

Lembaga-lembaga demokratis harus belajar dari inisiatif lokal yang telah berhasil memasukkan migran dalam kehidupan politik, dan mengaitkan pelajaran ini pada kerangka kerja tata pemerintahan internasional dan regional. Beberapa kota di Eropa (seperti Athena, Berlin, Bilbao dan Dublin) serta Asia dan Pasifik (Fuzhou di Cina, Singapura, dan jaringan kota di Jepang) membentuk struktur kelembagaan dengan dukungan otoritas nasional untuk mengendalikan kepentingan migran yang beragam dan memajukan kerjasama inklusif. Berlin, Dublin dan Lille membangun kemitraan dengan asosiasi migran untuk mempromosikan kewarganegaraan dan partisipasi politik di antara kelompok-kelompok migran. Penganggaran partisipatif (misalnya anggota masyarakat secara langsung memutuskan bagaimana membelanjakan bagian dari anggaran publik) digunakan untuk membiayai kebijakan inklusi kota di lebih dari 1.700 pemerintah lokal di lebih dari 40 negara, terutama di negara berpendapatan rendah di mana anggaran kota tetap rendah meskipun ada desentralisasi (IOM 2015b).

Mengejar suatu “kebijakan multikulturalis yang interaktif” dengan komponen sipil yang memungkinkan orang bertemu dan berinteraksi di ruang bersama – seperti tempat kerja, partai politik, sekolah, fasilitas lingkungan dan sistem transportasi publik – dapat membantu menciptakan suatu identitas nasional kolektif sambil menghormati keanekaragaman identitas kelompok. Dengan pengecualian kewarganegaraan, inklusi migrant –penguasaan bahasa, pendidikan, kesadaran sipil, akses layanan kesehatan, dan langkah-langkah keamanan publik – biasanya difasilitasi secara lokal.

Secara keseluruhan, lembaga-lembaga demokratis harus mempertimbangkan kebijakan yang bertujuan memberdayakan migran untuk memutuskan bagaimana mereka berpartisipasi dalam kehidupan publik, lebih daripada yang didasarkan pada model kewarganegaraan sebagai kebangsaan atau hak pilih tanpa kebangsaan. Untuk memperkuat demokrasi, pembuat kebijakan harus mempertimbangkan pemberian hak suara – khususnya di tingkat lokal – sebagai sebuah rute menuju kewarganegaraan. Hal ini akan lebih baik dalam memajukan penghormatan

pada pilihan perseorangan daripada pendekatan pembuatan kebijakan yang difokuskan pada kelompok atau bangsa etnik.

Lembaga-lembaga demokratis harus mendekati tantangan migrasi terhadap demokrasi melalui kebijakan-kebijakan yang tidak hanya mengandalkan struktur politik formal tradisional dan gagasan negara kebangsaan. Prinsip kunci bagi kebijakan migrasi haruslah inklusivitas untuk menciptakan ketahanan di dalam sistem demokrasi yang memungkinkan suara-suara yang berbeda didengar, dan penggunaan berbagai cara yang berbeda untuk mengelola ketidakpuasan dan kebutuhan untuk perubahan.

Pilihan kebijakan dan rekomendasi untuk mengatasi tantangan migrasi

Pemerintah nasional dan lokal

- Investasikan dalam pengumpulan data dan riset mengenai hubungan antara migrasi dan demokrasi, termasuk arus migrasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi dampak positif dan negatif migrasi, dalam rangka memaksimalkan keuntungan.
- Rancang kebijakan migrasi untuk berfokus pada perubahan persepsi publik mengenai migrasi dan mendorong akuntabilitas politik.
- Pertimbangkan keadaan masing-masing negara, fasilitasi naturalisasi imigran dan pertimbangkan pemberian hak suara lokal sebagai jalan untuk integrasi dan permudah pemberian kewarganegaraan bagi imigran.
- Libatkan aktor-aktor masyarakat sipil untuk membantu mengintegrasikan imigran pada tingkat nasional dan lokal dengan memanfaatkan keahlian dan keterampilan advokasi masyarakat sipil untuk meningkatkan partisipasi politik migran dan memajukan pemahaman budaya, terutama dalam komunitas lokal.
- Pertimbangkan potensi hak suara emigran dan fasilitasi partisipasi politik mereka di negara asal dengan belajar dari inisiatif masyarakat sipil diaspora yang berhasil, pastikan akses informasi yang baik bagi pemilih emigran, fasilitasi pendaftaran pemilih dan libatkan dalam dialog dengan negara tuan rumah untuk menghindari kontroversi politik.
- Berdayakan migran yang kembali untuk terlibat secara politik dan dalam dialog dan konsultasi mengenai isu-isu migrasi dengan komunitas diaspora mereka. Dorong migran untuk bertindak sebagai duta persahabatan di negara tujuan dan agar mereka berinvestasi dalam pembangunan di negara asalnya.

Partai politik

- Libatkan dalam dialog demokratis berbasis fakta mengenai migrasi untuk mempromosikan toleransi terhadap migran dan melawan keyakinan, pengetahuan, dan perilaku publik yang tidak benar terhadap migrasi.
- Statuta partai politik, platform elektoral dan daftar calon harus inklusif dan melibatkan migran untuk memperkuat basis perwakilan mereka, termasuk dengan menciptakan kondisi-kondisi yang setara bagi migran dalam struktur internal mereka.
- Ambil pandangan jangka panjang ketika mendefinisikan strategi partai untuk memperkuat kredibilitas partai di kalangan pemilih.

Sistem tata pemerintahan global dan regional

- Organisasi pemerintahan regional, nasional dan lokal, serta organisasi masyarakat sipil harus bekerja sama untuk mencapai tujuan, target dan indikator Agenda bagi Pembangunan Berkelanjutan 2030, khususnya Tujuan 16, “untuk memajukan masyarakat yang damai dan inklusif bagi pembangunan berkelanjutan”.
- Bekerja sama dalam organisasi regional dan internasional untuk menentukan kebijakan yang secara adil membagi tanggung jawab terhadap migrasi dan perlindungan pengungsi, dan menjunjung tinggi hukum internasional yang terkait seperti *Global Compact on Migrants and Refugees* (Perjanjian Global tentang Migran dan Pengungsi).
- Tingkatkan tata kelola migrasi internasional melalui konsultasi dan kerjasama regional yang lebih luas yang difokuskan pada isu-isu kebijakan utama seperti hubungan antara migrasi dan demokrasi, pembangunan, keamanan, hak asasi manusia, dan perdagangan.
- Perluas mekanisme kerjasama untuk memperkuat manfaat timbal-balik migran bagi peningkatan pemahaman budaya, memajukan toleransi dan integrasi, serta memfasilitasi partisipasi politik mereka baik di negara asal maupun negara tujuan.
- Proses konsultatif internasional dan regional mengenai migrasi harus memperkuat keterlibatan migran dengan masyarakat sipil, terutama asosiasi migran, untuk memajukan integrasi dan partisipasi migran ketimbang pengendalian. Proses ini harus juga melibatkan akademisi, yayasan, dan sektor swasta.

Bab 8. Pembangunan Perdamaian Inklusif Dalam Negara yang Terdampak Konflik: Merancang Ketahanan Demokrasi

Negara-negara yang muncul dari konflik bersenjata menghadapi jalan yang panjang dan sulit, dicirikan dengan menghadapi berbagai kendala sekaligus banyak peluang. Langkah-langkah yang diambil dalam periode pasca-konflik memiliki dampak yang luar biasa terhadap masa depan negara, termasuk stabilitas pemerintahan dan kemampuan untuk menjamin perdamaian guna membangun negara demokrasi yang stabil. Masa transisi, pasca-konflik menghadirkan peluang dan tantangan untuk membangun lembaga-lembaga demokrasi yang dapat membantu mencegah konflik di masa mendatang. Jika proses transisi berlangsung inklusif, ada rasa kepemilikan secara nasional, terbuka dan demokratis, maka sistem demokrasi yang dihasilkan akan tangguh. Penting untuk menumbuhkan rasa kepemilikan yang luas atas keputusan yang diambil selama masa transisi. Jika rakyat merasa mereka memiliki andil dalam suatu keputusan, mereka cenderung lebih menghormati aturan dan tetap terlibat secara politik dalam jangka panjang.

Bagaimana elite politik mengelola pembangunan negara baru dan mengintegrasikan prinsip inklusif ke dalam desain lembaga politik yang baru pasca-konflik kekerasan menjadi penentu utama apakah transisi negara mengarah ke demokrasi yang tangguh. Inklusi yang aktif dan terarah, mengembangkan stabilitas dan ketahanan lembaga demokratis negara yang baru, dengan memprioritaskan komunikasi di antara elite politik dan warga negara serta dengan memberikan suara bagi komponen masyarakat yang paling marjinal.

Mekanisme inklusi yang aktif dan terarah dalam pembangunan konstitusi serta penyelesaian politik dan desain sistem elektoral berfungsi sebagai dasar bagi aturan-aturan baru negara; hal itu menentukan siapa yang dapat berpartisipasi dalam negara dan merancang pengungkit partisipasi itu. Bersama-sama, mereka membentuk beberapa elemen inti ketahanan demokrasi. Proses pembangunan konstitusi yang inklusif memastikan bahwa penyelesaian konstitusional memiliki legitimasi publik dan elite serta memajukan interaksi elite-konstituen. Memperbolehkan mantan pemberontak untuk menata dan mendefinisikan kembali diri mereka

sebagai politisi menolong perluasan dasar dukungan publik bagi legitimasi negara. Sistem elektoral inklusif yang mendorong elite mencari dukungan di luar zona “aman” mereka memberikan insentif bagi pembangunan konsensus dibandingkan politik pemenang mengambil semuanya. Terlebih lagi, sistem elektoral yang memberikan lebih banyak perwakilan yang dipilih, akses ke tingkat tertinggi kekuasaan pembuat keputusan lebih kondusif bagi ketahanan demokrasi dibandingkan dengan sistem yang memandang inklusi hanya sekedar perwakilan numerik. Sistem elektoral inklusif yang sesungguhnya harus memberikan akses pada pembuatan keputusan dan pemegang kekuasaan serta mendorong pertumbuhan pemangku kepentingan baru dan lokal yang tertarik dalam proses demokrasi.

Inklusi yang aktif dan terarah mengoperasionalkan definisi Sekretaris Jenderal PBB mengenai inklusi, yaitu “tingkat dan cara yang di dalamnya pandangan dan kebutuhan para pihak yang berkonflik dan pemangku kepentingan lainnya diwakili, didengar dan diintegrasikan ke dalam proses perdamaian” (UN 2012: 11).

Pembangunan perdamaian yang inklusif



Tren dalam pembangunan perdamaian dan demokratisasi

Untuk memahami seberapa jauh inklusi telah dipertimbangkan dan diintegrasikan ke dalam teori dan praktik pembangunan perdamaian, penting untuk pertama-tama melihat model pembangunan perdamaian yang dominan. Era pasca-Perang Dingin mengantar banjir misi penjaga perdamaian, banyak di antaranya dilaksanakan oleh PBB. Antara tahun 1989 dan 1994, Dewan Keamanan PBB mengesahkan 20 misi penjaga perdamaian baru, menambah jumlah penjaga perdamaian di seluruh dunia dari 11.000 menjadi 75.000 (Penjaga Perdamaian PBB 2016). Misi ini ditugaskan menangani berbagai tanggung jawab yang luas, mulai dari mengawasi pelaksanaan perjanjian perdamaian hingga mengorganisasikan kembali kekuatan militer dan keamanan, serta mengawasi pemilu. Model penjaga perdamaian pasca-Perang Dingin, dan kecenderungan pelaksanaan untuk memaksakan satu ukuran kerangka kerja yang cocok untuk semua kasus (terutama yang difokuskan pada pemangku kepentingan nasional), jelas tidak dapat menghasilkan kondisi yang diperlukan untuk menciptakan perdamaian yang bertahan lama.

Gambar 8.1 menunjukkan bagaimana negara dengan

misi penjaga perdamaian yang besar (yang dikerahkan selama enam bulan atau lebih dengan sedikitnya 500 pasukan militer) berjalan dari waktu ke waktu bersamaan dengan pemerintahan perwakilan, yang digunakan di sini sebagai indikator demokrasi konvensional. Hasilnya beragam. Kamboja, Republik Afrika Tengah, Haiti dan Liberia mengalami periode penurunan dramatis dalam pemerintahan perwakilan, sedangkan Bosnia dan Herzegovina, Timor Leste, Makedonia, Namibia dan Tajikistan telah mempertahankan stabilitas yang relatif bertahan dari waktu ke waktu. Kasus yang lain lagi mengalami periode pertumbuhan yang jelas. Hanya Kroasia yang telah mempertahankan lintasan ke atas yang jelas dalam pemerintahan perwakilan dari waktu ke waktu. Tentu saja, sejumlah faktor selain misi penjaga perdamaian juga sudah mempengaruhi tren pemerintahan perwakilan di negara-negara ini.

Inklusi dan negara yang tangguh

Ketika pembuat kebijakan terus menghadapi tantangan-tantangan terkait dengan pembangunan kembali negara-negara yang dilanda konflik, mereka harus memikirkan mengenai bagaimana memodifikasi model pembangunan

perdamaian liberal yang berlaku agar menjadikan inklusi yang terarah dan aktif sebagai suatu prioritas yang lebih utama.

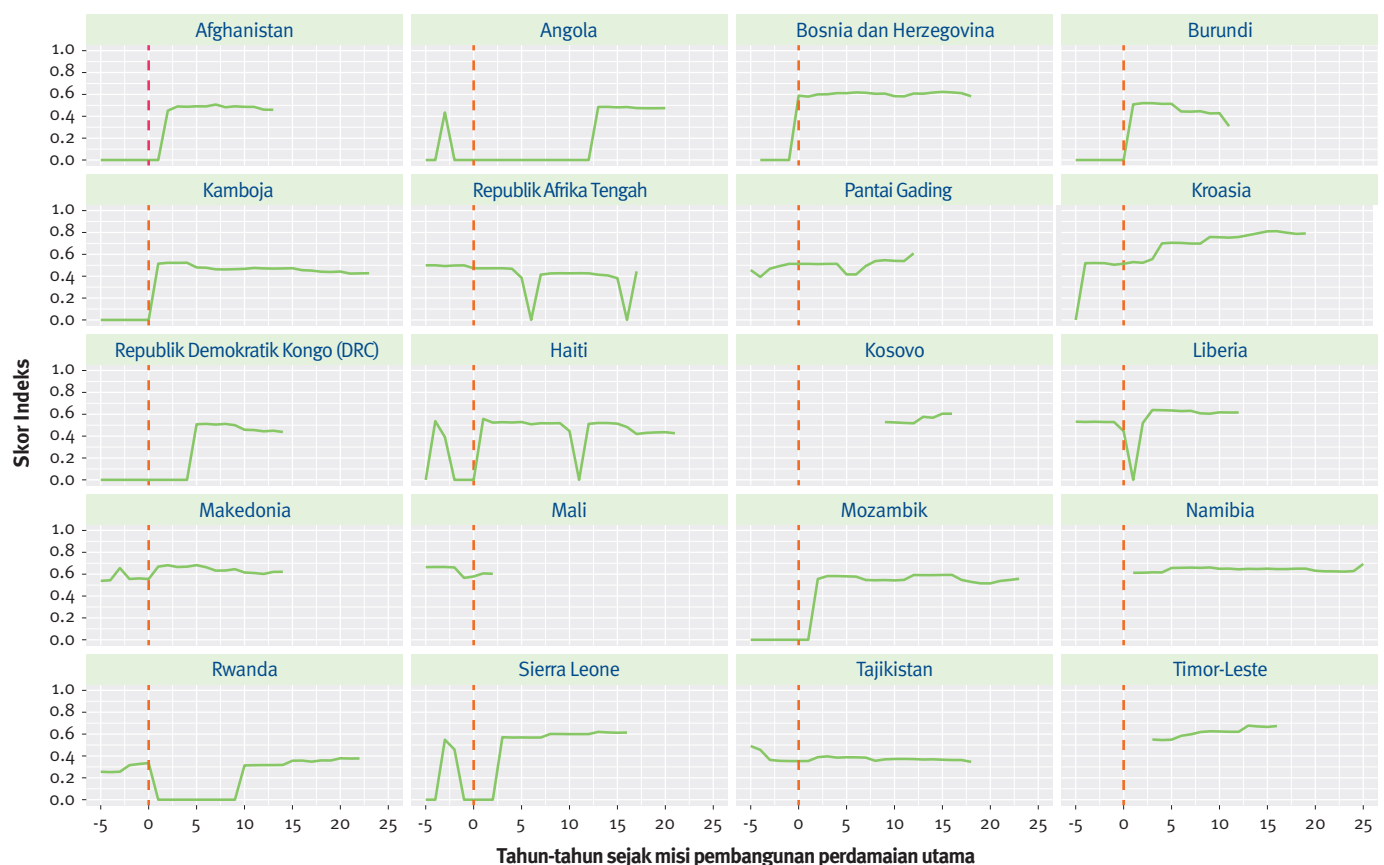
Menyertakan mantan pemberontak dalam penyelesaian politik dari proses transisi telah terbukti penting bagi perdamaian jangka panjang dan ketahanan demokrasi. Konsensusnya adalah jika mantan pejuang diberikan suara untuk menentukan nasib politik, ekonomi dan sosial mereka, hal ini akan menurunkan kemungkinan kekerasan terulang kembali (Toft 2010: 10), dan karenanya memungkinkan lebih banyak waktu bagi lembaga-lembaga demokrasi untuk menjadi stabil dan mendapatkan kepercayaan publik. Beberapa bukti menunjukkan bahwa menyertakan mantan pejuang dalam lembaga politik yang baru meningkatkan kemungkinan bahwa proses demokrasi akan mengarah pada penciptaan dan penguatan lembaga-lembaga demokratis

(Hoddie dan Hartzell 2003). Menyertakan mantan pejuang melalui partisipasi yang luas dan tanggung jawab yang terbagi atau disebarkan telah efektif di Kolombia, El Salvador dan Guatemala (lihat misalnya Travesi dan Rivera 2016; Herbert 2013).

Juga penting untuk menjembatani perbedaan-perbedaan lainnya dan mengintegrasikan perwakilan yang dapat menawarkan pandangan-pandangan subnasional, minoritas, kelas, gender dan usia (ZIF 2015; UN 2015). Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 menegaskan kembali pentingnya peranan perempuan dalam pencegahan dan penyelesaian konflik, perundingan perdamaian, pembangunan perdamaian, penjaga perdamaian, respon kemanusiaan, dan dalam rekonstruksi pasca-konflik. Resolusi ini menekankan kekuatan dan kemampuan unik perempuan untuk mempengaruhi perubahan, dan

GAMBAR 8.1

Indeks GSOD: evolusi Pemerintahan Perwakilan di 20 negara pasca-konflik



Catatan: Sumbu y menunjukkan skor bagi pemerintahan perwakilan dan sumbu x menunjukkan tahun-tahun sebelum dan sesudah misi pembangunan perdamaian yang utama. Garis putus-putus oranye menandai awal operasi penjaga perdamaian (tahun 0 di sumbu). Skor di sumbu y berkisar dari 0 sampai 1. Skor yang lebih tinggi menunjukkan kinerja dalam pemerintahan perwakilan yang lebih tinggi.

Sumber: Indeks GSOD 2017 (Indeks Pemerintahan Perwakilan).

menekankan pentingnya partisipasi mereka yang setara dan keterlibatan penuh di seluruh upaya untuk memelihara dan memajukan perdamaian dan keamanan (UNSC 2000). Inklusi melakukan lebih dari sekedar membawa kelompok yang berbeda ke dalam proses pembuatan keputusan. Ia dapat juga membantu mengembangkan perluasan wawasan dalam masyarakat dan meningkatkan toleransi sosial. Inklusif, sistem konsensus membangun saling menghormati dan toleransi, dan membantu memfasilitasi proses deliberasi (Kirchner, Freitag dan Rapp 2011: 210).

Batas-batas inklusi

Karena tidak mungkin melibatkan seluruh konstituensi dalam proses pembuatan keputusan, Bank Dunia menekankan koalisi-koalisi yang kontekstual dan “cukup inklusif”. Koalisi ini harus memprioritaskan kelompok-kelompok yang membawa legitimasi politik, serta sumber daya keuangan dan teknis, dan akan terus mendesak reformasi kelembagaan yang mendalam, seperti kelompok bisnis, buruh, serta kelompok perempuan dan elemen masyarakat sipil lainnya (Bank Dunia 2011: 124).

Beberapa kelompok mungkin secara sah tak dilibatkan dalam perundingan perdamaian, misalnya jika penduduk percaya kelompok tersebut sudah kehilangan haknya untuk berpartisipasi karena pelanggaran di masa lalu. Inklusivitas dapat juga mengurangi efisiensi: ketika inklusivitas yang luas melibatkan banyak kementerian atau organisasi, pembuatan keputusan dan kemajuan mungkin lambat atau mahal (World Bank 2011: 124; ZIF 2015).

Konstitusi pasca-konflik – inklusi dalam praktik

Konstitusi pasca-konflik dianugerahi tanggung jawab yang besar. Bukan hanya melakukan pemenuhan fungsinya yang biasa sebagai kerangka kerja bagi pemerintah, tapi juga mewujudkan kesepakatan perdamaian – termasuk penyelesaian perselisihan yang berhubungan dengan identitas, ideologi, otonomi, dan akses ke kekuasaan dan sumber daya publik. Dengan begitu banyak yang dipertaruhkan, proses pembentukan konstitusi pasca-konflik berlangsung di arena politik yang diperebutkan secara sengit, dengan setiap kelompok mempertaruhkan tuntutan kepentingannya. Proses pembangunan konstitusi yang inklusif lebih mungkin menghasilkan konstitusi yang tangguh, dalam hal meningkatkan ketahanan penyelesaian konstitusional (Elkins, Blount dan Ginsberg 2009) dan mengurangi kemungkinan pengulangan konflik (Widner 2005).

Mendefinikan “kami rakyat”

Thomas Paine menggambarkan sebuah konstitusi sebagai “bukan tindakan pemerintahannya, tetapi tindakan Rakyat yang membentuk pemerintahannya” (Paine [1791] 1999). Namun rakyat tidak dapat memutuskan, hingga seseorang memutuskan siapa yang dimaksud dengan “rakyat” itu. (Jennings 1956). Dalam banyak hal, penentuan “rakyat” juga merupakan keputusan yang paling penting, karena dapat mempengaruhi output substantif dalam proses pembentukan konstitusi (yaitu naskah) serta legitimasi prosedural atas proses itu, dan oleh karenanya rasa kepemilikan yang luas terhadap konstitusi yang dihasilkan (Hart 2003).

Sekalipun seluruh warga negara, dalam beberapa kasus, diberikan kesempatan untuk meratifikasi konstitusi melalui referendum, tugas menyusun konstitusi didelegasikan kepada badan pembuat konstitusi seperti Majelis Konstituante. Oleh karena itu keputusan awal yang penting meliputi mendefinisikan “rakyat”, siapa yang dimasukkan ke (dan dikeluarkan dari) badan pembuat konstitusi, bagaimana mereka dimasukkan dan siapa yang mereka wakili.

Inklusi melalui perwakilan

Inklusi melalui perwakilan menyajikan peluang bagi inklusivitas sepanjang dua dimensi: (a) inklusi horizontal (terarah), yang berupaya memberikan suara sebanyak mungkin pada kelompok sosial utama, termasuk kelompok bukan arus utama dan yang berselisih serta (b) inklusi vertikal (aktif), yang bertujuan untuk melibatkan warga negara yang lebih luas di luar elite yang diseleksi untuk melakukan perundingan. Kedua dimensi harus dipertimbangkan ketika merancang proses pembangunan konstitusi pasca-konflik.

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat di tingkat subnasional, inklusi yang terarah dalam proses pembangunan-konstitusi harus didasarkan pada konsep “kami rakyat”, yang berpartisipasi sebagai mitra yang setara, bahkan jika komunitas memiliki jumlah yang tidak sama dan bahkan jika beberapa identitas subnasional berselisih. Legitimasi badan pembuat konstitusi didasarkan pada pencerminan persepsi diri kolektif masyarakat yang lebih luas; langkah-langkah khusus mungkin diperlukan untuk menjamin inklusi kelompok yang jika tidak dijamin akan menjadi kurang terwakili, misalnya perempuan.

Beberapa pihak telah menunjukkan bahwa proses yang optimal untuk merancang sebuah Majelis Konstituante harus berbentuk jam pasir: inklusi yang luas di awal, dalam perdebatan nasional selama pemilu ke majelis, dan inklusi

luas di akhir, dalam bentuk referendum rakyat. Akan tetapi analisis ini didasarkan terutama pada Majelis Konstituante Nasional Perancis (*French National Constituent Assembly*) tahun 1789 dan Konvensi Konstitusional Amerika Serikat (*US Constitutional Convention*) tahun 1787. Sementara pemikiran ini berlaku untuk banyak proses pembangunan konstitusi saat ini, norma-norma modern perwakilan demokrasi dan implikasi masyarakat yang terbelah dari transisi pasca konflik mengharuskan pendekatan yang lebih bernuansa untuk memproses rancangan konstitusi dan inklusi. Mekanisme yang utama bagi inklusi dalam proses pembangunan-konstitusi adalah aktif dalam arti bahwa ia mencari masukan yang teratur dan konsisten dari rakyat, sebagian besar melalui konsultasi publik. Akan tetapi, banyak pihak yang meragukan nilai dari partisipasi publik seperti ini. Hal ini karena kerahasiaan, perundingan-perundingan elite merupakan unsur penting dari pembuatan konstitusi dan dapat terancam oleh terlalu banyak keterbukaan dan transparansi, serta konsultasi publik mungkin menjadi sangat dangkal, dan yang paling buruk berpotensi merusak karena menghasilkan harapan yang tidak realistis mengenai bagaimana pandangan publik bisa dimasukkan ke dalam naskah konstitusi.

Inklusi melampaui pemilu dan referendum telah menjadi norma yang tersebar. Oleh karena itu, pertanyaan bagi perancang proses pembangunan konstitusi adalah bukan apakah memasukkan konsultasi publik, tetapi bagaimana memastikan hal itu dapat menjadi sarana yang efektif untuk memenuhi harapan warga negara yang berubah. Melibatkan kelompok-kelompok yang berbeda dalam proses penyusunan konstitusi memberikan rasa kepemilikan kepada banyak sekali aktor terhadap penyelesaian konstitusional, sehingga lebih memungkinkan membuat kelompok yang berbeda akan mematuhi batasan-batasan dari tatanan konstitusional yang baru dan berupaya melindunginya dari potensi pelanggaran. Tatanan konstitusional yang stabil, pada gilirannya, berkontribusi pada ketahanan demokrasi untuk jangka panjang karena mampu menyalurkan konflik melalui aturan-aturan yang disepakati oleh semua pihak, menyediakan kepastian dan dapat diprediksi dalam hal bagaimana kekuasaan dialokasikan, dan membatasi desakan mayoritas.

Pembangunan perdamaian melalui pemilu dan partai politik

Mantan kelompok pemberontak memainkan peranan penting dalam periode transisi pasca-konflik, dan keputusan mereka mengenai apakah (dan bagaimana) berpartisipasi

dalam politik elektoral bisa berdampak luas bagi ketahanan negara baru maupun bagi sistem demokrasi. Dalam banyak kasus, pemberontak ini membentuk partai politik yang mewakili kepentingan bagian dari populasi yang sebelumnya dirugikan. Bukti menunjukkan bahwa, dalam konteks semua hal lain sama (*ceteris paribus*), melibatkan mantan pemberontak dalam proses pembangunan perdamaian membuat kemungkinan terulangnya konflik menjadi berkurang, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Marshall and Ishiyama 2016: 1020; Call 2012: 4).

Kelompok pemberontak menghadapi banyak tantangan dan risiko dengan berubah bentuk menjadi partai politik. Transformasi itu membutuhkan perubahan sikap dan perilaku signifikan, yang memerlukan waktu (De Zeeuw 2007: 11–19; Ishiyama dan Batta 2011; Lyons 2005; Manning 1998). Persaingan pemilu juga dapat mengubah dan mengacaukan hierarki dan organisasi internal partai. Adalah penting untuk dicatat bahwa melibatkan mantan pemberontak ke dalam struktur kekuasaan juga membawa risiko bagi legitimasi demokrasi. Ketika konflik tetap belum diselesaikan secara tuntas, inklusi terhadap mantan pemberontak tersebut bisa saja secara tidak sengaja menunjukkan pada kelompok sempalan bahwa mereka juga pada akhirnya akan dimasukkan dalam struktur kekuasaan jika mereka mengangkat senjata lagi.

Memasukkan pemberontak dalam transisi pasca-konflik dapat membantu membangun negara yang lebih tangguh dengan beberapa cara. Pemberontak yang menjadi politisi seringkali menyadari bahwa partisipasi dalam politik elektoral bisa lebih berharga daripada kembali ke medan pertempuran. Politisi yang memenangkan kursi legislatif, kota atau dewan mendapatkan akses pada penghasilan yang teratur, visibilitas dan platform yang memungkinkan untuk menapaki kemajuan politik lebih lanjut. Oleh karena itu, orang-orang ini bisa menumbuhkan kepemilikan atas partisipasi berkelanjutan dalam proses dan lembaga demokrasi, serta kebijakan mengenai inklusi yang terarah akan berupaya membantu para mantan pemberontak itu untuk memahami dan mempercayai manfaat sistem yang baru. Dalam jangka panjang, partisipasi para politisi baru ini menciptakan lembaga-lembaga yang lebih tangguh (dan sah).

Lembaga-lembaga elektoral

Lembaga-lembaga politik sangat penting dalam lingkungan pasca-konflik (Wolff 2011b: 1778), ketika mantan lawan menilai bentuk dan karakter potensial negara baru,

mengevaluasi peranan yang dapat mereka mainkan di negara itu, dan memutuskan berapa jauh mereka meyakini kemampuan aturan-aturan main yang baru bisa mengatasi keluhan mereka. Jadi, penting untuk memilih sistem pemilu yang paling tepat (Sisk dan Reynolds 1998). Tiga jenis utama sistem pemilu adalah pluralitas/mayoritas, perwakilan proporsional (PR) dan campuran (Reynolds, Reilly dan Ellis 2005).

Pemilihan sistem pemilu

Pemilihan sistem pemilu penting karena dapat mempengaruhi stabilitas jangka panjang negara dan mendukung kemampuannya untuk mengatasi guncangan dan krisis dalam dua cara utama. Pertama, sistem pemilu mempengaruhi perilaku dan strategi politisi. Beberapa sistem mayoritas menghargai moderasi, misalnya, dan dapat memiliki hasil yang berbeda secara signifikan ketimbang sistem yang memberikan panggung untuk pandangan yang lebih ekstrim (Reilly 2002: 156). Kedua, sistem pemilu memiliki kekuatan untuk meredakan atau justru memperparah konflik (Horowitz 1985; Benoit 2004: 369). Para pendukung konsosiasionalisme, sebuah mode tata pemerintahan yang didasarkan pada pembagian kekuasaan di antara para elite dari kelompok sosial yang berbeda, berpendapat bahwa PR merupakan pilihan terbaik bagi masyarakat yang sangat terbelah karena memberikan hasil yang proporsional, memfasilitasi perwakilan minoritas dan memperlakukan semua kelompok secara setara (Lijphart 2004: 100).

Sistem Proporsional melawan mayoritas

Sistem PR bukanlah obat yang mujarab bagi masyarakat yang terbelah. Para pengkritik menunjukkan bahwa sistem PR mereplikasi perpecahan masyarakat dalam lembaga legislatif nasional. Mereka tidak menawarkan insentif untuk memperluas platform kebijakan atau menarik pendukung non-tradisional. Pemilu PR seringkali menghasilkan “koalisi nyaman” yang tidak didasarkan pada ideologi bersama atau tujuan jangka panjang (Horowitz 2012: 26). Sementara sistem mayoritas cenderung mendukung kelompok yang dominan dari sisi angka, beberapa di antara mereka juga memberikan insentif bagi para calon untuk memoderasi kebijakan-kebijakan dan sikap mereka dalam rangka memenangkan dukungan dari luar basis tradisional mereka. Beberapa sistem mayoritas menginsentif moderasi politik dan lebih cenderung menghasilkan konsensus di antara para pesaing (Horowitz 2012: 26).

Bukti kemampuan PR untuk menciptakan perdamaian yang bertahan lama juga beragam. Sementara PR menunjukkan

korelasi dengan perdamaian di beberapa penelitian (Bogaards 2013: 80), tetapi penelitian yang lainnya menghubungkannya dengan kekerasan politik (Selway dan Templeman 2012: 1558). PR telah terbukti tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam menurunkan kekerasan di masyarakat yang paling beragam, dan untuk menurunkan kekerasan di masyarakat yang homogen (Selway dan Templeman 2012: 1560).

Oleh karena itu, dalam jangka panjang, kursi legislatif mungkin tidak menjamin perdamaian abadi atau ketahanan demokrasi. Kelompok-kelompok sosial yang merasa termarjinalkan (atau berisiko termarjinalisasi) ingin mampu mempengaruhi dan mengakses proses pembuatan keputusan yang lebih tinggi, khususnya di tingkat eksekutif. Inklusi yang luas (misalnya, menduduki kursi oposisi di legislatif) sejauh ini hanya berkontribusi bagi ketahanan jangka panjang. Dalam rangka mempengaruhi perubahan jangka panjang, inklusi harus lebih bermakna.

Oleh karena itu, inklusi yang terarah mungkin diperlukan – misalnya, melibatkan kelompok-kelompok marjinal pada tingkat kekuasaan tertentu. Contoh sistem PR yang sedikit dimodifikasi yang memfasilitasi akses ke kekuasaan eksekutif termasuk Afrika Selatan, di mana seluruh partai dengan setidaknya 5 persen kursi legislatif memiliki hak untuk diwakili dalam kabinet, dan Lebanon, yang secara permanen mengalokasikan jabatan kepresidenan untuk satu kelompok dan perdana menteri untuk kelompok yang lainnya (Lijphart 2004: 99).

Dengan gerakan dan migrasi global yang meningkat, negara demokrasi mungkin ingin beralih dari mendorong kelompok identitas sempit yang berkonflik dengan kelompok ceruk lainnya. Sebagai gantinya, mereka mungkin semakin memilih untuk membangun dan menumbuhkan institusi politik yang menghargai konsensus dan mencari manfaat dari keanekaragaman. Jika ini kasusnya, PR mungkin tidak memenuhi kebutuhan negara demokrasi masa depan.

Setelah lebih dari 30 tahun pembangunan perdamaian internasional, para ahli sekarang mengakui bahwa kekurangan mendasar dari model pembangunan perdamaian yang dominan adalah kurangnya penekanan pada inklusi. Akan tetapi, inklusi harus bisa melampaui kuota; ia harus berarti dan terarah. Ketentuan untuk memfasilitasi inklusi yang sesungguhnya lebih banyak artinya daripada memastikan perwakilan secara numerik; mereka memberikan akses ke pembuatan keputusan dan

membina tumbuhnya para pemangku kepentingan lokal baru yang tertarik pada proses demokrasi.

Pilihan kebijakan dan rekomendasi untuk mengatasi tantangan demokrasi dan pembangunan perdamaian

Seluruh perunding perdamaian/transisi

- Kembangkan dan gunakan definisi yang lebih komprehensif mengenai inklusi yang mempertimbangkan lebih dari jumlah orang atau kelompok di atas meja.
- Integrasikan strategi inklusi yang aktif dan terarah ke dalam rancangan seluruh lembaga, sehingga rancangan ini menjadi hasil dari komunikasi yang teratur dengan publik dan terbuka bagi kelompok-kelompok yang menantang konsepsi arus utama dari negara demokrasi
- Temukan cara-cara yang inovatif untuk mengikuti kepemimpinan pemangku kepentingan lokal, termasuk di tingkat subnasional
- Libatkan organisasi masyarakat sipil berbasis isu dalam proses pembuatan keputusan selama periode transisi.

Otoritas yang bertugas dalam pemilu dan penyedia bantuan pemilu internasional

- Berikan dukungan yang berkelanjutan bagi pembangunan partai politik yang menargetkan berbagai subkelompok partai yang memungkinkan untuk terberdayakan oleh partisipasi dalam politik elektoral. Hal ini meliputi perwakilan partai di lembaga legislatif nasional, kabinet, kantor daerah, para calon untuk jabatan-jabatan tersebut, dan pemimpin partai

regional dari berbagai wilayah di negara, yang mungkin memiliki kepentingan yang berbeda dengan pemimpin partai di ibu kota.

- Membantu mempersiapkan perwakilan partai agar melaksanakan tugasnya secara efektif dengan bekerja bersama perwakilan legislatif untuk mengembangkan hubungan yang lebih kuat dengan konstituennya dan memberikan pelatihan mengenai bagaimana menganalisis dan mempersiapkan perundang-undangan.
- Mengembangkan inklusi pemimpin partai baru dalam program dengan cara-cara yang memberi mereka rasa kepemilikan terhadap sistem dengan mengundang para anggota struktural partai untuk berpartisipasi dalam pelatihan dan program pendukung bagi legislator dan pejabat daerah, dan memastikan transparansi dan inklusi dalam aktivitas mereka.

Perancang sistem elektoral

- Berpikir lah melampaui pengaturan pembagian kekuasaan di tingkat eksekutif dengan merancang cara-cara baru untuk memberikan jaminan keamanan yang kredibel dan berbasis luas bagi para pihak pasca-pemberontakan tanpa mengeluarkan partai oposisi “tak bersenjata” yang berkompetisi.
- Fokus pada sistem elektoral yang menyeimbangkan inklusivitas dengan akses pada pembuatan keputusan pemerintahan, dan yang berupaya mencapai inklusivitas melalui dukungan populer berbasis luas.
- Sertakan ketentuan-ketentuan yang memungkinkan hak veto dan yang tidak membuang partai-partai tertentu ke bangku oposisi.

Referensi Terpilih

Untuk daftar referensi yang lengkap lihat *The Global State of Democracy 2017: Exploring Democracy's Resilience*.

Acemoglu, D. dan Robinson, J., *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty* [Mengapa Bangsa-bangsa Gagal: Asal Mula Kekuasaan, Kemakmuran, dan Kemiskinan] (New York: Crown Publishers, 2011)

Afrobarometer, 'Is democracy your preferred system of government?' [Apakah demokrasi sistem pemerintahan yang anda sukai?], 2016, <<http://afrobarometer.org/online-data-analysis/analyse-online>>

Alexander, G., *The Sources of Democratic Consolidation* [Sumber Konsolidasi Demokrasi] (Ithaca, NY and London: Cornell University Press, 2002)

Altman, D., 'The potential of direct democracy: a global measure (1900–2014)' [Potensi demokrasi langsung: Sebuah ukuran global] *Social Indicators Research* (2016)

Anderson, B., *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* [Komunitas yang Dibayangkan: Refleksi tentang Asal Mula dan Penyebaran Nasionalisme] (New York: Verso, 1983)

Arkheide Olsson, S., *Corruption and Political Participation: A Multilevel Analysis* [Korupsi dan Partisipasi Politik: Sebuah Analisis Multilevel] (Gothenburg: Quality of Government Institute, 2014), <http://qog.pol.gu.se/digitalAssets/1551/1551580_2014_12_arkheide-olsson.pdf>

Asher, W., Brewer G. D., Shabbir Cheema, G. dan Heffron, J. M., *The Evolution of Development Thinking: Governance, Economics, Assistance, and Security* [Evolusi Pemikiran Pembangunan: Tata Pemerintahan, Perekonomian, Pendampingan, dan Keamanan] (London: Palgrave, 2016)

Bauböck, R., 'Towards a political theory of migrant transnationalism' [Menuju teori politik transnasionalisme migran], *International Migration Review*, 37/3 (2003), hal. 700–23

—, 'Expansive citizenship—voting beyond territory and membership' [Kewarganegaraan yang meluas—pemberian suara di luar wilayah dan keanggotaan], *Political Science and Politics*, 38/4 (2005), hal. 683–87

—, 'Stakeholder citizenship and transnational political participation: a normative evaluation of external voting' [Kewarganegaraan pemangku kepentingan dan partisipasi politik transnasional: suatu evaluasi normatif tentang pemungutan suara eksternal], *Fordham Law Review*, 75/5 (2007), hal. 2393–447

Beauchamp, Z., 'No easy answers: why left-wing economics is not the answer to right-wing populism' [Tidak ada jawaban yang muda: mengapa perekonomian sayap kiri bukan jawaban bagi populisme sayap kanan], *Vox*, 13 Maret 2017, <<https://www.vox.com/world/2017/3/13/14698812/bernie-trump-corbyn-left-wing-populism>>

Behrend, J. dan Whitehead, L., 'The struggle for subnational democracy' [Perjuangan bagi demokrasi subnasional], *Journal of Democracy*, 27/2 (2016), hal. 155–169

Benoit, K., 'Models of electoral system change' [Model-model perubahan sistem pemilu], *Electoral Studies*, 23 (2004), hal. 363–89

Bergh, G., Rocha Menocal, A. dan Rodríguez Takeuchi, L., *What Is Behind the Demand for Governance?* [Apakah di balik Tuntutan Tata Pemerintahan?] (London: Overseas Development Institute, 2014), <<https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/8837.pdf>>

Bermeo, N., 'On democratic backsliding' [Pada kemunduran demokrasi], *Journal of Democracy*, 27/1 (2016), hal. 5–19

Bird, K., Saalfeld, T. dan Wüst, A., *The Political Representation of Immigrants and Minorities: Voters, Parties, and Parliaments in Liberal Democracies* [Perwakilan Politik Imigran dan Minoritas: Pemilih, Partai Politik, dan Parlemen di Negara Demokrasi Liberal] (London and New York: Routledge Taylor and Francis Group and ECPR, 2016)

Bishwa, N. T., *An Assessment of the Causes of Conflict in Nepal* [Penilaian atas Penyebab Konflik di Nepal] (Kathmandu: Tribhuvan University, 2007), <http://dspace.unm.edu/bitstream/handle/1928/3294/BishwaNathTiwari_Nepal_CausesofConflict_pdf.pdf?sequence=1>

Blais, A. et al., 'Deciding who has the right to vote: a comparative analysis of election laws' [Memutuskan siapa yang berhak memilih: sebuah analisis komparatif mengenai undang-undang pemilu], *Electoral Studies*, 20 (2001), hal. 41–62

Bloemraad, I., 'Accessing the corridors of power: puzzles and pathways to understanding minority representation' [Menilai koridor-koridor kekuasaan: teka-teki dan jalan untuk memahami perwakilan minoritas], *West European Politics*, 36/3 (2013), hal. 652–70

Bogaards, M., 'The choice for proportional representation: electoral system design in peace agreements' [Pilihan bagi perwakilan proporsional: desain sistem pemilu dalam kesepakatan damai], *Civil Wars*, 15 (2013), hal. 71–87

Booth, D., *Development as a Collective Action Problem* [Pembangunan sebagai suatu Masalah Tindakan Kolektif] (London: Overseas Development Institute, 2012)

Booth, D. dan Unsworth, S., *Politically Smart, Locally Led Development* [Pembangunan yang cerdas secara politik dan dipimpin secara lokal] (London: Overseas Development Institute, 2014)

Briscoe, I. dan Goff, D., *Protecting Politics: Deterring the Influence of Organized Crime on Elections* [Melindungi politik: Menghambat Pengaruh Kejahatan Terorganisasi terhadap Pemilu], C. Uribe Burcher (ed.) (Stockholm and The Hague: International IDEA and the Clingendael Institute, 2016a), <<http://www.idea.int/publications/catalogue/protecting-politics-deterring-influence-organized-crime-elections>>

—, *Protecting Politics: Deterring the Influence of Organized Crime on Political Parties* [Melindungi Politik: Menghambat Pengaruh Kejahatan Terorganisasi terhadap Partai Politik], C. Uribe Burcher (ed.) (Stockholm and The Hague: International IDEA and the Clingendael Institute, 2016b), <<http://www.idea.int/publications/catalogue/protecting-politics-deterring-influence-organized-crime-political-parties>>

- I. Briscoe, C. Perdomo dan C. Uribe Burcher (eds), *Illicit Networks and Politics in Latin America [Jaringan dan Politik yang Melawan Hukum di Amerika Latin]* (Stockholm and The Hague: International IDEA, Netherlands Institute for Multiparty Democracy and Netherlands Institute for International Relations, 2014), <<http://www.idea.int/publications/catalogue/illicit-networks-and-politics-latin-america>>
- Brown, M., 'Democratic governance: toward a framework for sustainable peace' [Tata pemerintahan demokratis: menuju suatu kerangka kerja bagi perdamaian berkelanjutan], *Global Governance*, 9 (2003), hal. 141–46
- Brownlee, J., *Authoritarianism in an Age of Democratization* [Otoritarianisme di Era Demokratisasi] (New York: Cambridge University Press, 2007)
- Bulmer, E. W., *Presidential Veto Powers* [Kekuasaan Veto Presidensial], International IDEA Constitution-Building Primer No. 14, Mei 2015, <<http://www.idea.int/publications/catalogue/presidential-veto-powers?lang=en>>
- Call, C., *Why Peace Fails: The Causes and Prevention of Civil War* [Mengapa Perdamaian Gagal: Penyebab dan Pencegahan Perang Saudara] (Washington, DC: Georgetown University Press, 2012)
- Carothers, T., 'The end of the transition paradigm' [Akhir paradigm transisi], *Journal of Democracy*, 13/1 (2002), hal. 5–21
- Caryl, C., 'The age of disillusionment' [Era Kekecewaan], *Foreign Policy*, 11 January 2016, <<http://foreignpolicy.com/2016/01/11/the-age-of-disillusionment/>>
- Casal Bértoa, F. et al., 'The world upside down: delegitimising political finance regulation' [Dunia yang terbalik: mendelegitimasi peraturan keuangan politik], *International Political Science Review*, 35/3 (2014), hal. 355–75
- Casas-Zamora, K. dan Zovatto, D., *The Cost of Democracy: Essays on Political Finance in Latin America* [Biaya Demokrasi: Esai tentang Keuangan Politik di Amerika Latin] (Washington DC, and Stockholm: International IDEA, Organization of American States and Inter-American Dialogue, 2016), <<http://www.idea.int/publications/catalogue/cost-democracy-essays-political-finance-latin-america>>
- Chang, A., Chu, Y.-H. dan Welsh, B., 'Southeast Asia: sources of regime support' [Asia Tenggara: sumber dukungan rejim], *Journal of Democracy*, 24 (2013), hal. 150–64
- Cheema, S. dan Popovski, V., *Engaging Civil Society: Emerging Trends in Democratic Governance* [Melibatkan Masyarakat Sipil: Trend yang Muncul dalam Tata Pemerintahan Demokratis] (Tokyo: United Nations University Press, 2010)
- Cheeseman, N., *Democracy in Africa: Successes, Failures, and the Struggle for Political Reform* [Demokrasi di Afrika: Keberhasilan, Kegagalan, dan Perjuangan untuk Reformasi Politik] (New York and Cambridge: Cambridge University Press, 2015)
- Choudhry, S. dan Bisarya, S., 'Regional organizations and threats to constitutional democracy from within: self-coups and authoritarian backsliding', [Organisasi regional dan ancaman terhadap negara demokrasi konstitusional dari dalam: kudeta-diri dan kemunduran otoriter] dalam R. Cordenillo dan K. Sample (eds), *Rule of Law and Constitution Building: The Role of Regional Organizations* (Stockholm: International IDEA, 2014) <<http://www.idea.int/publications/catalogue/rule-law-and-constitution-building-role-regional-organizations>>
- CIVICUS, *State of Civil Society Report 2016* [Laporan Keadaan Masyarakat Sipil 2016] (Washington, DC: CIVICUS, 2016), <<http://www.civicus.org/index.php/socs2016>>
- Collyer, M., 'A geography of extra-territorial citizenship: explanations of external voting' [Geografi kewarganegaraan ekstrateritorial: penjelasan pemberian suara luar negeri], *Migration Studies*, 2/1 (2014), hal. 55–72
- Coppedge, M. et al., 'Defining and measuring democracy: a new approach' [Menentukan dan mengukur demokrasi: sebuah pendekatan baru], *Perspectives on Politics*, 9/2 (2011), hal. 247–67
- Council of Europe, 'Recommendation: Financing of political parties' [Rekomendasi: Pembiayaan partai politik], *Rec 1516* (2001), 22 Mei 2001, <<http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=16907&lang=EN>>
- Dahlberg, S., Linde, J. dan Egretau, R., 'Burma in diaspora: a preliminary research note on the politics of Burmese diasporic communities in Asia' [Burma dalam diaspora: catatan penelitian awal mengenai politik komunitas Burma di Asia], *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 31/2 (2012), hal. 115–47
- Dähnke, I., Markard, L., Wiesner, A. dan Zapata-Barrero, R., *Diversity in Political Parties' Programmes, Organisation and Representation* [Perbedaan dalam Program, Organisasi dan Perwakilan Partai Politik] (Hamburg: DIVPOL, 2014), <https://www.upf.edu/documents/3329791/3455370/DIVPOL_EN_screen.pdf/b5106c57-bf20-426b-bb75-b5cf46a718e5>
- Davies, W., 'The age of post-truth politics' [Era politik pasca-kebenaran], *New York Times*, 24 Agustus 2016, <<http://www.nytimes.com/2016/08/24/opinion/campaign-stops/the-age-of-post-truth-politics.html>>
- De Zeeuw, J., *Soldiers into Politicians: Transforming Armed Opposition Groups after Civil War* [Dari Tentara Menjadi Politisi: Mentransformasi Kelompok Oposisi Bersenjata setelah Perang Saudara] (Boulder, CO: Lynne Rienner, 2007)
- Department for International Development (DFID), *Reducing Poverty by Tackling Exclusion* [Mengurangi Kemiskinan dengan Mengatasi Pengecualian] (London: DFID, 2005)
- Diamond, L., 'The democratic rollback: the resurgence of the predatory state' [Kemunduran demokrasi: Bangkitnya negara predator], *Foreign Affairs* (March/April 2008), <<https://www.foreignaffairs.com/articles/2008-03-02/democratic-rollback>>
- , 'Democracy in decline' [Demokrasi dalam kemunduran], *Foreign Affairs*, 13 Juni 2016
- Earnest, D. C., 'Voting Rights for Resident Aliens: Nationalism, Post-nationalism and Sovereignty in an Era of Mass Migration' [Hak Pilih bagi Penghuni Asing: Nasionalisme, Pasca-nasionalisme dan Kedaulatan di Era Migrasi Massa], Dissertation, George Washington University (2004), tidak dipublikasikan
- The Economist*, 'Art of the lie' [Seni Berbohong], 10 September 2016, <<http://www.economist.com/news/leaders/21706525-politicians-have-always-lied-does-it-matter-if-they-leave-truth-behind-entirely-art>>
- Economist Intelligence Unit (EIU), 'Democracy on the edge: Populism and protest' [Demokrasi di tepi: Populisme dan protes] 2015, <<http://ifuturo.org/documentacion/Democracy-on-the-edge.pdf>>
- , *Democracy Index 2016: Revenge of the 'Deplorables'* [Indeks Demokrasi 2016: Pembalasan dari 'yang Tercela'] (London: EIU, 2017), <<http://www.eiu.com/Handlers/WhitepaperHandler.ashx?fi=Democracy-Index-2016.pdf&mode=wp&campaignid=DemocracyIndex2016>>
- Edelman Insights, '2013 Edelman trust barometer global results' [Hasil global barometer kepercayaan Edelman 2013], 2013, <<http://www.edelman.com/trust-downloads/executive-summary/>>

- Egreteau, R., 'Burma in diaspora: a preliminary research note on the politics of Burmese diasporic communities in Asia' [Burma dalam diaspora: catatan penelitian awal tentang politik komunitas diaspora Burma di Asia], *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 31/2 (2012), hal. 115–47
- Elkins, Z., Blount, J. dan Ginsburg, T., 'Does the process of constitution-making matter?' [Apakah proses pembuatan konstitusi penting?], *Annual Review of Law and Social Science*, 5 (2009), hal. 201–30
- European Union Democracy Observatory on Citizenship (EUDO) Database [Database Pengamatan Demokrasi atas Kewarganegaraan Uni Eropa], <<http://eudo-citizenship.eu/databases/national-electoral-laws>>
- E. Falguera, S. Jones dan M. Ohman (eds), *Funding of Political Parties and Election Campaigns: A Handbook on Political Finance* [Pendanaan Partai Politik dan Kampanye Pemilu: Buku Pedoman tentang Keuangan Politik] (Stockholm: International IDEA, 2014), <<http://www.idea.int/publications/catalogue/funding-political-parties-and-election-campaigns-handbook-political-finance>>
- Fish, M. S., 'Stronger legislatures, stronger democracies' [Badan legislatif lebih kuat, demokrasi lebih kuat], *Journal of Democracy*, 17/1 (2006), hal. 5–20
- Fox, J. dan Halloran, B., *Connecting the Dots for Accountability: Civil Society Policy Monitoring and Advocacy Strategies* [Menghubungkan Titik-titik Akuntabilitas: Kebijakan Monitoring dan Strategi Advokasi Masyarakat Sipil] (London: Open Society Foundation, 2016), <https://jonathanfoxusc.files.wordpress.com/2011/11/fox_halloran_eds_connecting-the-dots-for-accountability.pdf>
- Gates, B. dan Gates, M., 'Promises to keep in 2016' [Janji untuk dijaga di tahun 2016], Bill and Melinda Gates Foundation, 20 Januari 2016, <<https://www.project-syndicate.org/commentary/gates-foundation-2016-priorities-by-bill-gates-and-melinda-gates-2016-01>>
- Gershman, C., 'Democracy and democracies in crisis' [Demokrasi dan negara demokrasi dalam krisis], *World Affairs*, 2016, <<http://www.worldaffairsjournal.org/article/democracy-and-democracies-crisis>>
- Ginsburg, T., Melton, J. dan Elkins, Z., 'On the evasion of executive term limits' [Tentang penghindaran batas waktu jabatan eksekutif], *William & Mary Law Review*, 52 (2011), hal. 1807–69, <<https://ssrn.com/abstract=1683594>>
- Gleditsch, N.-P. and Hegre, H., 'Peace and democracy: three levels of analysis' [Perdamaian dan demokrasi: tiga tingkat analisis], *Journal of Conflict Resolution*, 41/2 (1997), hal. 283–310
- Greven, T., *The Rise of Right Wing Populism in Europe and the United States: A Comparative Perspective* [Munculnya Populisme Sayap Kanan di Eropa dan Amerika Serikat: Sebuah Perspektif Komparatif] (Bonn: Friedrich Ebert Stiftung, 2016), <http://www.fesdc.org/fileadmin/user_upload/publications/RightwingPopulism.pdf>
- Grimm, R., 'The rise of the German Eurosceptic party Alternative für Deutschland: between Ordoliberal critique and popular anxiety' [Munculnya Partai Euroseptik Jerman Alternative für Deutschland: antara kritik Ordoliberal dan kecemasan populer], *International Political Science Review*, 3 (2016), hal. 264–78
- The Guardian*, 'Panama Papers: a special investigation' [Panama Papers: sebuah investigasi khusus], 2016, <<https://www.theguardian.com/news/series/panama-papers>>
- Haggard, S. dan Kaufman, R., 'Poverty, inequality, and democracy: how regions differ' [Kemiskinan, ketidaksetaraan dan demokrasi: bagaimana wilayah-wilayah berbeda], *Journal of Democracy*, 20/4 (2009), hal. 36–49
- Hart, V., *Democratic Constitution Making* [Pembuatan Konstitusi yang Demokratis] (Washington, DC: United States Institute of Peace, 2003), <<https://www.usip.org/sites/default/files/resources/sr107.pdf>>
- Herbert, S., *Lessons from Implementing Peace Agreements: What next for Colombia?* [Pelajaran dari Pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian: Apa selanjutnya bagi Kolumbia?] (Birmingham: GSDRC, 2013)
- Hickey, S., Sen, K. dan Bukenya, B., 'Exploring the politics of inclusive development: towards a new conceptual approach' [Mengkaji politik pembangunan inklusif: menuju suatu pendekatan konseptual baru], dalam S. Hickey, K. Sen dan B. Bukenya (eds), *The Politics of Inclusive Development: Interrogating the Evidence* [Politik Pembangunan Inklusif: Mempertanyakan Bukti] (Oxford: Oxford University Press, 2014)
- Hochschild, J. dan Einstein, K. L., *Do Facts Matter? Information and Misinformation in American Politics* [Apakah Fakta Penting? Informasi dan Misinformasi dalam Politik Amerika] (Norman: University of Oklahoma Press, 2015)
- Hoddie, M. dan Hartzell, C., 'Civil war settlements and the implementation of military power-sharing arrangements' [Penyelesaian perang saudara dan pelaksanaan pengaturan pembagian kekuasaan militer], *Journal of Peace Research*, 40/3 (2003), hal. 303–20
- Holmberg, S., 'Democratic discontent in old and new democracies: assessing the importance of democratic input and governmental output' [Ketidakpuasan demokrasi di negara-negara demokrasi lama dan baru: menilai pentingnya input demokrasi dan output pemerintahan], *Political Studies*, 63 (2015), hal. 18–37
- Holmberg, S., Rothstein, B. dan Nasiritousi, N., 'Quality of government: what you get' [Kualitas pemerintahan: apa yang anda dapatkan], *Annual Review of Political Science*, 12 (2009), 135–61
- Holmes, L., *Rotten States? Corruption, Post-communism, and Neoliberalism* [Negara Busuk? Korupsi, Pasca-komunis, dan Neoliberalisme] (Durham, NC: Duke University Press, 2006)
- Horowitz, D., *Ethnic Groups in Conflict* [Kelompok Etnik dalam Konflik] (Berkeley, CA: University of California Press, 1985)
- , 'Encouraging electoral accommodation in divided societies' [Mendorong akomodasi elektoral dalam masyarakat yang terbelah], dalam B. V. Lal dan P. Larmour (eds), *Electoral Systems in Divided Societies: The Fiji Constitution Review* [Sistem Pemilu dalam Masyarakat yang Terbelah: Tinjauan Konstitusi Fiji] (Canberra: Australian National University Press, 2012)
- Houle, C., 'Inequality and democracy: why inequality harms consolidation but does not affect democratization' [Ketidaksetaraan dan demokrasi: mengapa ketidaksetaraan membahayakan konsolidasi tetapi tidak mempengaruhi demokratisasi], *World Politics*, 61/4 (2009), hal. 589–622
- Htun, M., 'Is gender like ethnicity? The political representation of identity groups' [Apakah gender seperti etnisitas? Perwakilan politik kelompok identitas], *Perspectives on Politics*, 2/3 (2004), hal. 439–58
- Huddleston, T., Bilgili, Ö., Joki, A. L. and Vankova, Z., 'Migrant Integration Policy Index' [Indeks Kebijakan Integrasi Migran], 2015, <<http://mipex.eu/political-participation>>

- Hudson, D. dan Leftwich, A., 'From Political Economy to Political Analysis' [Dari Ekonomi Politik ke Analisis Politik], Developmental Leadership Program Research Paper No. 25, 2014, <<http://publications.dlprog.org/From%20Political%20Economy%20to%20Political%20Analysis.pdf>>
- Huq, A. Z. dan Ginsburg, T., 'How to lose a constitutional democracy' [Bagaimana menghilangkan demokrasi konstitusional], *UCLA Law Review*, 65 (2017), <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2901776>
- Human Rights Watch (HRW), *World Report 2017* [Laporan Dunia 2017] (New York: HRW, 2017), <<https://www.hrw.org/world-report/2017>>
- Inglehart, R. dan Norris, P., 'Trump, Brexit, and the Rise of Populism: Economic Have-nots and Cultural Backlash' [Trump, Brexit, dan Munculnya Populisme: si Miskin Ekonomi dan Reaksi Budaya], Harvard University Kennedy School of Government Faculty Research Working Paper No. 16-026, Agustus 2016, <<https://research.hks.harvard.edu/publications/getFile.aspx?id=1401>>
- International Crisis Group (ICG), *Burundi: A Dangerous Third Term* [Burundi: Istilah Ketiga yang Berbahaya] (Brussels: ICG, 2016), <<https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/burundi/burundi-dangerous-third-term>>
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), *Digital Parties Portal* [Portal Partai Digital], [tanpa tanggal], <<http://digitalparties.org>>
- , *Voting from Abroad Database* [Basis data Suara dari Luar Negeri], [tanpa tanggal], <<http://www.idea.int/data-tools/data/voting-abroad>>
- , *The Global State of Democracy 2017: Exploring Democracy's Resilience* [Status Demokrasi Global 2017: Mengkaji Ketahanan Demokrasi] (Stockholm: International IDEA, 2017a), <<http://www.idea.int/gsod>>
- , *The Global State of Democracy Indices* [Indeks Status Demokrasi Global, 2017b], <<http://www.idea.int/gsod-indices>>
- 'Geographic Definitions of Regions in The Global State of Democracy' [Definisi Wilayah Geografis dalam Status Demokrasi Global], Background Paper, 2017c, <<http://www.idea.int/gsod>>
- International Organisation for Migration (IOM), 'Global Migration Trends Factsheet 2015' [Lembar fakta Trend Migrasi Global 2015], 2015a, <<http://gmdac.iom.int/global-migration-trends-factsheet>>
- , *World Migration Report 2015: Migrants and Cities, New Partnerships to Manage Mobility* [Laporan Migrasi Dunia 2015: Migran dan Kota, Kemitraan Baru untuk Mengelola Mobilitas] (Geneva: IOM, 2015b)
- Inter-Parliamentary Union (IPU), 'Women in Parliament, 20 Years in Review' [Perempuan di Parlemen, 20 Tahun dalam Tinjauan], 2015
- , 'Youth Participation in National Parliaments' [Partisipasi Pemuda dalam Parlemen Nasional], 2016, <<http://www.ipu.org/pdf/publications/youthrep-e.pdf>>
- , 'Women in National Parliaments, situation as of 1st of March 2017' [Perempuan dalam Parlemen Nasional, Situasi per 1 Maret 2017], 2017, <<http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm>>
- Ishiyama, J. dan Batta, A., 'Swords into ploughshares: the organizational transformation of rebel groups into political parties' [Pedang menjadi mata bajak: transformasi organisasional kelompok pemberontak menjadi partai politik], *Communist and Post-Communist Studies*, 44 (2011), hal. 369–79
- Itzigsohn, J., 'Immigration and the boundaries of citizenship' [Imigrasi dan perbatasan kewarganegaraan], *International Migration Review*, 34/4 (2000), hal. 1126–54.
- Jennings, I., *The Approach to Self-Government* [Pendekatan ke Pemerintahan Mandiri] (Cambridge: Cambridge University Press, 1956)
- Kane, S. dan Haysom, N., *Electoral Crisis Mediation: Responding to a Rare but a Recurring Challenge* [Mediasi Krisis Elektoral: Menjawab Tantangan yang Langka, tapi Berulang] (Stockholm: International IDEA, 2016)
- Karl, T. L., 'Economic inequality and democratic instability' [Ketidaksetaraan ekonomi dan ketidakstabilan demokrasi], *Journal of Democracy*, 11/1 (2000), hal. 149–56
- Keck, M. E. dan Sikkink, K., 'Transnational advocacy networks in international and regional politics' [Jaringan advokasi transnasional dalam politik internasional dan regional], *International Social Science Journal*, 51 (1999), hal. 89–101
- Keefer, P., *Collective Action, Political Parties and Pro-Development Public Policy* [Tindakan Kolektif, Partai Politik dan Kebijakan Publik yang Pro-Pembangunan] (Washington, DC: World Bank, 2011)
- Keen, R. dan Apostolova, V., 'Membership of political parties' [Keanggotaan partai politik], House of Commons Library Briefing Paper No. SN05125, 28 Maret 2017, <<http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN05125/SN05125.pdf>>
- Kemp, B., van der Staak, S., Tørå, B. dan Magolowondo, A., *Political Party Dialogue: A Facilitator's Guide* [Dialog Partai Politik: Pedoman Fasilitator] (Stockholm, The Hague and Oslo: International IDEA, Netherlands Institute for Multiparty Democracy and Oslo Center for Peace and Human Rights, 2013)
- Kirchner, A., Freitag, M. dan Rapp, C., 'Crafting tolerance: the role of political institutions in a comparative perspective' [Membentuk toleransi: peran lembaga politik dalam suatu perspektif komparatif], *European Political Science Review* (2011), hal. 201–27
- Klaas, B., *The Despot's Accomplice: How the West is Aiding and Abetting the Decline of Democracy* [Kaki Tangan Penjahat: Bagaimana Barat Membantu dan Menyebabkan Turunnya Demokrasi] (London: C. Hurst & Co. Publishers, 2016)
- Knutsen, C.H., 'Reinvestigating the reciprocal relationship between democracy and income inequality' [Mengeinvestigasi Ulang Hubungan Timbal Balik Antara Demokrasi dan Ketidaksetaraan Pendapatan], *Review of Economics and Institutions*, 6/2 (2015), hal. 1–37
- Koinova, M., 'Conditions and Timing of Moderate Diaspora Mobilization' [Kondisi dan Waktu Mobilisasi Diaspora Moderat] Working Paper, George Mason University, 2009
- Kostelka, F., 'Voter turnout and emigration: what affects transnational electoral participation?' [Partisipasi pemilih dan emigrasi: apa yang mempengaruhi partisipasi pemilih transnasional?], *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 43/7 (2017), hal. 1061–83
- Kriekhaus, J., Son, B., Bellinger, N. M. dan Wells, J. M., 'Economic inequality and democratic support' [Ketidaksetaraan ekonomi dan dukungan demokrasi], *The Journal of Politics*, 76/1 (2014), hal. 139–51
- Kurlantzick, J., *Democracy in Retreat: The Revolt of the Middle Class and the Worldwide Decline of Representative Government* [Demokrasi dalam Kemunduran: Pemberontakan Kelas Menengah dan Kemunduran Pemerintahan Perwakilan di Seluruh Dunia] (New Haven, CT: Yale University Press, 2014)
- Landman, T., *Assessing the Quality of Democracy: An Overview of the International IDEA Framework* [Menilai Kualitas Demokrasi: Ikhtisar Kerangka Kerja International IDEA] (Stockholm: International IDEA, 2008), <<http://www.idea.int/publications/catalogue/assessing-quality-democracy-practical-guide>>

- Latinobarómetro*, 'Is democracy your preferred system of government? [Apakah demokrasi sistem pemerintahan yang lebih anda sukai?], 2016, <<http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp>>
- , 'Latinobarómetro Análisis de datos' [Analisis data Latinobarómetro], Corporación Latinobarómetro, <<http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp>>
- Leftwich, A., *Developmental States, Effective States and Poverty Reduction: The Primacy of Politics* [Negara Berkembang, Negara Efektif dan Pengurangan Kemiskinan: Keutamaan Politik] (New York: United Nations Research Institute For Social Development, 2008)
- Leterme, Y. dan van der Staak, S., 'Active citizenship and political movements in Europe: the evolution of political representation' [Kewarganegaraan aktif dan gerakan politik di Eropa: evolusi perwakilan politik], *Turkish Policy Quarterly*, 15/2 (2016) hal. 47–57
- Levin-Waldman, O., 'How inequality undermines democracy' [Bagaimana ketidaksetaraan merongrong demokrasi], *E-International Relations* (2016), <<http://www.e-ir.info/2016/12/10/how-inequality-undermines-democracy/>>
- Levitsky, S. dan Way, L., *Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War* [Otoritarianisme Kompetitif: Rejim Campuran setelah Perang Dingin] (New York and Cambridge: Cambridge University Press, 2010)
- , 'The myth of democratic recession' [Mitos tentang resesi demokratis], *Journal of Democracy*, 26/1 (2015), hal. 45–58
- Levy, B., *Working with the Grain: Integrating Governance and Growth in Development Strategies* [Bekerja dengan Gandum: Mengintegrasikan Pemerintahan dan Pertumbuhan dalam Strategi Pembangunan] (Oxford: Oxford University Press, 2014)
- Lijphart, A., 'Constitutional design for divided societies' [Desain konstitusional bagi masyarakat terbelah], *Journal of Democracy*, 15/2 (2004), hal. 96–109
- Lodigiani, E. dan Salomone, S., 'Migration-induced transfer of norms: the case of female political empowerment' [Transfer norma yang didorong oleh migrasi: kasus pemberdayaan politik perempuan], Centro Studi Luca d'Agliano Development Studies Working Paper No. 343, 2012
- Lopez-Guerra, C., 'Should expatriates vote?' [Haruskah ekspatriat memberikan suara?], *Journal of Political Philosophy*, 13 (2005), hal. 216–34
- Lui, K., 'Expatriate voters like those in Hong Kong could be decisive in the French election' [Para pemilih ekspatriat seperti di Hong Kong dapat menentukan dalam pemilu Prancis], *Time Magazine*, 5 Mei 2017, <<http://time.com/4752023/france-presidential-election-voters-hong-kong/>>
- Lust, E. dan Waldner, D., *Unwelcome Change: Understanding, Evaluating, and Extending Theories of Democratic Backsliding* [Perubahan yang Tidak Disukai: Memahami, Mengevaluasi dan Memperluas Teori-teori Kemunduran Demokratik] (Washington, DC: United States Agency for International Development, 2015), <http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PBAAD635.pdf>
- Lührmann, A., Lindberg, S., Mechkova, V., Olin, M., Casagrande, F., Petrarca, C. dan Saxer, L., *V-Dem Annual Report 2017. Democracy at Dusk?* [Laporan Tahunan V-Dem 2017. Demokrasi di masa senja?] (Gothenburg: V-Dem Institute, 2017)
- Lyman, R., dan Gillet, K., 'Romania protests simmer despite leaders' promises to back down' [Rumania protes memanas meskipun pemimpin berjanji akan mundur], *New York Times*, 5 Februari 2017, <<https://www.nytimes.com/2017/02/05/world/europe/romania-protests-corruption-sorin-grindeanu.html>>
- Lyons, T., *Demilitarizing Politics: Elections on the Uncertain Road to Peace* [Demiliterisasi Politik: Pemilu di Jalan Yang Tak Pasti Menuju Perdamaian] (Boulder, CO: Lynne Rienner Press, 2005)
- Maastricht Centre for Citizenship, Migration and Development, MACIMIDE Global Expatriate Dual Citizenship Database [Basis data Kewarganegaraan Ganda Ekspatriat Global MACIMIDE], 2015, <<https://macimide.maastrichtuniversity.nl/dual-cit-database/>>
- Manning, C., 'Constructing opposition in Mozambique: Renamo as political party' [Membangun oposisi di Mozambik: Renamo sebagai partai politik], *Journal of Southern African Studies*, 24/1 (1998), hal. 161–89
- Manning, C. dan Smith, I., 'Political party formation by former armed opposition groups after civil war' [Formasi partai politik oleh mantan kelompok oposisi bersenjata setelah perang saudara], *Democratization*, 23/6 (2016), hal. 972–89
- Marshall, M. C. dan Ishiyama, J., 'Does political inclusion of rebel parties promote peace after civil conflict' [Apakah inklusi politik pihak pemberontak mendorong perdamaian setelah konflik sipil], *Democratization*, 23/6 (2016), hal. 1009–25
- Mazucca, S., 'Access to power versus exercise of power: democratization and bureaucratization in Latin America' [Akses ke kekuasaan melawan pelaksanaan kekuasaan: demokratisasi dan birokratisasi di Amerika Latin], *Studies in Comparative International Development*, 45/3 (2010), hal. 334–57
- McLaren, L. M., 'Cause for concern? The impact of immigration on political trust' [Penyebab kekhawatiran? Dampak migrasi terhadap kepercayaan politik], Policy Network Paper, University of Nottingham, September 2010, (<<http://web.archive.org/web/20130622105311/http://www.policy-network.net/publications/3690/Migration-and-the-rise-of-the-radical-right>>)
- McMann, K. M. et al., 'Democracy and Corruption: A Global Time-series Analysis with V-Dem Data' [Demokrasi dan Korupsi: Analisis Serial Waktu Global dengan Data V-Dem] (Gothenburg: Varieties of Democracy Institute, 2017), <https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/52086/1/gupea_2077_52086_1.pdf>
- Merkel, W., 'Are dictatorships returning? Revisiting the "democratic rollback" hypothesis' [Apakah kediktatoran kembali? Meninjau kembali hipotesis "perputaran demokrasi"], *Contemporary Politics*, 16/1 (2010), hal. 17–31
- Ministère de l'Intérieur [Kementerian Dalam Negeri], France, Résultats de l'élection présidentielle 2007 [2007 Presidential election results] [Hasil pemilu presiden 2007], <[https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Lesresultats/Presidentielles/electionresult__presidentielle_2007/\(path\)/presidentielle_2007/FE.html](https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Lesresultats/Presidentielles/electionresult__presidentielle_2007/(path)/presidentielle_2007/FE.html)>, diakses 26 September 2017
- , Résultats de l'élection présidentielle 2017 [Hasil Pemilu Presiden 2017], <[https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Presidentielles/electionresult__presidentielle-2017/\(path\)/presidentielle-2017/FE.html](https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Presidentielles/electionresult__presidentielle-2017/(path)/presidentielle-2017/FE.html)>, diakses 26 September 2017
- Ministry of Interior (Greece), 'Parliamentary Elections September 2015' [Pemilu Parlemen September 2015], 2015, <[http://ekloges.yes.gr/current/v/public/index.html?lang=en#{'cls':'main','params':{}}>](http://ekloges.yes.gr/current/v/public/index.html?lang=en#{'cls':'main','params':{}})
- Møller, J. dan Skaaning, S., 'The third wave: inside the numbers' [Gelombang ketiga: di dalam angka], *Journal of Democracy*, 2/4 (2013), hal. 97–109
- Moore, J. dan Velasquez, T., 'Sovereignty negotiated: anti-mining

- movements, the state and multinational mining companies under “Correa’s twenty-first century socialism” [Kedaulatan dinegosiasikan: gerakan anti-pertambangan, negara dan perusahaan pertambangan multinasional di bawah “sosialisme abad ke dua puluh satu Correa”] dalam A. Bebbington (ed.), *Social Conflict, Economic Development and Extractive Industry* [Konflik Sosial, Pembangunan Ekonomi dan Industri Ekstraktif] (London: Routledge, 2012)
- Mudde, C., ‘The problem with populism’ [Masalah dengan populisme], *The Guardian*, 17 Februari 2015, <<https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/feb/17/problem-populism-syriza-podemos-dark-side-europe>>
- Navarro, C., Morales, I. dan Gratschew, M., ‘External voting: a comparative overview’ [Pemungutan suara eksternal: sebuah ikhtisar komparatif], dalam Ellis, A., Navarro, C., Morales, I., Gratschew, M. and Braun, N., *Voting from Abroad: The International IDEA Handbook* [Suara dari Luar Negeri: Buku Pedoman International IDEA] (Stockholm: International IDEA, 2007), <<http://www.idea.int/publications/catalogue/voting-abroad-international-idea-handbook>>
- Norris, P., *Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior* [Rekayasa Elektoral: Aturan Pemungutan Suara dan Perilaku Politik] (Cambridge: Cambridge University Press, 2004)
- , *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited* [Defisit Demokrasi: Meninjau ulang Warga Negara yang Kritis] (Cambridge: Cambridge University Press, 2011)
- , *Why Elections Fail* [Mengapa Pemilu Gagal] (New York and Cambridge: Cambridge University Press, 2015)
- , ‘It’s not just Trump, authoritarian populism is rising across the West. Here’s why’ [Ini bukan hanya Trump, populisme otoriter muncul di Barat. Ini sebabnya], *The Washington Post*, 11 Maret 2016, <https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/03/11/its-not-just-trump-authoritarian-populism-is-rising-across-the-west-heres-why/?utm_term=.5e5572b48c1a>
- Norris, P., van Es, A. dan Fennis, L., *Checkbook Elections: Political Finance in Comparative Perspective* [Pemilu Buku Cek: Keuangan Politik dalam Perspektif Komparatif] (Sydney: Sunlight Foundation, Global Integrity and the Electoral Integrity Project, 2015)
- , *Democracy, Agency and the State: Theory with Comparative Intent* [Demokrasi, Badan dan Negara: Teori dengan Maksud Komparatif] (Oxford: Oxford University Press, 2010)
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Naturalisation: A Passport for the better integration of immigrants?* [Naturalisasi: Paspas bagi integrasi imigran yang lebih baik?] 2011, <<http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8111061e.pdf?expires=1497951866&id=id&accname=ocid54026704&checksum=611ED9A3FoDEA71BF6816FCEDF69A017>>
- , *Phase 2 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery Convention in Latvia* [Fase 2 Laporan Pelaksanaan Konvensi Anti-Suap OECD di Latvia], 2015a, <<http://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/Latvia-Phase-2-Report-ENG.pdf>>
- , *In it Together: Why Less Inequality Benefits Us All* [Di dalamnya Bersama: Mengapa Kurang Ketidaksetaraan Menguntungkan Kita Semua] (Paris: OECD, 2015b)
- , *Financing Democracy: Funding of Political Parties and Election Campaigns and the Risk of Policy Capture* [Membiayai Demokrasi: Pendanaan Partai Politik dan Kampanye Pemilu serta Risiko Pembajakan Kebijakan] (Paris: OECD, 2016)
- Ortiz, I., Burke, S., Berrada, M. dan Cortes, H., *World Protests 2006–2013* [Protes Dunia 2006–2013] (New York: Initiative for Policy Dialogue and Friedrich-Ebert-Stiftung, 2013)
- Osueke, A. dan Tsounta, E., *What is Behind Latin America’s Declining Income Inequality?* [Apakah di balik menurunnya Ketidaksetaraan Penghasilan di Amerika Latin?] (Washington, DC: International Monetary Fund, 2014)
- Ottaway, M., *Democracy Challenged: The Rise of Semi-Authoritarianism* [Tantangan Demokrasi: Munculnya Semi-Otoritarianisme] (Washington, DC: Brookings Institution Press, 2003)
- Oxfam, *Youth and Inequality: Time to Support Youth as Agents of their own Future* [Pemuda dan Ketidaksetaraan: Waktu untuk Mendukung Pemuda sebagai Agen dari Masa Depan Mereka] (Oxford: Oxfam, 2016)
- , *An Economy for the 99%* [Ekonomi untuk yang 99%] (Oxford: Oxfam, 2017)
- Paine, T., *The Rights of Man* [Hak-hak Manusia] (Dover: Thrift Publishing, [1791] 1999)
- Paz Arauco, V. et al., *Strengthening Social Justice to Address Intersecting Inequalities Post-2015* [Memperkuat Keadilan Sosial untuk Mengatasi Ketidaksetaraan yang Bersimpangan Pasca-2015] (London: Overseas Development Institute, 2014)
- Pedroza, L., ‘The democratic potential of enfranchising resident migrants’ [Potensi demokrasi pemberian hak suara penghuni migran], *International Migration*, 53/3 (2015), hal. 23–24
- Perdomo, C. dan Uribe Burcher, C., *Protecting Politics: Deterring the Influence of Organized Crime on Local Democracy* [Melindungi Politik: Menghambat Pengaruh Kejahatan Terorganisasi pada Demokrasi Lokal] (Stockholm and Geneva: International IDEA and the Global Initiative against Transnational Organized Crime, 2016), <<http://www.idea.int/publications/catalogue/protecting-politics-detering-influence-organized-crime-local-democracy>>
- Pevhouse, J. C., *Democracy from Above: Regional Organizations and Democratization* [Demokrasi dari Atas: Organisasi Regional dan Demokratisasi] (Cambridge: Cambridge University Press, 2005)
- Plattner, M., ‘Introduction’ [Pengantar], dalam F. Fukuyama, L. Diamond dan M. Plattner (eds), *Poverty, Inequality, and Democracy* [Kemiskinan, Ketidaksetaraan, dan Demokrasi] (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2012)
- Przeworski, A., ‘Ruling against rules’ [Penguasa melawan aturan], dalam T. Ginsburg and A. Simpser (eds), *Constitutions in Authoritarian Regimes* [Konstitusi dalam Regim Otoriter] (Cambridge: Cambridge University Press, 2014)
- Puddington, A. dan Roylance, T., ‘The Freedom House survey for 2016: the dual threat of populists and autocrats’ [Survei Freedom House 2016: Ancaman ganda populis dan otokrat], *Journal of Democracy*, 28/2 (2017), hal. 105–19
- Putzel, J. dan Di John, J., *Meeting the Challenges of Crisis States* [Memenuhi Tantangan Negara Krisis] (London: Crisis States Research Centre, 2012)
- Reilly, B., ‘Electoral systems for divided societies’ [Sistem pemilu bagi masyarakat yang terbelah], *Journal of Democracy*, 13/2 (2002), hal. 156–70
- Reitano, T. dan Hunter, M., ‘Case study: Colombia’ [Studi Kasus: Kolombia], dalam C. Uribe Burcher (ed.), *Protecting Politics: Deterring the Influence of Organized Crime on Public Service Delivery* [Melindungi Politik: Menghambat Pengaruh Kejahatan

- Terorganisasi pada Penyampaian Layanan Publik] (Stockholm and Geneva: International IDEA and the Global Initiative against Transnational Organized Crime, 2016), <<http://www.idea.int/publications/catalogue/protecting-politics-deterring-influence-organized-crime-public-service>>
- Reporters without Borders, 'World Press Freedom Index' [Indeks Kebebasan Pers Dunia], 2016, <https://rsf.org/en/ranking_list/analysis>
- La República, 'Vladivideos: 16 años de la primera grabación que hizo caer al régimen fujimorista' [Vladivideos: 16 tahun rekaman pertama yang menjatuhkan rejim Fujimori], 14 September 2016, <<http://larepublica.pe/politica/802860-vladivideos-16-anos-de-la-primera-grabacion-que-hizo-caer-al-regimen-fujimorista>>
- Reynolds, A., Reilly, B. dan Ellis, A., *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook* [Desain Sistem Pemilu: Buku Pedoman Baru International IDEA] (Stockholm: International IDEA, 2005), <<http://www.idea.int/publications/catalogue/electoral-system-design-new-international-idea-handbook>>
- Rocha Menocal, A., 'Analysing the relationship between democracy and development' [Menganalisis hubungan antara demokrasi dan pembangunan], Commonwealth Good Governance 2011/2012, 2012, <<http://www.commonwealthgovernance.org/assets/uploads/2014/04/GG11-Analysing-the-relationship-between-democracy-and-development.pdf>>
- , 'Political settlements and the politics of inclusion' [Penyelesaian politik dan politik inklusi], Developmental Leadership Program State of the Art Research Series, Oktober 2015, <<http://publications.dlprog.org/PoliticalSettlementsSOTA.pdf>>
- , 'Inclusive development and the politics of transformation: Lessons from Asia' [Pembangunan inklusif dan politik transformasi: Pelajaran dari Asia], Developmental Leadership Program Research Paper No. 45, 2017, <<http://www.dlprog.org/publications/inclusive-development-and-the-politics-of-transformation-lessons-from-asia.php>>
- Rothstein, B. dan Holmberg, S., *Correlates of Corruption* [Korelasi Korupsi] (Gothenburg: Quality of Government Institute, 2014), <http://qog.pol.gu.se/digitalAssets/1551/1551577_2014_17_rothstein_holmberg.pdf>
- Rovni, J., 'Communism, federalism, and ethnic minorities: explaining party competition patterns in Eastern Europe' [Komunisme, federalisme, dan minoritas etnik: Menjelaskan pola persaingan partai di Eropa Timur], *World Politics*, 22/4 (2014), hal. 669–708
- Russett, B., dan Oneal, J. R., *Triangulating Peace: Democracy, Interdependence, and International Organizations* [Segitiga Perdamaian: Demokrasi, Saling Ketergantungan, dan Organisasi Internasional] (New York: Norton, 2001)
- Santamaría, G., *Drugs, Gangs, and Vigilantes: How to Tackle the New Breed of Mexican Armed Violence* [Narkoba, Komplotan, dan Main Hakim Sendiri: Bagaimana Menangani Jenis Baru Kekerasan Bersenjata di Meksiko] (Oslo, Norwegian Peacebuilding Resource Center, 2014), <<https://www.clingendael.org/publication/drugs-gangs-and-vigilantes>>
- Schedler, A., *The Politics of Uncertainty: Sustaining and Subverting Electoral Authoritarianism* [Politik Ketidakpastian: Mempertahankan dan Menumbangkan Otoritarianisme Elektoral] (Oxford: Oxford University Press, 2013)
- Schmitter, P., 'Crisis and transition, but not decline' [Krisis dan transisi, namun bukan penurunan], *Journal of Democracy*, 26/1 (2015), hal. 32–44
- Schumpeter, J., *Capitalism, Socialism and Democracy* [Kapitalisme, Sosialisme dan Demokrasi] (London: Unwin University Books, 1974)
- Schwertheim, H., *Measuring Public Support for Democracy: A Resource Guide* [Mengukur Dukungan Publik bagi Demokrasi: Sebuah Pedoman Sumber Daya] (Stockholm: International IDEA, 2017), <<http://www.idea.int/gsod>>
- Selway, J. dan Templeman, K., 'The myth of consociationalism? Conflict reduction in divided societies' [Mitos konsosiasionalisme? Pengurangan konflik dalam masyarakat terbelah], *Comparative Political Studies*, 45/12 (2012), hal. 1542–71
- Sen, A. 'Democracy as a universal value' [Demokrasi sebagai sebuah nilai universal], *Journal of Democracy*, 10/3 (1999a), hal. 3–17
- , *Development as Freedom* [Pembangunan sebagai Kebebasan] (Oxford: Oxford University Press, 1999b)
- Shale, V. dan Gerenge, R., 'Electoral mediation in the Democratic Republic of Congo, Lesotho, and Kenya: a comparative perspective' [Mediasi elektoral di Republik Demokratik Kongo, Lesotho, dan Kenya: sebuah perspektif komparatif], *Conflict Trends*, 16 Februari 2017, <<http://www.accord.org.za/conflict-trends/electoral-mediation-democratic-republic-congo-lesotho-kenya/>>
- Shirky, C., 'The political power of social media' [Kekuatan politik media sosial], *Foreign Affairs*, January/February (2011)
- Sisk, T. dan Reynolds, A., *Elections and Conflict Management in Africa* [Pemilu dan Pengelolaan Konflik di Afrika] (Washington, DC: United States Institute of Peace, 1998)
- Skaaning, S.-E., *The Global State of Democracy Indices Methodology: Conceptualization and Measurement Framework* [Metodologi Indeks Status Demokrasi Global: Konseptualisasi dan Kerangka Kerja Pengukuran] (Stockholm: International IDEA, 2017), <<http://www.idea.int/gsod>>
- Spiro, P., 'Perfecting political diaspora' [Menyempurnakan diaspora politik], *New York University Law Review*, 81 (2006), hal. 207–33
- Stewart, F., *Horizontal Inequalities as a Cause for Conflict: A Review of CRISE Findings* [Ketidaksetaraan Horizontal sebagai Penyebab Konflik: Sebuah Tinjauan dari Temuan CRISE] (Washington, DC: World Bank, 2010)
- Stiglitz, J., *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers our Future* [Harga Ketidaksetaraan: Bagaimana Keterbelahan Masyarakat Saat Ini Membahayakan Masa Depan Kita] (New York: W.W. Norton, 2013)
- Stokes, B., 'The Rise of Nontraditional, Eurosceptic Parties' [Munculnya Parta-Partai Nontradisional dan Euroskeptik], dalam B. Stokes, *Faith in European Project Reviving* [Keyakinan dalam Menghidupkan Kembali Proyek Eropa], Pew Research Center, 2 Juni 2015, <<http://www.pewglobal.org/2015/06/02/chapter-4-the-rise-of-nontraditional-eurosceptic-parties/>>
- Stokke, K. dan Törnquist, O. (eds), *Democratization in the Global South: The Importance of Transformative Politics* [Demokratisasi di Selatan Dunia: Pentingnya Politik Transformatif] (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013)
- Stuart, E. et al., *Leaving No One Behind: A Critical Path for the first 1,000 days of the Sustainable Development Goals* [Tidak Meninggalkan Siapapun di Belakang: Sebuah Jalan Kritis untuk 1.000 hari pertama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan] (London: Overseas Development Institute, 2016), <<https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/10692.pdf>>
- Sundberg, A., 'Diasporas Represented in their Home Country

- Parliaments' [Diaspora Diwakili dalam Parlemen di Negara Asalnya], Overseas Vote Foundation, 2007, <https://www.overseasvotefoundation.org/files/Diasporas_Represented_in_their_Home_Country_Parliaments.pdf>
- Toft, M. D., 'Ending civil wars: a case for rebel victories?' [Mengakhiri perang saudara: sebuah kasus untuk kemenangan pemberontak?], *International Security*, 34/4 (2010), hal. 7–36
- Törnquist, O. dan Harriss, J., *Reinventing Social Democratic Development: Insights from Indian and Scandinavian Comparisons* [Menemukan Kembali Pembangunan Sosial Demokratis: Wawasan dari Perbandingan India dan Skandinavia] (Copenhagen: NIAS Press, 2016)
- Travesi, F. dan Rivera, H., 'Political crime, amnesties and pardons: scope and challenges' [Kejahatan politik, amnesti dan pemberian maaf: lingkup dan tantangan], *International Center for Transitional Justice Briefing*, Maret 2016, <https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ_Colombia_2016_Political_Crime.pdf>
- D. Treisman (ed.), *The New Autocracy: Information, Politics, and Policy in Putin's Russia* [Otokrasi Baru: Informasi, Politik dan Kebijakan Putin di Rusia] (Washington, DC: Brookings Institution Press, 2017)
- United Nations, *Peacebuilding in the Aftermath of Conflict: Report of the Secretary General* [Pembangunan Perdamaian Setelah Konflik: Laporan kepada Sekretaris Jenderal], A/67/499, S/2012/746, 8 Oktober 2012, <<http://www.un.org/en/peacebuilding/pbso/pdf/SG%20report%20PB%202012.pdf>>
- , *Global Study on Homicide 2013* [Penelitian Global tentang Pembunuhan 2013], 2014, <http://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf>
- , *Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* [Mentransformasi Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan] (New York: UN, 2015)
- , *Leaving No One Behind: The Imperative of Inclusive Development* [Tidak Meninggalkan Siapapun di Belakang: Keharusan Pembangunan Inklusif] (New York: UN, 2016a), <<http://www.un.org/esa/socdev/rwss/2016/full-report.pdf>>
- , 'International Migration 2015' [Migrasi Internasional 2015], Department for Economic and Social Affairs, Population Division, 2016b, <<http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/wallchart/docs/MigrationWallChart2015.pdf>>
- United Nations Development Programme (UNDP), *Humanity Divided: Confronting Inequality in Developing Countries* [Kemanusiaan Terbelah: Menghadapi Ketidaksetaraan di Negara-negara Berkembang] (New York: UNDP, 2013), <http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Poverty%20Reduction/Inclusive%20development/Humanity%20Divided/HumanityDivided_Full-Report.pdf>
- UNDP-DPA, *Joint UNDP-DPA Annual Report 2015* [Laporan Tahunan Bersama UNDP-DPA 2015] (New York: UNDP and DPA, 2015), <<http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/conflict-prevention/undp-dpa-joint-programme-annual-report-2015.html>>
- United Nations Peacekeeping, 'Post Cold-War Surge' [Gelora Pasca-Perang Dingin], 2016, <<http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/surge.shtml>>
- United Nations Security Council Resolution 1325 [Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1325] (2000), 31 Oktober 2000, <[http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/RES/1325\(2000\)](http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/RES/1325(2000))>
- Valladares, J., Sample, K. dan Van der Staak, S., 'Implications for action: enablers, triggers, lockers and agents of programmatic parties' [Implikasi bagi tindakan: Yang memungkinkan, pemicu, pengunci dan agen partai programatis], dalam N. Cheeseman et al., *Politics Meets Policies: The Emergence of Programmatic Political Parties* [Politik bertemu dengan Kebijakan: Munculnya Partai Politik Programatis] (Stockholm: International IDEA, 2014), <<http://www.idea.int/publications/catalogue/politics-meets-policies-emergence-programmatic-political-parties>>
- Varshney, A., 'Ethnic conflict and civil society: India and beyond' [Konflik etnik dan masyarakat sipil: India dan seterusnya], *World Politics*, 53/3 (2001), hal. 362–98
- Warren, M., 'What does corruption mean in a democracy?' [Apakah artinya korupsi dalam negara demokrasi?], *American Journal of Political Science*, 48/2 (2003), hal. 328–43
- Venice Commission (European Commission for Democracy Through Law), *Report on Out Of Country Voting* [Laporan Pemungutan Suara di Luar Negeri] (Strasbourg: Council of Europe, 2011)
- Weyland, K., *Democracy Without Equity: Failures of reform in Brazil* [Demokrasi Tanpa Keadilan: Kegagalan Reformasi di Brasil] (Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press, 1996)
- Widner, J., 'Constitution writing and conflict resolution' [Penulisan konstitusi dan resolusi konflik], *The Round Table*, 94/381 (2005), hal. 503–18
- Will, G., *Money in Politics: What's the Problem?* [Uang dalam Politik: Apa Masalahnya?] [Film], Prager University Foundation, 2014, <<https://www.youtube.com/watch?v=c5-4jW5dLSI>>
- Wolff, S., *Conflict Management in Deeply Divided Societies: Theories and Practice* [Pengelolaan Konflik dalam Masyarakat yang Sangat Terbelah: Teori dan Praktik] (London: Wiley-Blackwell, 2011a)
- , 'Post-conflict state building: the debate on institutional choice' [Pembangunan negara pasca-konflik: perdebatan mengenai pilihan kelembagaan], *Third World Quarterly*, 32/10 (2011b), hal. 1777–1802
- World Bank, *Governance, Growth, and Development Decision-Making—Reflections by Douglass North, Daron Acemoglu, Francis Fukuyama, and Dani Rodrik* [Tata Pemerintahan, Pertumbuhan dan Pembuatan Keputusan Pembangunan – Refleksi oleh Douglass North, Daron Acemoglu, Francis Fukuyama, dan Dani Rodrik] (Washington, DC: World Bank, 2008)
- , *World Development Report 2011: Conflict, Security, and Development* [Laporan Pembangunan Dunia 2011: Konflik, Keamanan dan Pembangunan] (Washington, DC: World Bank, 2011), <<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/4389>>
- , *Poverty and Shared Prosperity 2016: Taking on Inequality* [Kemiskinan dan Kemakmuran Bersama 2016: Menghadapi Ketidaksetaraan] (Washington, DC: World Bank, 2016), <<https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25078/9781464809583.pdf>>
- , *World Development Report 2017: Governance and the Law* [Laporan Pembangunan Dunia 2017: Tata Pemerintahan dan Hukum] (Washington, DC: World Bank, 2017), <<http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2017>>
- World Economic Forum, *The Global Risks Report 2016* [Laporan Risiko Global 2016] (Cologne and Geneva: World Economic Forum, 2016)
- World Values Survey, 'Wave 6: 2010–2014' [Gelombang 6: 2010–2014], <<http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp>>

- Yanguas, P., 'The role and responsibility of foreign aid in recipient political settlements' [Peran dan tanggung jawab bantuan asing dalam penyelesaian politik penerima], *Journal of International Development*, 29/2 (2017), hal. 211–28
- Zamfir, I., *Democracy in Africa: Power Alternation and Presidential Term Limits* [Demokrasi di Afrika: Pergantian Kekuasaan dan Pembatasan Masa Jabatan Presiden] (Brussels: European Parliament, 2016), <[http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/580880/EPRS_BRI\(2016\)580880_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/580880/EPRS_BRI(2016)580880_EN.pdf)>
- Zentrum für Internationale Friedenseinsätze (ZIF), *The Challenge of Sustaining Peace: The Report on the Review of the UN Peacebuilding Architecture* [Tantangan Perdamaian Berkelanjutan: Laporan atas Tinjauan Arsitektur Pembangunan Perdamaian PBB], ZIF Kompakt (Berlin: ZIF, 2015), <http://www.zif-berlin.org/fileadmin/uploads/analyse/dokumente/veroeffentlichungen/ZIF_kompakt_PBA_Review.pdf>



Tentang International IDEA

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) adalah sebuah organisasi antarpemerintahan yang mendukung lembaga-lembaga dan proses-proses demokrasi yang berkelanjutan di seluruh dunia. International IDEA bertindak sebagai katalisator untuk pembangunan demokrasi dengan memberikan sumber daya pengetahuan dan usulan-usulan kebijakan, serta mendukung reformasi demokrasi sebagai respons atas permintaan negara tertentu. International IDEA bekerja dengan pembuat kebijakan, pemerintah, organisasi internasional dan badan-badan, juga organisasi-organisasi regional yang terlibat dalam bidang pembangunan demokrasi.

Apa yang dilakukan oleh International IDEA?

Pekerjaan Institut diorganisasikan pada tingkat global, regional dan negara, dengan fokus pada warga negara sebagai penggerak perubahan. International IDEA menghasilkan pengetahuan yang komparatif dalam bidang keahlian utamanya: proses elektoral, pembangunan-konstitusi, serta partisipasi politik dan perwakilan, juga demokrasi ketika dihubungkan dengan gender, keberagaman, serta konflik dan keamanan.

International IDEA membawa pengetahuan ini kepada perwakilan nasional dan lokal yang bekerja untuk reformasi demokrasi, dan memfasilitasi dialog untuk mendukung perubahan demokrasi.

Dalam pekerjaannya, International IDEA bertujuan untuk:

- meningkatkan kapasitas, legitimasi dan kredibilitas demokrasi;
- partisipasi yang lebih inklusif dan perwakilan yang akuntabel; serta
- kerja sama demokrasi yang lebih efektif dan sah.

Di manakah International IDEA bekerja?

International IDEA bekerja di seluruh dunia. Bermarkas di Stockholm, Swedia, Institut memiliki kantor di Afrika, Asia-Pasifik, Eropa, serta Amerika Latin dan Karibia.

International IDEA adalah Pemantau Tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

<<http://www.idea.int>>

Lanskap politik saat ini menimbulkan tantangan global yang kompleks bagi negara-negara demokrasi.

Lanskap dipengaruhi oleh globalisasi, perubahan kekuatan geopolitik, perubahan peran dan struktur organisasi dan lembaga (supra) nasional serta perkembangan teknologi komunikasi modern. Fenomena transnasional seperti migrasi dan perubahan iklim mempengaruhi dinamika konflik dan pembangunan, warganegara dan kedaulatan negara. Meningkatnya kesenjangan, dan polarisasi sosial serta eksklusi yang dihasilkannya, mendistorsi representasi dan suara politik, mengurangi pemilih moderat yang vital.

Dinamika-dinamika tersebut berkontribusi pada munculnya pandangan yang diperdebatkan secara luas bahwa demokrasi sedang menurun. Sejumlah peristiwa yang terjadi di berbagai penjuru dunia menantang gagasan ketahanan demokrasi dan membuat sistem demokrasi tampak rapuh dan terancam. Namun, nilai-nilai demokrasi di antara warga negara, dan di dalam lembaga-lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional, terus diekspresikan dan dipertahankan.

Ikhtisar *Global State of Democracy 2017: Mengkaji Ketahanan Demokrasi* International IDEA menguraikan tantangan-tantangan utama terkini yang dihadapi demokrasi dan kondisi-kondisi yang memungkinkan bagi terciptanya ketahanan demokrasi. Berdasarkan indeks *Global State of Democracy* yang baru dikembangkan sebagai sebuah basis bukti kunci untuk menginformasikan intervensi kebijakan dan mengidentifikasi pendekatan-pendekatan solutif, publikasi ini menyajikan penilaian global dan regional atas status demokrasi dari tahun 1975—pada awal gelombang ketiga demokratisasi—hingga tahun 2015, dilengkapi dengan analisis kualitatif mengenai tantangan-tantangan demokrasi hingga tahun 2017.

International IDEA

Strömsborg
SE-103 34
Stockholm, Swedia
Tel: +46 8 698 37 00
info@idea.int
www.idea.int

Perludem

Jl. Tebet Timur IV A No. 1
Jakarta Selatan 12820
Indonesia
Tel: +62 21 8300004
admin@perludem.org, perludem@gmail.com
www.perludem.org

ISBN: 978-91-7671-206-1 (print)
ISBN: 978-91-7671-207-8 (PDF)